



LKJIP 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI





PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI INSPEKTORAT DAERAH

JL.K.H.Samanhudi No.4 Telp. (0461) 3202096 Luwuk – SULAWESI TENGAH
Email : itkabbanggai@yahoo.co.id

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Banggai.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Luwuk, 27 Maret 2023

INSPEKTUR,

Drs. ARIE RAHMAN MAKMUR
NIP. 19680817 199703 1 011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2023 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan kinerja ini adalah merupakan tahun kedua atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai selama tahun 2023 yang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2023. Laporan kinerja ini sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKjIP Kabupaten Banggai Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu: "Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal", sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banggai tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2023. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2023 ini diharapkan dapat terjadi peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai secara keseluruhan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis selanjutnya, serta bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tahun yang akan datang.

Luwuk, Maret 2024
BUPATI BANGGAI

H. H. AMIRUDIN, MM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Banggai telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. LKjIP Kabupaten Banggai Tahun 2023 di susun sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2023 disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk pernyataan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai yang di kelompokkan ke dalam pencapaian Misi Kabupaten Banggai yang terdiri dari 6 (enam) misi dengan 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator sasaran yang harus dicapai, untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banggai yang disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Di ketahui bahwa hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 10 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Banggai Tahun 2023 menunjukkan bahwa, 6 indikator

sasaran diperoleh capaian kinerja lebih dari 100% bermakna Sangat Baik, 8 indikator sasaran diperoleh capaian kinerja >75%-100% bermakna Baik, 2 indikator sasaran diperoleh capaian kinerja 55%-75% bermakna Cukup, dan 1 indikator sasaran diperoleh capaian kinerja <55% bermakna Kurang. Meskipun terdapat beberapa indikator masih belum berhasil, namun secara umum target indikator kinerja pada Tahun 2023 dikategorikan cukup berhasil dengan nilai capaian rata-ratanya yaitu sebesar 91,34% dari 17 indikator.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai yang menggambarkan capaian kinerja pada tahun 2023 dalam mendukung pencapaian Visi Kabupaten Banggai.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	xi
Daftar Grafik	xii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Gambaran Umum Daerah	I-1
1.3 Organisasi	I-8
1.4 Isu-Isu Strategis	I-12
1.5 Landasan Hukum	I-12
1.6 Sistematika Laporan	I-13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis	II-1
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	II-10
2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	II-29
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	II-32
2.5 Perjanjian Kinerja	II-34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Pengukuran Kinerja	III-1
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	III-2
3.3 Analisis Capaian Kinerja	III-4
3.4 Realisasi Anggaran	III-112
BAB IV PENUTUP	IV-1
L A M P I R A N	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Banggai	I-3
1.2	Kondisi topografi kemiringan lereng di Kabupaten Banggai	I-5
1.3	Jumlah penduduk (ribu) Kab.Banggai Menurut Jenis Kelamin, 2023	I-7
1.4	Kondisi ASN berdasarkan golongan ruang Tahun 2023	I-10
1.5	Kondisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2023	I-11
1.6	Kondisi ASN PPPK berdasarkan golongan ruang Tahun 2023	I-11
1.7	Kondisi PPPK berdasarkan pendidikan Tahun 2023	I-12
2.1	Target Pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpilih Sesuai Periode RPJMD Tahun 2021 – 2026	II-5
2.2	Keterkaitan Pokok – Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Banggai Periode 2021-2026	II-7
2.3	Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah 2021-2026	II-9
2.4	Visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah 2021-2026	II-12
2.5	Arah kebijakan umum pembangunan daerah kabupaten banggai tahun 2021-2026	II-26
2.6	Indikator kinerja utama Pemerintah kabupaten banggai	II-33
2.7	Perjanjian Kinerja tahun 2023	II-34
3.1	Interpretasi pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran	III-1
3.2	Pencapaian indikator kinerja tahun 2023	III-3
3.3	Rekap pencapaian indikator sasaran	III-4
3.4	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	III-4
3.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020 – 2023	III-8
3.6	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan tahun 2023	III-15
3.7	Jumlah Penduduk Usia Angkatan Kerja Tahun 2023 Kabupaten Banggai	III-18
3.8	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banggai, 2014-2023	III-21
3.9	Jumlah dan Persentase penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah	III-22
3.10	Tabel Estimasi Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023	III-22
3.11	Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Banggai dengan Gini	III-25

	Rasio Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi tengah, 2020-2023	
3.12	Program, Anggaran dan Realisasi Yang Mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	III-27
3.13	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	III-28
3.14	Daftar eksportir SKA kabupaten Banggai tahun 2023	III-29
3.15	Jumlah Usaha Kecil Menurut Kecamatan Tahun 2023	III-30
3.16	Jumlah Usaha Kecil di Kabupaten Banggai Berdasarkan Jenis Industri Tahun 2023	III-30
3.17	Data Pelaku Usaha Mikro Kabupaten Banggai Tahun 2023	III-31
3.18	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai, Tahun 2020–2023	III-33
3.19	Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2023 Yang Mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	III-34
3.20	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan	III-35
3.21	Nilai Rata-Rata dan Status IDM Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2022	III-36
3.22	Status Perkembangan Desa di Kabupaten Banggai, 2023	III-37
3.23	Perbandingan IDM Banggai dengan Kabupaten/Kota, Provinsi di Sulawesi Tengah dan IDM Nasional tahun 2023	III-38
3.24	Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2023 Yang Mendukung sasaran Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	III-40
3.25	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	III-41
3.26	Capaian Infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik tahun 2023	III-42
3.27	Infrastruktur dasar dan wilayah di kabupaten banggai, 2023	III-42
3.28	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan	III-43
3.29	Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2023 Yang Mendukung sasaran Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	III-46
3.30	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	III-48
3.31	Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	III-49
3.32	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya	III-50

	Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	
3.33	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banggai, 2019–2023	III-51
3.34	Potensi Sektor Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Banggai	III-51
3.35	Jumlah Produksi Sektor Pertanian Tahun 2023	III-52
3.36	Produktivitas Tanaman Pangan, Tanaman Holtikultura, Tanaman Perkebunan	III-53
3.37	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap, 2021-2023	III-58
3.38	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya dan Jenis Budidaya, 2021-2023	III-58
3.39	Budidaya Perikanan Tambak di Kabupaten Banggai, 2023	III-58
3.40	Pembenihan Perikanan di Kabupaten Banggai, 2023	III-59
3.41	Persentase Populasi ternak tahun 2023	III-61
3.42	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banggai (miliar rupiah), 2019–2023	III-64
3.43	Jenis Komoditi Unggulan Dan Sektor Andalan Kabupaten Banggai	III-64
3.44	Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Sulawesi Tengah Tahun 2023	III-67
3.45	Pola pangan harapan (PPH) ketersediaan kabupaten banggai, 2023	III-69
3.46	Angka kecukupan energi dan protein kabupaten banggai, 2023	III-69
3.47	Cadangan pangan kabupaten banggai, 2023	III-69
3.48	Perbandingan Skor PPH Konsumsi Kabupaten Banggai dengan Target Nasional, 2023	III-70
3.49	Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	III-73
3.50	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat	III-75
3.51	Indeks kualitas air	III-76
3.52	Indeks kualitas udara	III-76
3.53	Indeks kualitas lahan/vegetasi hutan	III-76
3.54	Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten banggai, 2023	III-77
3.55	Program yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat	III-80
3.56	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya	III-81

	Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	
3.57	Daftar dan Jumlah Akomodasi di Kabupaten Banggai Per Kecamatan, 2022-2023	III-83
3.58	Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang tersedia pada Hotel Berbintang dan non bintang, penginapan, home stay, losmen, cottage, guest house, wisma di Kabupaten Banggai Tahun 2023	III-83
3.59	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Dan Mancanegara, 2023	III-85
3.60	Jumlah Rumah Makan/Restoran menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023	III-86
3.61	Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur yang Tersedia Pada Hotel Nonbintang Menurut Kecamatan, 2022-2023	III-87
3.62	Wisata Alam, Budaya Dan Buatan, Bahari/Tirta yang ada di Kabupaten Banggai	III-88
3.63	Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	III-89
3.64	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	III-90
3.65	Komunitas seni pertunjukkan Kabupaten Banggai Tahun 2023	III-91
3.66	Aset Cagar Budaya Kabupaten Banggai	III-93
3.67	Jumlah Penduduk/Pengunjung perpustakaan tahun 2023	III-95
3.68	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2023	III-95
3.69	Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	III-97
3.70	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	III-97
3.71	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2023	III-98
3.72	Daftar Inovasi yang berpartisipasi dalam penilaian indeks inovasi daerah Tahun 2023	III-102
3.73	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Banggai Tahun 2022 dan 2023	III-104
3.74	Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	III-108

3.75	Tingkat Efisiensi dan efektifitas Kinerja Kabupaten Banggai Tahun 2023	III-110
3.76	Realisasi Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2023	III-112
3.77	Pendapatan Pajak Daerah	III-114
3.78	Pendapatan retribusi daerah	III-115
3.79	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023	III-116
3.80	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	III-117
3.81	Pendapatan Transfer	III-117
3.82	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	III-118
3.83	Realisasi Belanja Daerah Per 31 Desember 2023	III-118
3.84	Belanja Pegawai	III-120
3.85	Belanja barang dan jasa	III-120
3.86	Belanja Hibah	III-121
3.87	Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	III-123

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.1	Peta Administrasi Kabupaten Banggai	I-2
2.1	Tema pembangunan daerah kabupaten banggai tahun 2021-2026	II-28
2.2	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026	II-29
3.1	Gambar Indeks Risiko Bencana Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2023	III-49

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul Grafik	Halaman
1.1	Luas (km ²) Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banggai	I-3
3.1	Perkembangan IPM kabupaten Banggai 2019-2023	III-5
3.2	Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten Banggai, 2019-2023	III-6
3.3	Perkembangan Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah/orang/tahun) Kabupaten Banggai	III-7
3.4	Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banggai tahun 2018-2023	III-7
3.5	Perbandingan IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah, 2021-2023	III-9
3.6	Perbandingan IPM Kabupaten Banggai dengan Nasional, 2020-2023	III-9
3.7	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kab.Banggai dengan Provinsi, Kabupaten/Kota di Sekitar dan Nasional, 2022-2023	III-10
3.8	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banggai dengan Provinsi, Kabupaten/Kota di Sekitar dan Nasional, 2022-2023	III-11
3.9	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banggai dengan Provinsi, Kabupaten/Kota di Sekitar dan Nasional, 2022-2023	III-11
3.10	Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (ribu rupiah), Kabupaten Banggai dengan Provinsi, Kabupaten/Kota di Sekitar dan Nasional, 2021-2023	III-12
3.11	Indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Banggai, 2018-2022	III-16
3.12	Perbandingan IDG Kabupaten Banggai dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tahun 2022	III-16
3.13	Perbandingan IDG Kabupaten Banggai dengan Nasional	III-17
3.14	Perbandingan TPT Kabupaten Banggai dengan Provinsi Sulawesi tengah dan Nasional, 2022-2023	III-19
3.15	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Tahun 2014–Maret 2023	III-21
3.16	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Banggai, 2018-2023	III-25
3.17	Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Banggai dengan Gini Rasio Nasional, 2020-2023	III-26
3.18	Perbandingan IDM Banggai dengan Provinsi dan Nasional, 2023	III-38
3.19	Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Banggai (kuintal), 2020–2023	III-53

3.20	Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Kab.Banggai dengan Nasional, 2023	III-67
3.21	Jumlah dan persentase penduduk miskin kabupaten banggai, 2014-2023	III-71
3.22	Perkembangan garis kemiskinan kabupaten banggai, 2017-2023	III-71
3.23	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Banggai, 2018—2023	III-72
3.24	Perbandingan IKA,IKU, dan IKL Kabupaten Banggai, 2021-2023	III-78
3.25	Perbandingan IKLH Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional	III-78
3.26	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai, 2020-2023	III-99
3.27	Nilai dan Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Banggai, 2019-2023	III-103

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

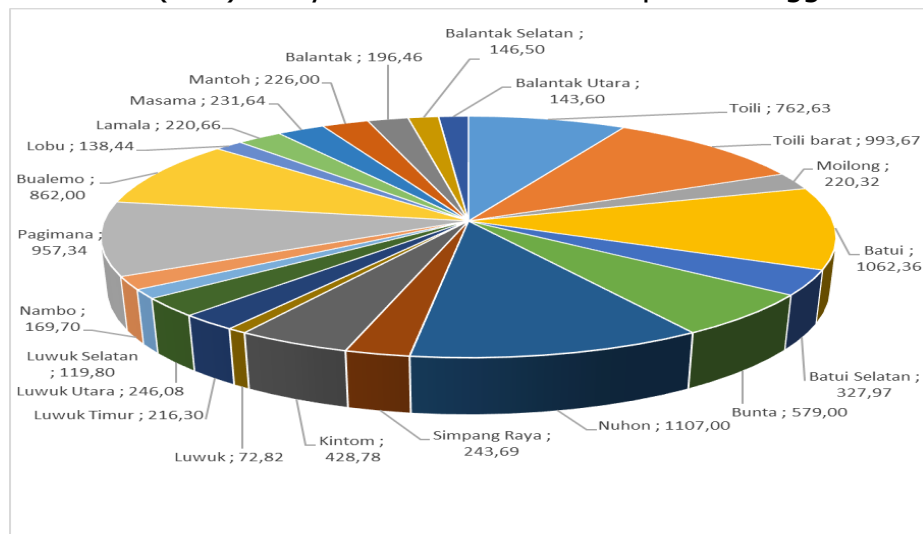
Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, serta berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2023 merupakan tahun kedua atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Banggai adalah salah satu Kabupaten yang terbentuk sejak awal pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tanggal 1 April 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi. Selanjutnya, sebagian wilayah Kabupaten Banggai dimekarkan menjadi Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana

Grafik 1.1
Luas (km²) Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banggai



Sumber : BPS , Banggai Dalam Angka 2023

Tabel 1.1
Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Banggai

23 Kecamatan	291 Desa	46 Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan
Toili	24	1	25
Toili Barat	17	-	17
Moilong	16	-	16
Batui	6	7	13
Batui Selatan	10	-	10
Bunta	18	4	22
Nuhon	20	-	20
Simpang Raya	12	-	12
Kintom	11	3	14
Luwuk	2	8	10
Luwuk Timur	13	-	13
Luwuk Utara	9	2	11
Luwuk Selatan	1	9	10
Nambo	5	6	11
Pagimana	31	3	34
Bualemo	19	-	19
Lobu	10	-	10
Lamala	12	-	12
Masama	14	-	14
Mantoh	10	-	10
Balantak	10	3	13
Balantak Selatan	11	-	11
Balantak Utara	10	-	10

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Tahun 2023

Jarak antara ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten lain di Sulawesi Tengah yaitu :

- Luwuk ke Palu = 610 Kilo Meter
- Luwuk ke Parigi = 535 Kilo Meter
- Luwuk ke Poso = 388 Kilo Meter
- Luwuk ke Ampana = 248 Kilo Meter
- Luwuk ke Banggai = 100 Km/66 Mil Laut
- Luwuk ke Salakan = 61 Km/38 Mil Laut
- Luwuk ke Bungku = 161 Km/106 Mil Laut

1.2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan astronomisnya, Kabupaten Banggai terletak pada posisi antara 0°30' dan 2°20' Lintang Selatan dan antara 122°23' dan 124°20' Bujur Timur. Posisi geografis Kabupaten Banggai berada di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tengah di jalur koridor perairan Teluk Tolo, Selat Peling dan Teluk Tomini dan diapit tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una dan Morowali Utara. Kabupaten Banggai memiliki luas wilayah keseluruhan 29.982,38 Km² dan 9.672,7 Km² atau 32,26 persen diantaranya merupakan daratan dan 20.309,68 Km² atau 67,74% merupakan wilayah laut. Berdasarkan letak geografis tersebut, maka Kabupaten Banggai memiliki posisi strategis sebagai kawasan maritim yang potensial untuk dikembangkan sebagai kekuatan pendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2.1.3. Topografi

Dilihat dari kondisi topografi, Kabupaten Banggai didominasi oleh kawasan perbukitan dengan kategori kemiringan lereng curam–sangat curam (>40%) sebesar 442.664 Ha atau sekitar 47.82% dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan datar dengan kemiringan antara 0–15% di Kabupaten Banggai sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 21,06% atau 195.067 Ha, sehingga lahan yang dapat dijadikan kawasan budidaya juga menjadi sangat terbatas. Keadaan topografi Kabupaten Banggai berdasarkan kemiringan lereng, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Kondisi Topografi Kemiringan Lereng di Kabupaten Banggai

No.	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Datar (0–2%)	142.253	15,36%
2.	Datar–Landai (2-15%)	52.814	5,70%
3.	Landai–Agak Curam–Curam (15–40%)	288.111	31,12%
4.	Curam–Sangat Curam (>40%)	442.664	47,81%

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Tahun 2023

1.2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam. Potensi bencana alam di Kabupaten Banggai Terdiri atas:

a. Kawasan Rawan Banjir

Sebaran daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terdapat pada Kecamatan Toili, Batui dan Bonta, Pesisir utara dan pantai Bunta, Jalur Luwuk-Lamala, dan Pesisir Poh-Pagimana.

Strategi Penataan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana Banjir :

1. Melakukan Normalisasi sungai
2. Membatasi permukiman yang menempati dataran sempit pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan pegunungan yang berlereng terjal

b. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Hampir semua wilayah Banggai mempunyai potensi tsunami rendah. Adapun wilayah yang berpotensi tsunami sedang, tersebar di Kecamatan Bunta, Toili, Batui, Bualemo, dan Lamala. Wilayah yang rawan terhadap tsunami adalah Toili-Batui, Pesisir utara, dan pantai Bunta, Jalur Luwuk Lamala, Pesisir Poh-Pagimana, dan Pantai Bualemo.

c. Kawasan Rawan Bencana Abrasi

Abrasi terjadi akibat gelombang dan arus laut yang menabrak garis pantai. Abrasi dapat diakibatkan oleh kondisi alamiah, misalnya terjadinya kenaikan muka air laut

yang bersifat global. Abrasi juga dapat terjadi akibat perubahan arus laut sepanjang pantai karena aktifitas manusia mengubah morfologi pantai seperti reklamasi, pembuatan pelabuhan besar, pengerukan dan penggalian bahan galian golongan C di tepi pantai.

d. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Berdasarkan hasil analisis dalam RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032, daerah rawan longsor di Kabupaten Banggai terdiri atas :

1. Daerah rawan longsor kelas rendah menyebar merata di seluruh Kabupaten Banggai yaitu di Kecamatan Toili, Kintom, Batui, Bunta, Luwuk, Bualemo, Lamala, Balantak, terutama pada wilayah yang berada pada pinggir perairan.
2. Kelas kerawanan sedang berada pada semua wilayah Banggai dengan dominasi di Kecamatan Toili, Batui, Bunta, Kintom, dan Pagimana.
3. Kelas kerawanan tinggi sangat dominan di Kecamatan Bunta dan Pagimana, dan sedikit di Kecamatan Toili, Batui, Kintom, Bualemo, Lamala, Luwuk, dan Balantak.

e. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Potensi gempa Bumi di Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

▪ Kerawanan tinggi

Daerah kerawanan tinggi bencana gempabumi di Kabupaten Banggai adalah kawasan pesisir Kecamatan Batui dan Toili, sebagian pesisir Kecamatan Bunta, hampir seluruh pesisir Kecamatan Bualemo, sebagian pesisir Kecamatan Balantak, sebagian pesisir Kecamatan Lamala dan sebagian pesisir Kecamatan Luwuk bagian timur

▪ Kerawanan rendah

Hampir keseluruhan wilayah Banggai mempunyai kerawanan rendah, jauh lebih besar angka/luasannya dibandingkan wilayah yang mempunyai kerawanan tinggi.

f. Kawasan Rawan Bencana Erosi Permukiman dan Erosi Sungai

Strategi Penataan Ruang pada kawasan erosi permukaan dan erosi sungai :

- a. Menghindari aktivitas permukiman pada kawasan sekitar tebing sungai.
- b. Menghindari aktivitas permukiman pada hutan lindung DAS; dan
- c. Membuat tanggul-tanggul sungai yang rawan erosi, terutama untuk wilayah perkotaan.

1.2.1.5. Demografi

Kepadatan penduduk merupakan indikator tekanan penduduk di suatu wilayah. Ditinjau di masing-masing daerah, diketahui bahwa terjadi ketimpangan kepadatan penduduk antar kecamatan. Kepadatan penduduk terpusat di daerah ibukota kabupaten yang memiliki berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah kabupaten untuk bekerja atau menetap disana. Dalam hal ini, Kecamatan Luwuk sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Banggai memiliki kepadatan yang paling tinggi, mencapai 479 jiwa per km², jauh di atas angka kepadatan penduduk Kabupaten Banggai. Sementara kecamatan lain hanya memiliki kepadatan penduduk di bawah seratus. Kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Nuhon, yaitu sebanyak 17 jiwa per km².

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk (ribu) Kab. Banggai Menurut Jenis Kelamin, 2023

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Toili	18.704	17.928	36.632
Luwuk	16.460	16.604	33.066
Luwuk Selatan	12.194	12.224	24.418
Pagimana	12.355	11.984	24.339
Toili Barat	12.577	11.675	24.252
Luwuk Utara	10.055	10.023	20.078
Bunta	10.088	9.729	19.817
Moilong	10.080	9.723	19.803
nuhon	10.108	9.582	19.690
Bualemo	9.908	9.565	19.473
Batui	9.733	9.310	19.043
Batui selatan	7.856	7.399	15.255
Simpang Raya	7.774	7.249	15.023
Luwuk timur	6.747	6.367	13.114
Masama	6.175	6.054	12.229
Kintom	5.934	5.935	11.869
Nambo	4.382	4.466	8.848
Lamala	3.768	3.533	7.301
Mantoh	3.702	3.374	7.076
Balantak	3.093	2.969	6.062
Balantak Selatan	2.830	2.598	5.428
Balantak Utara	2.550	2.515	5.065
Lobu	2.086	2.035	4.121
Jumlah	189.159	182.843	372.002

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Banggai Tahun 2023

Jumlah penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2023 berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai sebesar 372.002 jiwa. Beberapa kecamatan di Kabupaten Banggai memiliki persentase penduduk yang besar seperti Kecamatan Toili (9,84%) dan Kecamatan Luwuk (8,88%). Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Banggai sebanyak 189.159 jiwa atau 50,84 persen dari penduduk Kabupaten Banggai, sementara jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Banggai sebanyak 182.843 jiwa, atau 49,15 persen dari penduduk Kabupaten Banggai.

1.3. ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 208 sampai dengan Pasal 235 menyebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Banggai dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A;
 2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe A;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe A;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;
 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C;
 7. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe A;

9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe A;
 10. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe A;
 11. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe A;
 14. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B;
 15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Tipe A;
 16. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan Dinas Tipe B;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe B;
 18. Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan Dinas Tipe B;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe A;
 20. Dinas Perikanan merupakan Dinas Tipe B;
 21. Dinas Pariwisata merupakan Dinas Tipe A;
 22. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan merupakan Dinas Tipe A;
 23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Dinas Tipe A;
 24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan Dinas Tipe A;
- e. Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Tipe A;
 2. Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan Tipe A;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A;
 4. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A;
 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Tipe A;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan Tipe A;
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Tipe A;
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Luwuk merupakan Kecamatan Tipe A;
 2. Kecamatan Bunta merupakan Kecamatan Tipe A;

3. Kecamatan Kintom merupakan Kecamatan Tipe A;
4. Kecamatan Pagimana merupakan Kecamatan Tipe A;
5. Kecamatan Batui merupakan Kecamatan Tipe A;
6. Kecamatan Balantak merupakan Kecamatan Tipe A;
7. Kecamatan Lamala merupakan Kecamatan Tipe A;
8. Kecamatan Bualemo merupakan Kecamatan Tipe A;
9. Kecamatan Masama merupakan Kecamatan Tipe A;
10. Kecamatan Toili merupakan Kecamatan Tipe A;
11. Kecamatan Luwuk Timur merupakan Kecamatan Tipe A;
12. Kecamatan Toili Barat merupakan Kecamatan Tipe A;
13. Kecamatan Balantak Selatan merupakan Kecamatan Tipe A ;
14. Kecamatan Luwuk Selatan merupakan Kecamatan Tipe A;
15. Kecamatan Luwuk Utara merupakan Kecamatan Tipe A;
16. Kecamatan Batui Selatan merupakan Kecamatan Tipe A;
17. Kecamatan Nuhon merupakan Kecamatan Tipe A;
18. Kecamatan Moilong merupakan Kecamatan Tipe A;
19. Kecamatan Simpang Raya merupakan Kecamatan Tipe A;
20. Kecamatan Lobu merupakan Kecamatan Tipe A;
21. Kecamatan Mantoh merupakan Kecamatan Tipe A;
22. Kecamatan Balantak Utara merupakan Kecamatan Tipe A; dan
23. Kecamatan Nambo merupakan Kecamatan Tipe A;
24. Kecamatan Toili jaya merupakan Kecamatan Tipe A.

Dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Banggai didukung oleh Aparatur Sipil Negara. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai sebanyak 6.536 PNS dan 902 PPPK yang dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Kondisi ASN Berdasarkan GOLRU Tahun 2023

No	Golru	Jenis Kelamin				Total
		Pria	%	Wanita	%	
1.	I/a		0,004	4	0,06	4
2.	I/b	1	0,02	1	0,02	2
3.	I/c		0,00	11	0,17	11
4.	I/d	1	0,02	6	0,09	7

5.	II/a	4	0,06	31	047	35
6.	II/b	40	0,61	78	1,19	118
7.	II/c	109	1,66	153	2,33	262
8.	II/d	207	3,16	229	3,49	436
9.	III/a	454	6,92	257	3,92	711
10.	III/b	571	8,71	371	5,66	942
11.	III/c	672	10,25	395	6,02	1067
12.	III/d	770	11,74	557	8,49	1327
13.	IV/a	469	7,15	350	5,34	819
14.	IV/b	381	5,81	371	5,66	752
15.	IV/c	24	0,37	37	0,56	61
16.	IV/d	2	0,03	2	0,03	4
17.	IV/e	0	0,00	0	0,00	0
Total		3.705	56.50	2.853	43.50	6.558

Sumber : BKPSDM Kab.Banggai 2023

Tabel 1.5
Kondisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Pendidikan	Jenis Kelamin				Total
		Pria	%	Wanita	%	
1.	SD	0	0,00	4	0,14	4
2.	SMP	1	0,03	1	0,41	2
3.	SMA/SMK	0	7,88	11	9,85	11
4.	D.I	1	0,38	6	0,11	7
5.	D.II	4	2,36	31	1,40	35
6.	D.III	40	7,15	78	2,04	118
7.	SI/D.IV	109	36,55	153	27,19	262
8.	S2	207	2,12	229	2,30	436
9.	S3	454	0,02	257	0,06	711
Total		3.705	56.50	2.853	43.50	6.558

Sumber : BKPSDM Kab.Banggai 2023

Tabel 1.6
Kondisi ASN PPPK Berdasarkan GOLRU 2023

No	Golru	Jenis Kelamin				Total
		Pria	%	Wanita	%	
1.	V	10	1,11	0	0,00	10
2.	VII	20	2,22	93	10,31	113
3.	IX	194	21,51	568	62,97	762
4.	X	6	0,67	11	1,22	17
Total		230	25,50	672	74,50	902

Sumber : BKPSDM Kab.Banggai 2023

Tabel 1.7
Kondisi PPPK Berdasarkan Pendidikan tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin				Total
		Pria	%	Wanita	%	
1.	SMA/SMK	10	1,11	0	0,00	10
2.	D.III	20	2,22	93	10,31	113
3.	SI/D.IV	194	21,51	568	62,97	762
4.	S2	6	0,67	11	1,22	11
Total		230	25,50	672	74,50	902

Sumber : BKPSDM Kab.Banggai 2023

1.4. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) kedepannya. Adapun isu strategis atau permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banggai pada tahun 2023 yang juga tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Banggai sebagai berikut :

1. Dampak Pandemi Covid-19
2. Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Kemiskinan dan Pengangguran
4. Keterbatasan Infrastruktur dan Kesenjangan Wilayah
5. Air Bersih, Sanitasi, Perumahan Layak dan Terjangkau
6. Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam dan Ketahanan Pangan Daerah
7. Revolusi Industri 4.0 dan Transformasi Digital
8. Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Daerah
10. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

1.5. LANDASAN HUKUM

Penyusunan laporan kinerja Kabupaten Banggai tahun 2023 di susun berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Nomor 143).

1.6. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang, gambaran umum daerah, organisasi, isu-isu strategis, landasan hukum, dan sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien serta akuntabel (*Good Governance*), Pemerintah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyusun dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai memuat arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banggai yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Banggai tahun 2021-2026 sebagai berikut:

***"TERWUJUDNYA BANGGAI MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA
BERBASIS KEARIFAN LOKAL"***

Penjabaran Visi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

Kabupaten Banggai, adalah kesatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959, termasuk sarana dan prasarana, kelembagaan serta potensi sumber daya alam dan lingkungan alamiah. Sebagai daerah otonom, maka Kabupaten Banggai adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah geografis yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintah dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Banggai Maju, di maknakan sebagai tingkat pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Banggai yang di ukur berdasarkan indikator sosial ekonomi, budaya dan politik. Dari indikator sosial, kemajuan daerah di ukur dari kualitas sumber daya manusianya, di katakan makin maju apabila sumber daya manusianya Berkepribadian Bangsa, berahlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi yang tercermin dalam produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju di tandai dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, derajat kesehatan yang lebih baik, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik.

Berdasarkan indikator ekonomi, kemajuan daerah di ukur berdasarkan tingkat pendapatan rata – rata masyarakatnya dan distribusi/kontribusi sektor terhadap pembentukan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) nya. Daerah maju pada umumnya ditandai dengan telah berkembangnya sektor industri dan sektor jasa.

Guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah, investasi digerakan untuk menjadi sumber utama pembangunan di Kabupaten Banggai. Bermodalkan keunggulan kompetitif di bidang pertanian, kelautan, industri dan pertambangan, hendaknya dimanage dengan baik untuk menjadi daya tarik investasi. Iklim Investasi yang kondusif, reformasi birokrasi, pelayanan perizinan dan kondisi ketersediaan infrastruktur pendukung ekonomi seperti sarana prasarana transportasi yang mendukung aksesibilitas daerah, telekomunikasi, ketenagalistrikan, arahan tata ruang yang mendukung kegiatan industri dan perdagangan serta situasi keamanan dan ketertiban daerah menjadi prasyarat yang harus disiapkan/dibenahi oleh pemerintah daerah guna menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banggai, dibarengi dengan optimalisasi dan pendayagunaan Jaringan promosi, informasi potensi dan peluang investasi dan perdagangan yang ada di daerah.

Investasi yang dikembangkan hendaknya mampu untuk menciptakan lapangan kerja, menanggulangi kemiskinan yang keseluruhannya diarahkan pada sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai, olehnya itu penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi juga mutlak di lakukan.

Kemajuan daerah juga dimaknakan sebagai kemampuan untuk mewujudkan kualitas pelayanan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, dari segi daya dukung sumber daya manusia yang cerdas dan sehat, terampil dan profesional, ekonomi

daerah yang berdaya saing, ketersediaan infrastruktur wilayah yang dapat diakses secara luas dan merata serta manajemen pelayanan publik yang efektif, efisien dan memberi dampak bagi berdayanya fungsi – fungsi ekonomi, politik, hukum dan pemerintahan, sosial, budaya dan kehidupan keagamaan.

Makna Visi Banggai Maju ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya PDRB/Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, pendapatan perkapita serta inflasi stabil dan terkendali.
2. Investasi yang masuk kedaerah meningkat.
3. Menurunnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, dengan bertambahnya Desa yang berstatus maju dan mandiri.
4. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata.
5. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata, perdagangan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalan dalam pembentukan PDRB meningkat.
6. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi meningkat.

Banggai Mandiri, dimaknakan sebagai suatu kondisi dimana Kabupaten Banggai mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan berkualitas, yang sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya yang telah maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Atau dengan kata lain kemandirian daerah adalah kemampuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lainnya dengan mengandalkan pada prakarsa, kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang berkualitas, dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan daerahnya sendiri. Makna kemandirian diartikan sebagai optimalisasi sumber – sumber pendapatan asli daerah, yang dapat dilihat pada meningkatnya kontribusi/proporsi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Atau dengan kata lain berkurangnya tingkat ketergantungan fiskal terhadap dana transfer kedaerah oleh pemerintah pusat, melalui kemandirian keuangan daerah.

Makna Visi Banggai Mandiri ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah meningkat signifikan melalui optimalisasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah.
2. Kapasitas Fiskal Daerah meningkat signifikan, dengan mengoptimalkan Dana Transfer Kedaerah dan Dana Desa.

Banggai Sejahtera, di maknakan sebagai kondisi di mana masyarakat Kabupaten Banggai mampu untuk meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kebebasan mengemukakan pendapat, menggunakan hak politik, serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Daerah yang sejahtera juga di tunjukan oleh berkurangnya kesenjangan antar daerah / wilayah, baik perkotaan dan perdesaan serta daerah terpencil dan terisolir, tersedianya infrastruktur serta terbinanya kekuatan – kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

Makna Visi Banggai sejahtera ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia meningkat yang di tunjukan oleh Indeks Pembangunan Manusia, Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender meningkat.
2. Pendapatan masyarakat meningkat di barengi dengan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar kelompok.
3. Meningkatnya lapangan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran berkurang.

Berbasis Kearifan Lokal, dimaksudkan bahwa perwujudan Kabupaten Banggai yang maju, mandiri dan sejahtera harus di dasarkan atau di landasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat Kabupaten Banggai (Babasalan). Kearifan lokal adalah suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat berupa sikap, nilai-nilai, etika, cara-cara, perilaku, kepercayaan, keyakinan, adat istiadat, hukum adat, pandangan, kemampuan, dan pengetahuan dari komunitas atau masyarakat lokal untuk mengelola lingkungan hidup, tradisi, dan budaya setempat. Kearifan lokal berkaitan dengan makna visi lainnya merupakan dasar atau pendekatan untuk pengambilan kebijakan pada level lokal dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan serta penataan perekonomian daerah, dengan tetap mengacu pada nilai-nilai sosio-kultural masyarakat setempat, yang telah diakui dan dihargai secara turun temurun sebagai sebuah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem

kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap bersendikan agama.

Perwujudan makna visi kearifan lokal dan budaya di maksud di tandai oleh adanya hal – hal sebagai berikut :

1. Aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penerapan nilai-nilai budaya dan Bahasa daerah dalam muatan lokal di sekolah.
3. Terpeliharanya tradisi dan adat istiadat daerah, yang di tunjukan melalui even atau kegiatan budaya.
4. Terpeliharanya Cagar Budaya Daerah.
5. Harmonisasi dan moderasi kehidupan umat beragama di daerah.

Berdasarkan Visi dan maknanya sebagaimana telah di uraikan di atas, maka target makro daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021–2026 sebagai ukuran keberhasilan pencapaian/perwujudan Visi Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Terpilih Sesuai Periode
RPJMD Tahun 2021 – 2026

Indikator	Base Line Data (2020*)	Target Akhir RPJMD
Banggai Maju		
1. Pertumbuhan Ekonomi	2,54%	5,99%
2. Pendapatan Perkapita (Juta Rp)	75,76	83,09
3. Tingkat Inflasi	0,83%	2,00%
4. Prosentase Infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi Baik	NA	80,00%
5. Presentase Desa Maju berdasarkan IDM	26,12%	75,00%
Banggai Mandiri		
6. Kapasitas Fiskal Daerah	Tinggi	Tinggi
7. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	8,06%	13,56%
Banggai Sejahtera		
8. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,39%	5,00%
9. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	2,42%	2,18%
10. Gini Rasio	0,308	0,277
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,22	73,57
12. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	NA	46,9
Kearifan Lokal		
13. Indeks Kerukunan Beragama	NA	80
14. Indeks Pembangunan Kebudayaan	NA	56,31

Keseluruhan target Visi sebagaimana di atas, hanya dapat di capai dan di laksanakan dengan di dukung oleh pemerintahan daerah yang baik, bersih, transparan dan akuntable melalui pelaksanaan reformasi Birokrasi, sehingganya ukuran keberhasilan perwujudan Reformasi Birokrasi akan menentukan keberhasilan pencapaian Visi RPJMD.

Guna membangkitkan semangat dan pemahaman Bersama dari seluruh stakeholders pembangunan daerah Kabupaten Banggai, Visi kemudian di terjemahkan kedalam motto, slogan ataupun *Tag Line* pembangunan daerah Kabupaten Banggai 2021-2026 yaitu **BANGGAI LEBIH BAIK** atau dalam Bahasa Saluan, Balantak dan Banggai sebagai perwujudan dari kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan daerah di terjemahkan menjadi **BANGGAI MAIMA, BANGGAI PORE, ATAU BANGGAI MONONDOK.**

Banggai Lebih Baik dapat di terjemahkan sebagai kondisi Kabupaten Banggai yang lebih baik dari sebelumnya yang menunjukkan kondisi lebih Maju, lebih Mandiri dan lebih sejahtera, yang dapat di gambarkan antara lain dalam perwujudan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia lebih baik
2. Ekonomi Kerakyatan lebih baik
3. Infrastruktur lebih baik
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam Lebih Baik
5. Pariwisata dan Budaya Lebih baik
6. Birokrasi Lebih baik

Sebagai landasan kerja dan landasan Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Banggai dalam mencapai Banggai Lebih Baik, Moto yang di gunakan adalah CERDAS yaitu mampu membaca dan memahami apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat, SANTUN yaitu siap dan ikhlas menerima, menyerap dan menindaklanjuti seluruh kritik, masukan dan aspirasi masyarakat serta RELIGIUS yaitu menggunakan pendekatan Aqidah, Syariah dan Ahlak dalam melakukan setiap tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.2. Misi

Rumusan Misi sebagai penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai, yang akan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif dan Sejahtera.
2. Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana.
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan.
5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya serta Nilai Keagamaan.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.



Adapun penjabaran unsur Visi RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 – 2026 kedalam Misi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Katerkaitan Pokok – Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Banggai Periode 2021-2026

Pokok Visi	Misi Terkait	
Banggai Maju	Di terjemahkan dalam Misi ke (1) Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif Dan Sejahtera	Pokok – pokok Visi dan Pelaksanaan misi pembangunan daerah tahun 2021 – 2026 lainnya akan terlaksana dengan baik jika di tunjang oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
	Di terjemahkan dalam Misi ke (2) Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif Dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi	
	Di terjemahkan dalam Misi ke (3) Mempercepat Pertumbuhan Dan Pemerataan Infrastruktur Serta	

	Penanggulangan Bencana	melalui pelaksanaan Misi ke (6) Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel
	Diterjemahkan dalam Misi ke (4) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan	
	Di terjemahkan dalam Misi ke (5) Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	
Banggai Mandiri	Dilaksanakan dalam Misi ke (2) Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif Dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi.	
	Diterjemahkan dalam Misi ke (4) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan	
	Diterjemahkan dalam Misi ke (6) Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel.	
Banggai Sejahtera	Di terjemahkan dalam Misi ke (1) Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas , Produktif Dan Sejahtera.	
	Di terjemahkan dalam Misi ke (2) Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif Dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi	
	Dilaksanakan dalam Misi ke (3) Mengembangkan sektor Kemaritiman berbasis potensi wilayah	
	Diterjemahkan dalam Misi ke (4) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan	
	Di terjemahkan dalam Misi ke (5) Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	
Berbasis Kearifan Lokal	Dilaksanakan dalam Misi ke (5) Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai selama Periode Tahun 2021 - 2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah 2021 – 2026

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal		
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif, dan Sejahtera	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera
Misi 2 : Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi	Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Agar Mandiri, Produktif dan Berdaya Saing melalui Pemanfaatan Teknologi, Berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan Keunggulan Lokal	1. Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru 2. Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan
Misi 3 : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Serta Penanggulangan Bencana	Percepatan Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana	1. Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak, dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas 2. Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan	Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	1. Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat
Misi 5 : Pengembangan Pariwisata dan Budaya Serta Nilai Keagamaan	1. Peningkatan Pariwisata Daerah 2. Peningkatan Kebudayaan Babasalan serta Moderasi	1. Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah

	Beragama	Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah 2. Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan Serta Moderasi Beragama
Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di Kabupaten Banggai, untuk Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel

2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Banggai, maka di rumuskan strategi, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banggai tahun 2021-2026. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Arah Kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembangunan tahunan (milestone) Kabupaten Banggai periode 2021 - 2026.

2.2.1. Strategi Umum Pembangunan Daerah

Dalam upaya pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021 - 2026, maka di tetapkan strategi umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka responsif dan adaptif, agar mampu memenuhi aspirasi masyarakat. Di harapkan proses

reformasi birokrasi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak sekedar merupakan kesibukan dan kebutuhan Pemerintah semata.

2. Membangun dan mengembangkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia akademik, serta pemangku kepentingan lainnya, agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini di dasari pemikiran bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber daya finansial di satu sisi, sedangkan disisi lain terdapat potensi sumberdaya alam yang harus dikelola bersama secara berkelanjutan.
3. Pemantapan demokrasi, kesetaraan, serta perluasan akses dan kapasitas bagi masyarakat untuk meningkatkan derajat dan perannya dalam pembangunan, melalui implementasi keikutsertaan Kabupaten Banggai dalam inisiatif global keterbukaan pemerintah daerah dalam Open Government Partnership (OGP) Local , agar nantinya masyarakat bisa mejadi potensi pembangunan, bukan menjadi beban.
4. Mengembangkan kemandirian desa agar terjadi penyebaran pusat pusat pertumbuhan, utamanya pusat pertumbuhan kawasan perdesaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan layanan sosial ekonomi masyarakat sehingga pembangunan akan menjadi efektif dan efisien, dan mengurangi biaya masyarakat maupun beban perkotaan.
5. Menjaga prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan utamanya dalam pengelolaan sumber daya alam.
6. Memperkuat upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, memastikan kelompok rentan akan memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan.
7. Mengedepankan pendekatan Tematik – Holistik, Integratif dan Spasial dalam perumusan program pembangunan daerah serta Money Follow Program sehingga terwujud pemerintahan yang berorientasi hasil melalui Performance Based Budgeting

2.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Strategi berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai tahun 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabrl di bawah ini :

Tabel 2.4
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah 2021-2026

VISI
Terwujudnya Kabupaten Banggai Yang Maju, Mandiri,
dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1 : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA			
Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten yang Produktif dan Sejahtera	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar menuju Banggai Cerdas	1. Penuntasan Program pendidikan wajar 9 tahun dan peningkatan wajib belajar 12 tahun. 2. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dan Penanganan Dewasa Tidak Sekolah (DTS). 3. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dan Penanganan Dewasa Tidak Sekolah (DTS). 4. Percepatan Pelaksanaan PAUD Holistik Integratif, Kelas Parenting, Penguatan UKS dan Sanitasi Sekolah, untuk pencegahan stunting. 5. Penerapan Pendidikan budaya dan budi pekerti/karakter di sekolah. 6. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan, serta sebaran yang merata pada semua satuan Pendidikan dasar. 7. Peningkatan

			cakupan pelayanan perpustakaan melalui Gerakan literasi masyarakat.
		Meningkatkan akses dan Kualitas Layanan Kesehatan menuju Banggai sehat.	1. Peningkatan ketersediaan fasilitas dan Mutu layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan layanan Rujukan. 2. Peningkatan capaian SPM Kesehatan melalui Digitalisasi Pelayanan. 3. Penyediaan tenaga kesehatan dengan distribusi yang merata hingga ke wilayah terpencil. 4. Peningkatan sediaan farmasi dan alat Kesehatan serta pembinaan dan pengawasan makanan dan minuman. 5. Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat. 6. Peningkatan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat. 7. Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi.
		Banggai produktif melalui pengembangan Diklat Vokasional dan Kewirausahaan	1. Peningkatan Pelatihan kerja dan Penyelenggaraan Diklat Vokasional. 2. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.

			3. Peningkatan layanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan kesempatan kerja. 4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang baik. 5. Fasilitasi Perkembangan usaha rintisan (Start up Company). 6. Fasilitasi Wirausaha Pemuda, Santri, Wirausaha Sosial dan Komunitas.
		Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu dan lintas sektor, menuju Banggai Sejahtera	1. Validasi Data Penduduk Miskin, rentan miskin serta data penerima bantuan sesuai skema Bansos Adaftif. 2. Sinkronisasi program lintas Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Inovasi "Tumis Ikan Teri" (Tuntaskan Kemiskinan melalui kegiatan Terintegrasi). 3. Penyelenggaraan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan. 4. Meningkatkan Kapasitas PSKS dan Kelembagaan Kesos dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 5. Peningkatan Upaya Pemberdayaan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS.

			6. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana (alam dan sosial) pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
		Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan Keluarga Sejahtera.	1. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi. 2. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan serta Peningkatan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan. 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG). 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan. 5. Peningkatan Kualitas Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 6. Perwujudan Kabupaten Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk Pemenuhan Hak Anak (PHA).

		Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah serta pengembangan olah raga.	1. Peningkatan Kapasitas dan daya saing Kepemudaan agar dapat partisipasi Aktif dalam pembangunan daerah (Sosial, Politik dan Ekonomi), melalui Fasilitasi Ruang Kreasi positif bagi pemuda termasuk membangun wirausaha muda kreatif. 2. Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda (bahaya kekerasan, penyalahgunaan NAFZA, Miras dan HIV/AIDS). 3. Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Karang Taruna dan Pramuka. 4. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan melalui pembinaan dan pengembangan olah raga Pendidikan, olah raga prestasi, olah raga rekreasi dan organisasi olah raga. 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga.
Misi II : Menciptakan Kemandirian Ekonomi Yang Produktif dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi			
Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Agar Mandiri, Produktif, dan Berdaya Saing Melalui Pemanfaatan Teknologi Berbasis Potensi Sumber	Meningkatnya Kualitas Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM Serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	Fasilitas Koperasi Generasi Baru yang Maju, Modern serta UMKM Naik Kelas dan Go Digital	1. Pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis kewirausahaan dengan pendekatan kelompok, komunitas dan kluster sesuai sentra komoditas dan wilayah.

Daya Alam dan Keunggulan Lokal			2. Pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Koperasi dan UMKM secara lintas sektor dan mengedepankan kemitraan. 3. Modernisasi dan penerapan Inovasi Teknologi pada produk dan jasa Koperasi dan UMKM. 4. Iklim Usaha UMKM yang kondusif. 5. Digitalisasi pemasaran UMKM dan koperasi.
		Mempekuat Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Industri dan Perdagangan	1. Peningkatan tertib usaha perdagangan melalui peningkatan jumlah pasar yang tertib, bersih, indah dan nyaman serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. 2. Peningkatan stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 3. Peningkatan nilai ekspor daerah 4. Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah 5. Peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang dan mampu mengakses pasar
	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Pedesaan	Meningkatkan Pembangunan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat dalam Skala Usaha Mikro,	1. Peningkatan pembangunan perdesaan berbasis kawasan dan potensi lokal desa, melalui Kerjasama antar desa. 2. Revitalisasi BUMDes/BUMDes

		Kecil, dan Menengah di Perdesaan melalui BUMDes	Bersama melalui kebijakan satu BUMDes 500 Juta. 3. Peningkatan Investasi produk unggulan perdesaan/ kawasan perdesaan melalui BUMDes. 4. Peningkatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat perdesaan. 5. Pemanfaatan Pekarangan melalui system pertanian terintegrasi di Perdesaan (program satu juta satu pekarangan)
Misi III : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Serta Penanggulangan Bencana			
Percepatan Penyediaan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana.	Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	Meningkatkan kualitas layanan Air Minum dan Perumahan layak di perkotaan dan perdesaan untuk kehidupan masyarakat yang lebih layak dan bermartabat.	1. Penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten. 2. Penyediaan Akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana. 3. Penyediaan akses dan peningkatan system penyediaan air minum yang aman melalui jaringan perpipaan di perkotaan maupun perdesaan. 4. Peningkatan kualitas layanan Air Minum perkotaan melalui PDAM.
		Meningkatkan kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan	1. Penyediaan Infrastruktur persampahan. 2. Peningkatan dan pengembangan sistem

		drainase) permukiman perkotaan dan perdesaan.	jaringan drainase dan sistem air limbah domestik di perkotaan dan perdesaan. 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi dan persampahan melalui prinsip reduce, reuse dan recycle.
		Meningkatkan Jaringan jalan, jembatan, sarana dan prasarana transportasi secara merata dan berkualitas untuk konektivitas wilayah	1. Kerjasama penyediaan infrastruktur dengan pihak swasta melalui mekanisme KPBU. 2. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang berkualitas yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banggai. 3. Peningkatan kinerja pelayanan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, utamanya di wilayah terpencil, pedalaman dan daerah rawan bencana. 4. Penyediaan sistem angkutan umum publik dalam kota dan perdesaan yang terpadu dan nyaman. 5. Penyediaan Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan. 6. Pengembangan infrastruktur dan layanan angkutan laut/pelayaran untuk mendukung konektivitas dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan kepulauan Taliabo.

		Meningkatkan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat khususnya untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangan Kab. Banggai.	1. Peningkatan ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi dalam mendukung produksi dan produktivitas tanaman pangan. 2. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
		Meningkatkan tertib pembangunan bangunan Gedung.	1. Peningkatan layanan IMB dan regulasi bangunan gedung. 2. Penyediaan Fasilitas Pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik.
		Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta ketenagalistrikan sampai ke pelosok desa.	1. Percepatan Implementasi Master Plan pengembangan Teknologi dan Informatika Kabupaten Banggai. 2. Pembangunan Infrastruktur TIK dan system jaringan intra Pemerintah Daerah untuk mendukung transformasi digital. 3. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK). 4. Peningkatan keterbukaan informasi public dan Literasi TIK masyarakat (Digital society).
	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.	Meningkatkan ketahanan bencana daerah melalui koordinasi/ integrasi pemda dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah.	1. Percepatan penyusunan Kajian Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana daerah serta Integrasinya ke dalam perencanaan pembangunan daerah. 2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam

			penanggulangan bencana, melalui penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dan data Bencana terpadu. 3. Penguatan system peringatan dini bencana. 4. Penguatan system logistik pangan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak bencana. 5. Pengembangan Desa Tangguh Bencana/Desa Tangguh lawan covid 19. 6. Penguatan system penanggulangan bahaya kebakaran melalui penyiapan sarana dan prasarana, pencegahan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.
Misi IV : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Yang Berbasis Lingkungan			
Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	Meningkatnya investasi dan pengelolaan potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah.	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan (LCP2B). 2. Penyediaan benih yang memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga). 3. Peningkatan Penyediaan prasarana dan pemanfaatan teknologi pertanian. 4. Penyediaan akses terhadap informasi

			pasar, sumber permodalan, teknologi, sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan.
		Meningkatkan populasi dan produksi peternakan menuju Banggai swasembada daging	1. Peningkatan ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak. 2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak. 3. Meningkatkan ketersediaan dan produksi pakan ternak. 4. Menjamin produk hewani yang ASUH dan berdaya saing. 5. Peningkatan Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan dan pemasarannya dalam rangka memenuhi kebutuhan protein yang berasal dari ikan.	1. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya melalui pemanfaatan teknologi perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. 2. Peningkatan infrastruktur perikanan tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, BBM, sistem rantai dingin, pelabuhan perikanan). 3. Penyediaan Akses nelayan/pembudidaya ikan terhadap permodalan, teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
		Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam,	1. Peningkatan Infrastruktur pangan, diversifikasi dan ketahanan pangan, penanganan

		bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi masyarakat.	kerawanan pangan serta pengawasan keamanan pangan. 2. Implementasi Perda Lahan Pangan Berkelanjutan. 3. Pemanfaatan Lahan pekarangan melalui implementasi Inovasi satu juta satu pekarangan.
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan Petani/Peternak dan Nelayan.	1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian/ perkebunan. 2. Peningkatan peran dan fungsi Kelembagaan Peternak. 3. Peningkatan Pembinaan Kelompok Nelayan dan pembudidaya ikan.
		Pengembangan dan pemanfaatan Potensi pertambangan (Mineral, Minyak dan Gas) untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Pengembangan sistem pola Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas, melalui pembentukan/revitalisasi dan pemberdayaan BUMD. 2. Percepatan pembangunan usaha industri minyak & gas daerah dengan melakukan Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas. 3. Peningkatan Kerjasama Pendidikan antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas untuk meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Banggai yang dapat diserap menjadi tenaga kerja industri minyak & gas. 4. Re-negosiasi antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas untuk

			meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih menguntungkan bagi masyarakat Kabupaten Banggai. 5. Percepatan pembangunan Jaringan Gas (City Gas) melalui Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan industri minyak & gas.
		Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.	1. Peningkatan peluang dan potensi serta promosi investasi/penanaman modal di daerah, berbasis potensi lokal. 2. Peningkatan kualitas pelayanan Penanaman modal. 3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta. 4. Peningkatan kemitraan antara PMA dan PMD dengan UKM Lokal.
	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat.	Meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup.	1. Penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang SDA dan LH. 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 4. Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Keanekaragaman hayati. 5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui pembangunan rendah karbon. 6. Pengelolaan sampah

			perkotaan berbasis masyarakat dengan pendekatan Reduce, Reuse dan Recycle.
		Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang Daerah dan pertanahan.	1. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012 – 2032 dan rencana rincinya. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah. 3. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 4. Pengurangan jumlah sengketa, konflik dan perkara tata ruang dan pertanahan.
Misi V : Pengembangan Pariwisata dan Budaya Serta Nilai Keagamaan			
Peningkatan Pariwisata Daerah	Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	Meningkatkan upaya pengembangan destinasi , industry, promosi dan kelembagaan pariwisata daerah.	1. Pengembangan 4 destinasi pariwisata prioritas. 2. Pengembangan pemasaran pariwisata. 3. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif. 4. Pengembangan kelembagaan pariwisata dan masyarakat sadar wisata.
Peningkatan Kebudayaan Daerah serta Moderasi Beragama	Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	Meningkatkan Pemajuan dan pelestarian Kebudayaan Banggai, Balantak, Saluan dan Andio.	1. Revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal Babasalan. 2. Pengembangan seni dan budaya Babasalan 3. Pemanfaatan kekayaan Budaya Babasalan untuk kesejahteraan rakyat banggai melalui pengembangan Pariwisata Budaya. 4. Pelestarian serta pengelolaan Cagar Budaya dan Museum

		Pengarusutamaan Moderasi Beragama (Wasathiyyah) sebagai karakter beragama masyarakat Kabupaten Banggai.	Daerah. 1. Peningkatan wawasan kebangsaan dan pembinaan idiologi Pancasila di tengah masyarakat. 2. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama. 3. Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.
Misi VI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel			
Peningkatan Kualitas Reformasi di Kabupaten Banggai untuk terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi Kabupaten Banggai.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK.	1. Peningkatan kemudahan perizinan dan investasi serta kemudahan berusaha. 2. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan. 3. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 4. Modernisasi/Digitalisasi system dan manajemen pelayanan publik. 5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Perangkat Daerah pengampu SPM. 6. Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
		Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah.	1. Banggai Inovatif 2. Penguatan Kembali Laboratorium Inovasi Daerah

Tabel 2.5
Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2021-2026

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH				
2022	2023	2024	2025	2026
▪ Pembangunan Manusia	• Peningkatan Kualitas	• Peningkatan Kualitas	• Pemantapan Pembangunan	• Perwujudan Banggai

Kabupaten Banggai melalui percepatan perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera	Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai melalui percepatan perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera	Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai melalui percepatan perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera	Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai melalui percepatan perwujudan Banggai Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera	Sehat, Cerdas, Produktif dan sejahtera
Percepatan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital	Peningkatan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital	Peningkatan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital	Pemantapan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital	Perwujudan transformasi ekonomi kerakyatan (koperasi dan UMKM) menuju ekonomi digital
Pemenuhan infrastruktur dasar yang mendesak di butuhkan masyarakat dan infrastruktur konektivitas pada lokasi prioritas	Pemenuhan infrastruktur dasar yang mendesak di butuhkan masyarakat dan infrastruktur konektivitas pada lokasi prioritas	Penuntasan infrastruktur dasar yang mendesak di butuhkan masyarakat dan infrastruktur konektivitas pada lokasi prioritas	Penuntasan infrastruktur dasar yang mendesak di butuhkan masyarakat dan infrastruktur konektivitas pada lokasi prioritas	Perwujudan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas pada lokasi prioritas
Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan	Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan	Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan	Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan	Peningkatan produksi pertanian, kelautan dan perikanan serta implementasi program satu juta satu pekarangan
Persiapan investasi sektor pertambangan daerah	Percepatan investasi sektor pertambangan daerah	Percepatan investasi sektor pertambangan daerah	Pemantapan investasi sektor pertambangan daerah	Perwujudan investasi sektor pertambangan daerah
Peningkatan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan	Peningkatan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan	Peningkatan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan	Pemantapan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan	Pemantapan Kualitas LH, Revisi RTRW &Peningkatan

Ketahanan Bencana Daerah	Ketahanan Bencana Daerah	n Ketahanan Bencana Daerah	n Ketahanan Bencana Daerah	Ketahanan Bencana Daerah
• Penataan 2 (dua) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama.	• Penataan 2 (dua) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama	• Penataan 4 (empat) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama	• Penataan 4 (empat) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama.	• Penataan 4 (empat) destinasi pariwisata prioritas, Pelestarian budaya daerah dan moderasi beragama.
• Penguatan Reformasi Birokrasi	• Penguatan Reformasi Birokrasi	• Penguatan Reformasi Birokrasi	• Pemantapan Reformasi Birokrasi	• Perwujudan Reformasi Birokrasi Kelas Dunia

Arah kebijakan di atas merupakan target indikatif menuju tercapainya Visi Pembangunan RPJMD Kabupaten Banggai di akhir periode perencanaan tahun 2026. Secara teknokratik, arah kebijakan tahunan ini sinergis dengan tema rencana Pembangunan Tahunan (RKPD) setiap tahun berkenaan. Selain itu, arah kebijakan tahunan ini juga disesuaikan dengan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta Tema Pembangunan Tahunan RKPD Propinsi Sulawesi Tengah. Keselarasan Tema, Fokus dan Arah Kebijakan baik secara vertical maupun horizontal akan menjamin keserasian pembangunan antarlevel maupun antar daerah.

Tematik dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Banggai secara indikatif dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1

Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 - 2026



2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021-2026

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah. BANGGAI LEBIH BAIK akan di wujudkan melalui (delapan) prioritas pembangunan daerah, yaitu :

Gambar 2.2



1. Pembangunan Manusias Berkualitas dan Berdaya Saing

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

a. Banggai Cerdas



Banggai Cerdas di maksudkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas di Kabupaten Banggai, agar tercipta peserta didik dengan dasar kecerdasan dan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan siap mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ruang lingkup Banggai Cerdas selain PAUD, pendidikan dasar, juga mencakup fasilitasi terhadap pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi.

b. Banggai Sehat



Banggai Sehat di maksudkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di semua fasilitas kesehatan yang ada. Fokus Banggai Sehat di arahkan pada pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak, penanggulangan stunting terintegrasi, PHBS, jaminan kesehatan dan kualitas layanan rumah sakit rujukan

c. Banggai Sejahtera



Banggai Sejahtera di maksudkan sebagai upaya pemerintah kabupaten banggai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi multi sektor. Penanggulangan kemiskinan di lakukan melalui inovasi "Tumis Ikan Teri" = tuntaskan kemiskinan melalui kegiatan terintegrasi



d. Banggai Produktif

Banggai Produktif Di Maksudkan Sebagai Upaya Pemerintah Kabupaten

Banggai Untuk Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja, Penyiapan Tenaga Kerja Yang Terintegrasi Dengan Kebutuhan Industri. Serta Penyiapan Wirausaha Mandiri, Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka. Kegiatan Yang Di Lakukan Dalam Bentuk Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan Dan Pembimbingan

e. Banggai Youthpreneur



Banggai Youthpreneur Merupakan Upaya Pemerintah Kabupaten Banggai Untuk Menggali Dan Mengembangkan Potensi Dan Kemandirian Pemuda Untuk Berwirausaha. Kegiatan Ini Di Lakukan Dalam Bentuk Pelatihan, Pembinaan, Pendampingan Maupun Bantuan Modal Usaha.

2. Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi, Keunggulan Lokal dan Pemanfaatan Teknologi

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

a. Banggai Berdaya



Banggai Berdaya di maksudkan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Banggai untuk memperkuat ekonomi produktif/ kerakyatan dengan berbasis UMKM, Koperasi Dan Ekonomi Kreatif. Pemberdayaan/ Penguatan di maksud di lakukan melalui pelatihan, pembinaan, pembimbingan, pendampingan serta pemberian bantuan modal

b. Banggai Desapreneur



Banggai Desapreneur merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk mendorong kemandirian ekonomi perdesaan, melalui penguatan kapasitas pemerintah desa dan revitalisasi peran BUMDesa serta Inovasi Desa. Banggai Desapreneur akan di dukung oleh program satu juta satu pekarangan dan satu BUMDes Rp.500 juta

c. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

Banggai Akses



Banggai Akses merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar yaitu air bersih, rumah layak huni dan sanitasi layak, serta infrastruktur wilayah yaitu jalan, jembatan, infrastruktur perhubungan, telekomunikasi dan ketenagalistrikan (Banggai Terang). Banggai Akses juga diharapkan dapat mengatasi kesenjangan/ketimpangan wilayah.

d. Ketahanan Pangan

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

Banggai Swasembada Pangan



Banggai Swasembada Pangan merupakan upaya pemerintah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pangan yang beragam, bergizi dan seimbang, dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat

e. Investasi Daerah di Sektor Pertambangan

Banggai Investment



Banggai Invesment merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banggai untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di daerah melalui iklim investasi yang kondusif, kemudahan berusaha, serta investasi pengelolaan keunggulan daerah melalui revitalisasi BUMD dan kerjasama usaha dengan perusahaan multinasional/ internasional

f. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Ketahanan Bencana Daerah.

Prioritas daerah ini di arahkan untuk mewujudkan ketahanan/kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Selain itu di maksudkan sebagai kemampuan daerah untuk menangani pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup serta dampak perubahan iklim, melalui pemanfaatan ruang sesuai arahan tata ruang

g. Pariwisata, Kebudayaan Daerah dan Moderasi Beragama

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

Banggai Cultural Heritage



Banggai Cultural Heritage merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banggai untuk menjadikan Banggai sebagai pusat kebudayaan dan sentra promosi budaya, sekaligus sebagai atraksi budaya dalam destinasi pariwisata. Kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif dengan Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan

h. Penguatan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan prioritas daerah ini di rumuskan program unggulan, yakni sebagai berikut :

Banggai Amanah



Banggai Amanah merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui perbaikan pada delapan area perubahan reformasi birokrasi. Banggai Amanah juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan Indikator KInerja Utama (IKU) adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan (jangka menengah lima tahun) dan sasaran strategis (jangka pendek tahunan) organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Banggai 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		4. Angka Kemiskinan
		5. Gini Rasio
2	Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB
3	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM
4	Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah dalam Kondisi Baik
5	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah
6	Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	1. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Pertambangan Terhadap PDRB
		2. Indeks Ketahanan Pangan
7	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
8	Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
9	Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan
10	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	1. Indeks Reformasi Birokrasi
		2. Indeks Inovasi Daerah
		3. Nilai SAKIP

2.5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Banggai ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, sasaran yang hendak dicapai dengan target indikator *output* dan atau *outcome*.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

Adapun wujud dari Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2023 berdasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam rencana strategis pada RPJMD sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,16
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	45,7
		3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,30%
		4. Angka Kemiskinan	6,28%
		5. Gini Rasio	0,292
2	Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	4,2%

3	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	46,39%
4	Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah dalam Kondisi Baik	72,50%/Baik
5	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Rendah
6	Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	3. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan Pertambangan Terhadap PDRB	33,92%
		4. Indeks Ketahanan Pangan	87,17
7	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	81,218
8	Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,56%
9	Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50,16
10	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	4. Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		5. Indeks Inovasi Daerah	Sangat inovatif
		6. Nilai SAKIP	A

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2023 adalah:

- Anggaran Pendapatan Daerah

Rp. 2.256.838.717.233,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Lima Puluh Enam Miliar delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Dua ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).

- Anggaran Belanja Daerah

Rp. 2.486.434.212.791,00 (Dua Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Bupati Banggai Tahun 2023 pada seluruh sasaran strategis.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Interpretasi pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik (SB)
2	Lebih dari 75% - 100%	Baik (B)
3	55% - 75%	Cukup (C)
4	<55%	Kurang (K)

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Kerja Kabupaten Banggai dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas per sasaran di gunakan rumus sebagai berikut :

1. Efisiensi = % Rata-rata capaian kinerja - % Realisasi anggaran
2. Efektivitas = (% Rata-rata capaian kinerja / % Realisasi anggaran) x 100%

Efisiensi dan efektivitas baru dihitung apabila capaian kinerja $\geq 100\%$ Pengukuran terhadap kinerja selain dari capaian kinerja juga dari efisiensi dan efektivitas sumber daya, efisiensi diukur dengan persentase dari selisih rata-rata capaian kinerja dengan % realisasi anggaran, sedangkan efektivitas adalah dengan mengukur jumlah dari capaian kinerja dengan efisiensi anggaran.

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD terdapat 6 (enam) Misi, 7 (Tujuh) Tujuan dan 10 (sepuluh) Sasaran, dengan 17 (tujuh belas) Indikator sasaran. **Misi I** terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 5 indikator kinerja, **Misi II** terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja, **Misi III** terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja, **Misi IV** terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja, **Misi V** terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dan **Misi VI** terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis 1					
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,16	72,19	100,04	Sangat Baik
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	45,7	74,21	162,39	Sangat Baik
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,30%	3,12	64,35	Cukup
4	Angka Kemiskinan	6,28%	6,94	89,49	Baik
5	Gini Rasio	0,292	0,283	103,08	Sangat Baik
Sasaran 2					
Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru					
1	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	4,2%	5,20	123,81	Sangat Baik
Sasaran 3					
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan					
1	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	46,39%	54,98%	118,52	Sangat Baik
Sasaran 4					
Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas					
1	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Dalam Kondisi Baik	72,50%	60,20	83,03	Baik
Sasaran 5					
Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana					
1	Indeks Ketahanan Daerah	Rendah	Rendah	100	Baik
Sasaran 6					
Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah					
1	Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan pertambangan Terhadap PDRB	33,92%	40,6	119,69	Sangat Baik
2	Indeks Ketahanan Pangan	87,17%	85,72	98,34	Baik
Sasaran 7					
Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	81,218	77,75	95,73	Baik
Sasaran 8					
Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah					
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2,56%	0,33	12,89	Kurang
Sasaran 9					
Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama					
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50,16	28,28	56,38	Cukup
Sasaran 10					
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	B	75	Baik
2	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Inovatif	75	Baik
3	Nilai SAKIP	A	B	75	Baik

Tabel 3.3
Rekap Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Indikator Sasaran
1	Misi 1	1	1	5	SB=3 , B=1 , C=1 , K=0
2	Misi 2	1	2	2	SB=2 , B=0 , C=0 , K=0
3	Misi 3	1	2	2	SB=0, B=2 , C=0 , K=0
4	Misi 4	1	2	3	SB=1 , B=2 , C=0 , K=0
5	Misi 5	2	2	2	SB=0 , B=0 , C=1 , K=1
6	Misi 6	1	1	3	SB=0 , B=3 , C=0 , K=0

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel 3.2 terdapat 17 indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 91,34 % dengan kriteria Baik.

3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

Tabel. 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,69	71,08	99,15	72,16	72,19	100,04	73,57	98,12
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	45,3	73,06	161,28	45,7	74,21*	162,39	46,9	158,23
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,34	3,09	67,95	2,30 %	3,12%	64,35	2,18	56,88
4	Angka Kemiskinan	%	6,70	7,33	90,59	6,28 %	6,94%	89,49	5,00	61,12
5	Gini Rasio	Point	0,297	0,315	93,94	0,292	0,283	103,08	0,277	97,83
Rata-rata capaian kinerja					102,60			103,87		94,43

Sumber : BPS Kab.Banggai, Realisasi masih menggunakan hasil tahun 2022)*

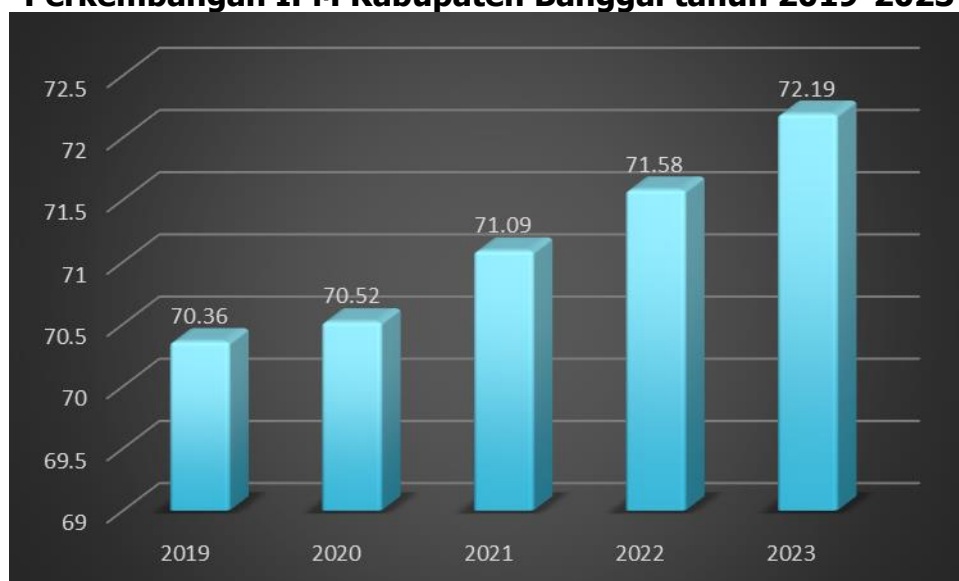
Dari 5 indikator pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera” diperoleh capaian yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercapai 100,04%, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tercapai 162,39%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercapai 64,35%, Angka Kemiskinan tercapai 89,49%, dan Gini Rasio tercapai 103,08%, sehingga rata-rata capaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera” tercapai 103,87% kategori Baik, dan dengan target akhir RPJMD rata-rata tercapai 94,43%.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mencapai target yang ditetapkan di tahun 2023, dimana target tahun 2023 sebesar 72,16 dan terealisasi sebesar 72,19 dengan capaian kinerja sebesar 100,04% atau meningkat sebesar 0,11 point dibandingkan dengan IPM tahun 2022 sebesar 71,08 dengan capaian kinerja sebesar 99,15 persen dengan kategori baik. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026 sebesar 73,57 baru tercapai 97,45 %.

Grafik 3.1
Perkembangan IPM Kabupaten Banggai tahun 2019-2023

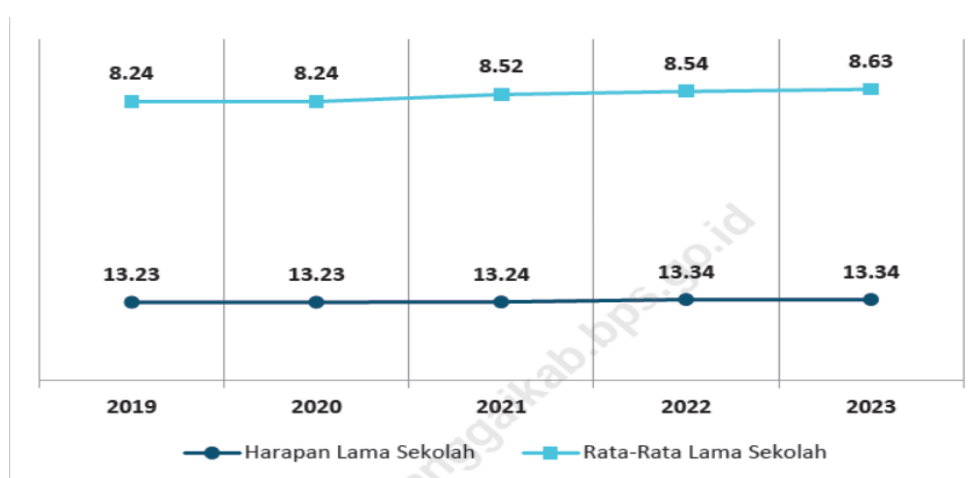


Sumber : BPS Kab.Banggai Tahun 2023

IPM Kabupaten Banggai setiap tahunnya mengalami kemajuan yaitu tahun 2020 tumbuh 0,16 point dari tahun 2019, tahun 2021 tumbuh 0,57 point dari tahun 2020, tahun 2022 tumbuh 0,49 point dari tahun 2021 dan tahun 2023 tumbuh 0,61 point dari tahun 2023.

Peningkatan IPM Kabupaten Banggai pada tahun 2023 didukung oleh peningkatan pada komponen pendidikan/pengetahuan dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dari sisi dimensi pengetahuan berdasarkan grafik 3.2 diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Grafik 3.2
Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten Banggai, 2019-2023



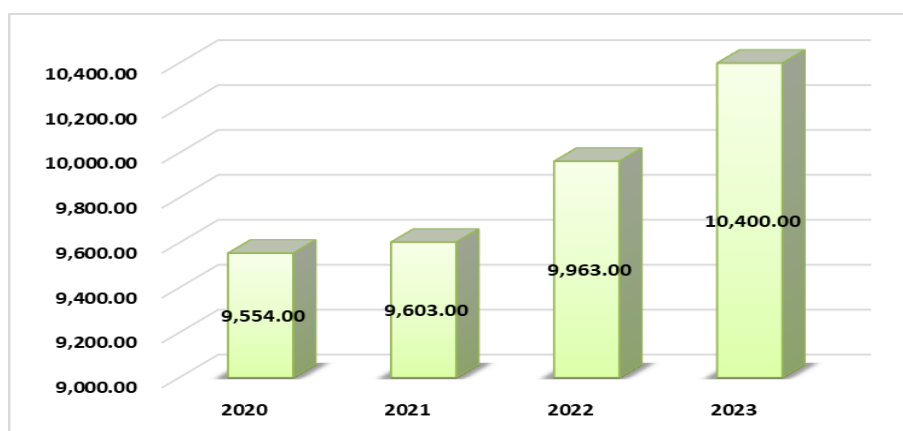
Sumber : BPS Kab.Banggai tahun 2023

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting sebagai salah satu komponen pembentuk indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). RLS Kabupaten Banggai pada tahun 2023 telah mencapai 8,63 tahun, setara dengan sedang mengenyam bangku kelas IX atau kelas 3 SMP. Berdasarkan grafik 3.2 di atas RLS Kabupaten Banggai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, berbeda dengan HLS yang angkanya tetap sama dari tahun 2022 yaitu 13.34 Tahun. Namun jika dilihat dari besarannya, tercatat angka harapan lama sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah. Hal ini menjadi wajar, mengingat bahwa dari tahun ke tahun fasilitas pendidikan terus ditambah dan diperbaharui. Upaya ini dapat meningkatkan partisipasi sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas. Semakin tinggi partisipasi sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas, maka harapan lama sekolah akan semakin panjang. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menunjukkan masa pendidikan yang sudah ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Seperti yang diketahui

bahwa keterjangkauan pendidikan pada masa silam tidak semudah saat ini. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi sekolah pada tahun-tahun tersebut, sehingga rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh penduduk usia 25 tahun masih relatif rendah.

Dari sisi dimensi Standar Hidup Layak berdasarkan grafik 3.3 yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang naik dari Rp. 9.963 (Ribu /Orang/Tahun) di tahun 2022 menjadi Rp. 10.400 (Ribu /Orang/Tahun) di tahun 2023, mengalami kenaikan sebesar Rp. 437.

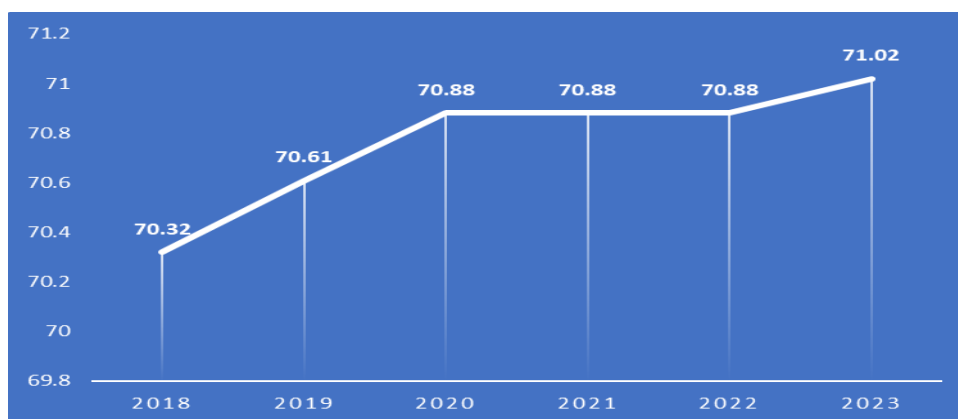
Grafik 3.3
Perkembangan pengeluaran per kapita (Ribu rupiah/orang/tahun)
Kabupaten Banggai



Sumber : BPS Kab.Banggai Tahun 2023

Dari sisi dimensi umur Panjang dan hidup sehat (UHH), terlihat pada grafik 3.4 bayi yang baru lahir pada tahun 2023 memiliki peluang untuk hidup hingga 71,02 tahun.

Grafik 3.4
Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banggai
Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kab.Banggai Tahun 2023

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

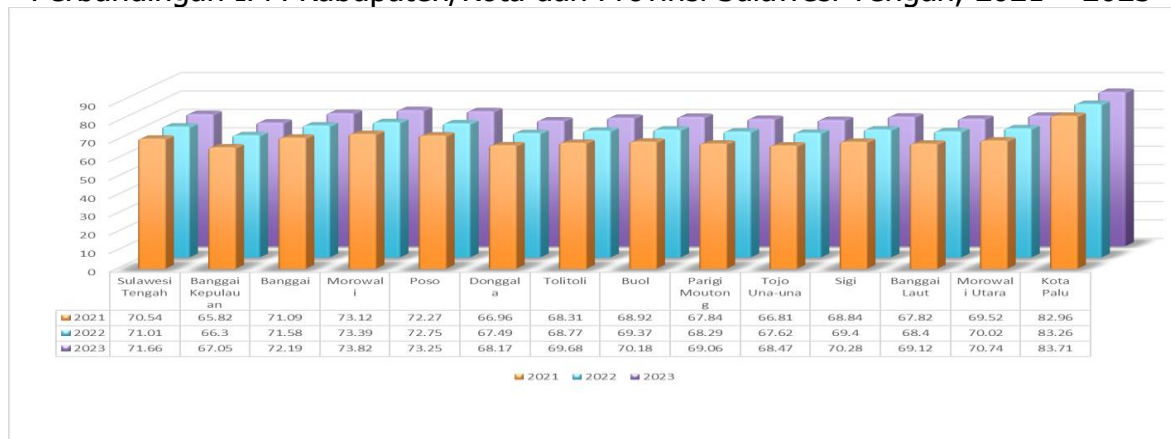
Tabel 3.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai
Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020 – 2023

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70.88	71.95	71.95	72.09
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.24	13.25	13.34	13.34
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.52	8.53	8.54	8.63
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Per Kapita (yang disesuaikan)	Rp. 000	9.554	9.603	9.963	10.400
IPM		70,52	71,09	71,58	72,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Banggai Tahun 2023

Berdasarkan grafik 3.5 IPM Kabupaten Banggai tahun 2023 bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menempati peringkat ke-4 dari Kota Palu dengan IPM sebesar 82,52, Kabupaten Morowali sebesar 73,02, Kabupaten Poso sebesar 72,48. Namun bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,95, IPM Kabupaten Banggai lebih tinggi dari pada IPM Provinsi yaitu sebesar 71,70 atau 0,75 point dari IPM Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2023 Jumlah kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 6, dengan status “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 6, dan tidak ada kabupaten/kota dengan status “rendah” ($\text{IPM} < 60$). Kota Palu satu-satunya yang capaian pembangunan manusianya “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$).

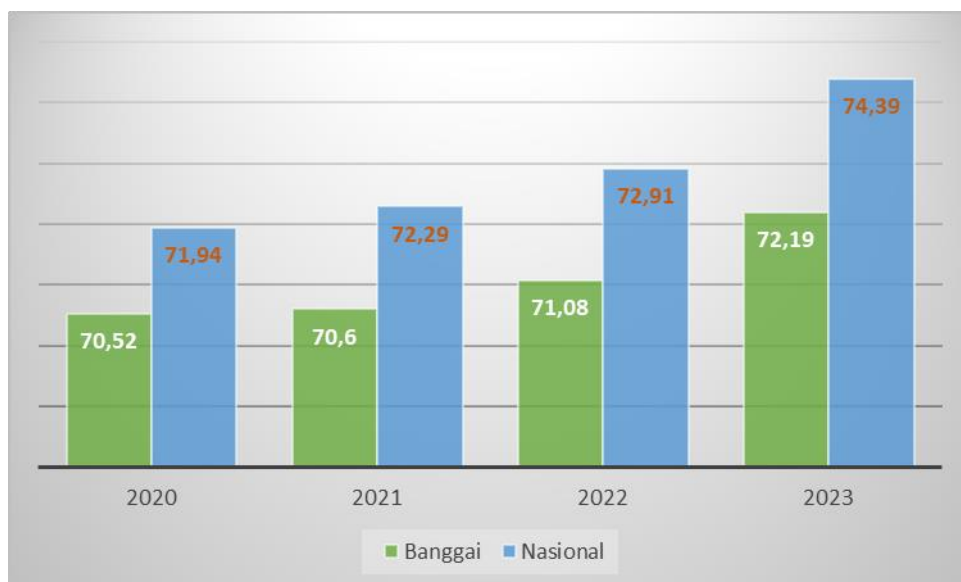
Grafik 3.5
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah, 2021 – 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik (Tahun 2023)

Sedangkan bila dibandingkan dengan IPM Nasional berdasarkan grafik 3.6 terlihat bahwa sepanjang tahun 2020-2023 IPM Kabupaten Banggai lebih rendah dari pada capaian IPM Nasional. Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Banggai lebih rendah 1,42 point dari IPM Nasional sebesar 71,94, di tahun 2021 lebih rendah 1,69 point dari IPM Nasional sebesar 72,29, tahun 2022 lebih rendah 1,83 point dari IPM Nasional sebesar 72,19 dan di tahun 2023 IPM Kabupaten Banggai lebih rendah 2,2 point dari IPM Nasional.

Grafik 3.6
Perbandingan IPM Kabupaten Banggai dengan Nasional, 2020-2023



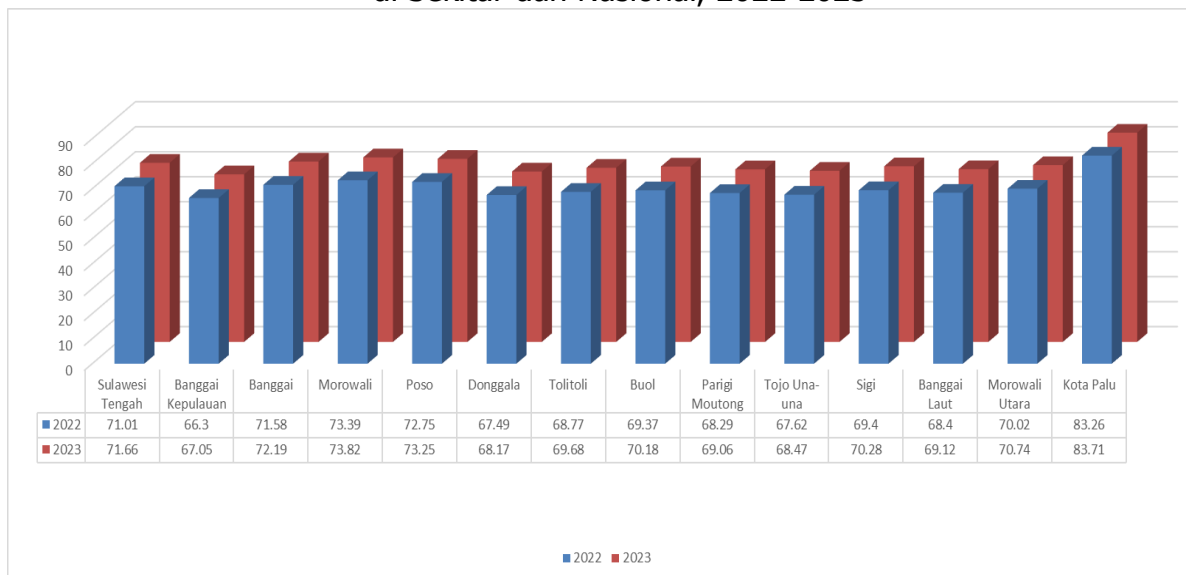
Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

✓ Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama tahun 2022-

hingga 2023 UHH Kabupaten Banggai telah meningkat sebesar 0,61 point. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi Tengah dapat terlihat pada grfaik 3.7 berikut :

Grafik 3.7
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kab.Banggai dengan Provinsi, Kabupaten/Kota di Sekitar dan Nasional, 2022-2023



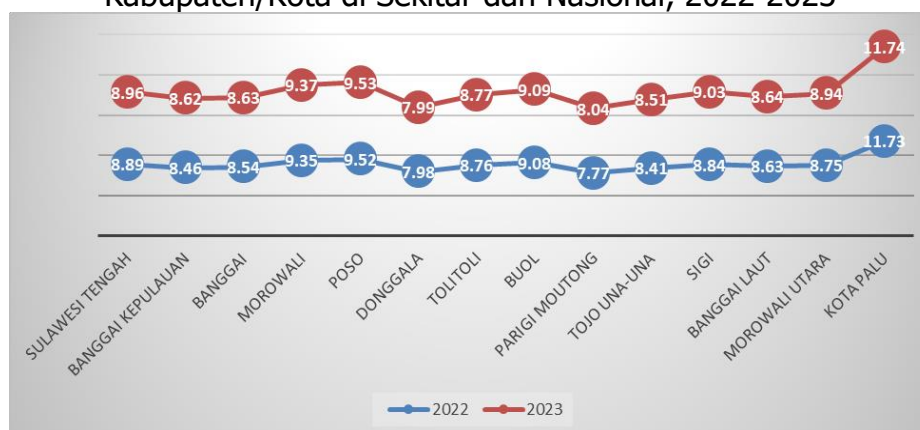
Sumber : Badan Pusat Statistik (tahun 2023)

✓ Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

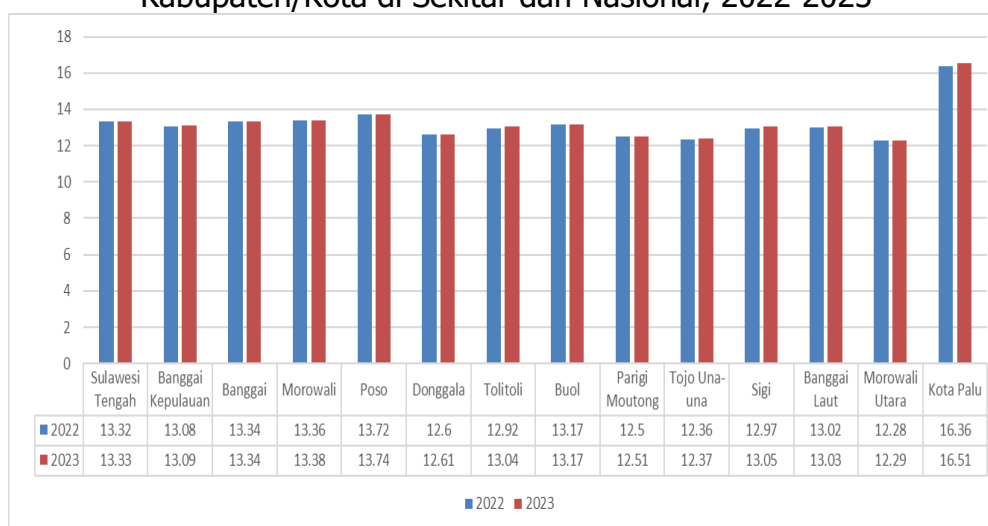
Selama periode 2022 hingga 2023, HLS Kabupaten Banggai tahun 2022 yaitu 13,34 Tahun dan pada Tahun 2023 HLS kabupaten Banggai tidak mengalami kenaikan sama sekali yaitu tetap pada angka 13,34 Tahun. Sementara RLS meningkat 0,09 tahun, dimana pada tahun 2022 RLS Kabupaten Banggai yaitu 8,54 Tahun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 8,63 tahun. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi Tengah dapat terlihat pada grafik 3.8 berikut :

Grafik 3.8
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banggai dengan Provinsi,
Kabupaten/Kota di Sekitar dan Nasional, 2022-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2023

Grafik 3.9
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banggai dengan Provinsi,
Kabupaten/Kota di Sekitar dan Nasional, 2022-2023

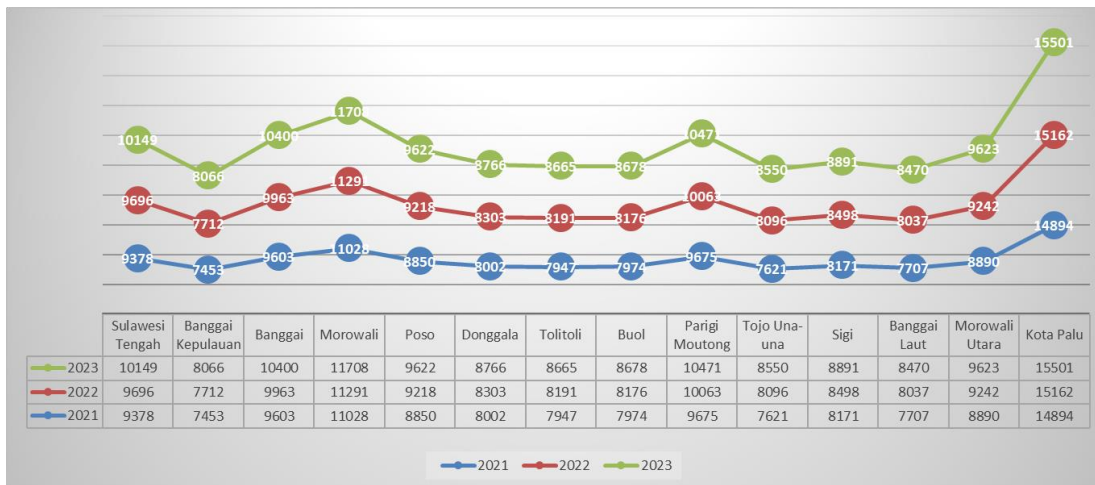


Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

✓ Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Berdasarkan pada grafik 3.3 di tahun 2023, pengeluaran per kapita di Kabupaten Banggai Rp. 10.400 (Ribu /Orang/Tahun). Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 9.963 (Ribu /Orang/Tahun). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengeluaran per Kapita Kabupaten Banggai semakin meningkat. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota, Provinsi di Sulawesi Tengah serta Nasional dapat terlihat pada grraifk 3.10 berikut :

Grafik 3.10
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (ribu rupiah),
Kabupaten Banggai dengan Provinsi, Kabupaten/Kota di Sekitar dan Nasional,
2021-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Faktor Keberhasilan atau meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Banggai dari segi Pendidikan dan Kesehatan diantaranya:

1. Pendidikan

Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah dan tenaga pendidik (guru) yang memadai. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dan Departemen Agama Kabupaten Banggai diketahui ada 706 Taman Kanak – Kanak (TK) dengan 1.303 guru dan 6.046 murid. Untuk Sekolah Dasar (SD/MI) ada 379 Sekolah Dasar (SD/MI) dengan 2.249 guru dan 40.326 murid, untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs) ada 148 sekolah dengan 3.539 guru dan 21.017 murid sedangkan untuk tingkat Sekolah. Lanjutan Tingkat Atas (SMU/SMK/MA) ada 90 sekolah dengan 1.796 guru dan 17.364 murid.

2. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Tujuan tersebut bisa dicapai bila sarana kesehatan telah merata sampai ditingkat kecamatan dan desa, disamping unsur tenaga medis/para medis serta obat obatan telah mencukupi pula. Di kabupaten Banggai, meskipun hanya kecamatan Luwuk yang mempunyai rumah sakit dan rumah sakit bersalin, namun di kecamatan lain telah terdapat puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu

sebagai tempat untuk melayani kesehatan masyarakat. Kabupaten Banggai memiliki 2 rumah sakit. Selain itu, Kabupaten Banggai memiliki 6 poliklinik, 30 Pusekesmas, 96 puskesmas pembantu, dan 23 apotek. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2014, pengelompokan tenaga kesehatan adalah dokter, bidan, perawat, farmasi, dan ahli gizi. Jumlah dokter di Kabupaten Banggai sebanyak 56 orang, perawat 481 orang, bidan 552 orang, farmasi 7 orang, dan ahli gizi 36 orang.

Adapun hambatan yang dihadapi serta Solusi yang dilakukan untuk pencapaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia yaitu:

1. Akses infrastruktur dasar dan tenaga kesehatan yang masih terbatas, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Dimana Langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemda Banggai diantaranya:
 - mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terutama bagi keluarga miskin dan daerah pelosok.
 - Meningkatkan pembiayaan kesehatan melalui APBD untuk menjamin pembiayaan kesehatan rakyat miskin.
 - memperluas pelayanan kesehatan sampai ke pelosok melalui sistem monitoring dan informasi kesehatan untuk menangani secara cepat pada saat terjadi kasus-kasus yang mengancam kesehatan masyarakat.
 - meningkatkan pengendalian penyakit
 - meningkatkan gizi masyarakat dan mengedepankan upaya promotif dan preventif. Dengan menurunkan angka kesakitan serta menghilangkan kasus kekurangan gizi pada balita melalui: pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta sadar gizi.
2. Belum meratanya pelayanan pendidikan, masih terdapat sekolah yang tidak layak, dan pengelolaan pendidikan yang belum optimal.

Dimana Langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemda Banggai diantaranya :

Meningkatkan kualitas mutu pendidikan dengan memberikan pelatihan dan seminar bagi guru-guru tidak hanya yang berada di kota namun juga di pelosok

daerah Kabupaten Banggai, penambahan jumlah guru setiap tahunnya, terwujudnya kesetaraan dalam pendidikan, dan jaminan kepastian mendapatkan layanan Pendidikan, Realisasi anggaran pendidikan yang tepat sasaran, dan penyediaan fasilitas Pendidikan yang terstandarisasi.

3. Masih tingginya angka kemiskinan

Dimana Langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemda Banggai diantaranya: Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam Upaya menurunkan angka kemiskinan. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di perdesaan dengan mengambil langkah terobosan untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi di perdesaan yang dapat memperbaiki dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Mengembangkan usaha pertanian supaya lebih produktif, memberdayakan industri kecil dan mendorong para investor khususnya dari kalangan swasta, untuk turut berperan serta pada proses pembangunan pada daerah-daerah yang kurang berkembang merupakan hal yang perlu dilakukan.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indikator dari Indeks Pemberdayaan gender (IDG) yaitu menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Realisasi indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banggai pada tahun 2023 menggunakan data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022, dikarenakan BPS masih belum merilis data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 sehingga berdasarkan IDG tahun 2022 di peroleh realisasi sebesar 74,21. Dengan nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 74,21 telah melebihi target yang ditetapkan di tahun 2023 yaitu 45,7 dengan capaian kinerja sebesar 162,39 persen dengan kategori baik sekali, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi IDG tahun 2022 sebesar 74,21 lebih tinggi 1,15 point dari

realisasi tahun 2021 sebesar 73,06, dan dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026 sudah melebihi target RPJMD sebesar 46,9 dan tercapai 158,23 persen.

Tabel 3.6

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2023

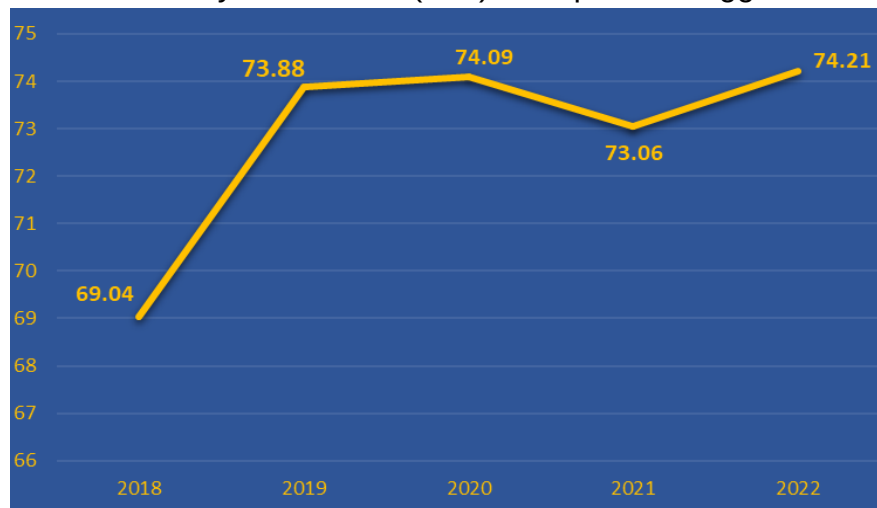
No	Uraian	Tahun 2023	Ket
1	Perempuan di bidang pemerintahan	3.696 Orang	Total ASN 7.438 Orang
2	Perempuan di bidang politik	11 Orang	Total Anggota DPR 35 Orang

Sumber : BPS Kab.Banggai Tahun 2023

Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitive pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung. Sehingga berdasarkan tabel 3.6 Keterwakilan kaum Perempuan dalam kancah perpolitikan di Kabupaten Banggai masih terbilang kecil. Hal ini dapat dilihat dari partisipasinya dalam kursi DPRD Kabupaten Banggai. Dari 35 kursi yang tersedia, tercatat 11 kursi diisi oleh perempuan atau hanya sebesar 31,43 persen. Sedangkan untuk keterlibatan perempuan di bidang pemerintahan di tahun 2023 berjumlah 3.696 orang dari jumlah ASN Kabupaten Banggai 7.438 orang.

Indeks Pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Banggai selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

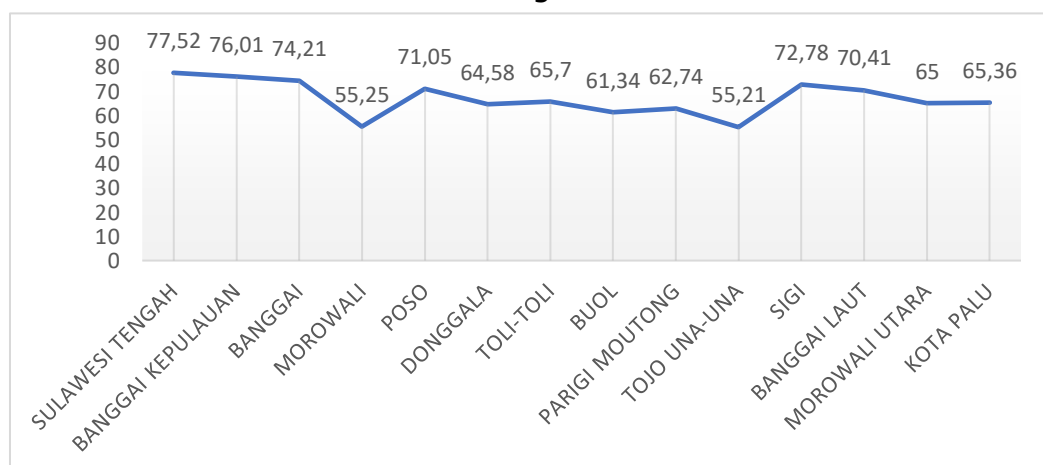
Grafik 3.11
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banggai, 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten Banggai tahun Tahun 2023

Dari grafik 3.11 terlihat bahwa IDG Kabupaten Banggai di tahun 2019 sebesar 73,88 mengalami peningkatan sebesar 4,84 point dari tahun 2018 sebesar 69,04. Untuk tahun 2020 sebesar 74,09 naik sebesar 0,21 point dari tahun 2019 sebesar 73,88. Namun ditahun 2021 realisasi IDG sebesar 73,06 mengalami penurunan sebesar 1,03 point dari tahun 2020 sebesar 74,09. Dan pada tahun 2022 naik 1,15 point dari tahun 2021 menjadi 74,21.

Grafik 3.12
Perbandingan IDG Kabupaten Banggai dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tahun 2022

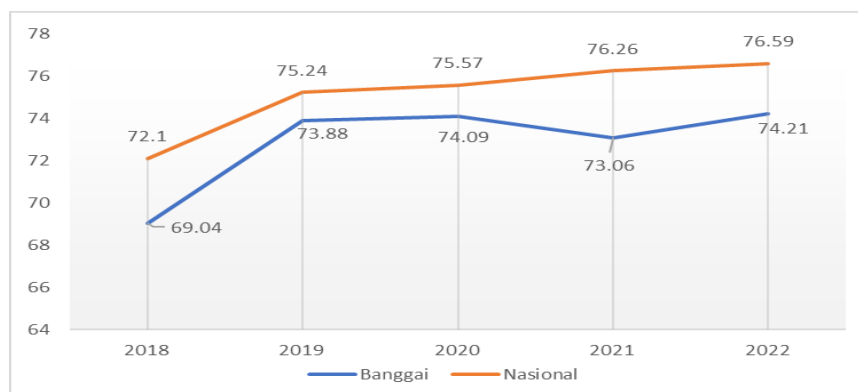


Sumber : BPS Kab.Banggai (tahun 2023)

Berdasarkan grafik 3.12 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banggai bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar Sulawesi Tengah pada tahun 2022 memperoleh IDG tertinggi kedua setelah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dan juga lebih rendah 3,31 point bila dibandingkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 77,52.

Grafik 3.13
Perbandingan IDG Kabupaten Banggai dengan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Banggai (tahun 2023)

Berdasarkan grafik 3.13 bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Banggai selama kurun waktu 5 tahun memperoleh nilai IDG masih dibawah nilai IDG Nasional.

Adapun hambatan/ kendala yang dihadapi untuk pencapaian kinerja yaitu :

1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan, dan pemberdayaan gender di Kabupaten Banggai
2. Angka perkawinan usia muda/remaja masih cukup tinggi.
3. Rendahnya partisipasi Perempuan dalam Angkatan kerja
4. Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan gender.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Upaya peningkatan keterlibatan perempuan dalam Lembaga legislative, maupun upaya pemberdayaan perempuan dengan membangun sinergitas dengan masyarakat.
2. Melakukan sosialisasi terkait pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Dari tabel 3.4, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banggai pada tahun 2023 terealisasi sebesar 3,12% dari target 2,30% dan capaian kinerja sebesar 64,35%, menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka masih tinggi belum mencapai target RPJMD, dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 indikator Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banggai terjadi peningkatan sebesar 0,03 point di tahun 2023, dimana tingkat pengangguran pada tahun 2022 sebesar 3,09% dengan capaian sebesar 67,95%. Hal ini menunjukan pada tahun 2023, terjadi penambahan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan dengan tahun 2022.

Total Penduduk Usia Kerja (PUK) di Banggai sebanyak 281.531 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk angkatan kerja ada 195.564 jiwa yang telah bekerja dan yang belum bekerja berjumlah 6.299 jiwa, sedangkan yang bukan Angkatan kerja berjumlah 79.668 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 85,72 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 57,17 persen. Pada tabel 3.7 dibawah ini menunjukkan jumlah penduduk usia angkatan kerja Tahun 2023 di Kabupaten Banggai, yaitu :

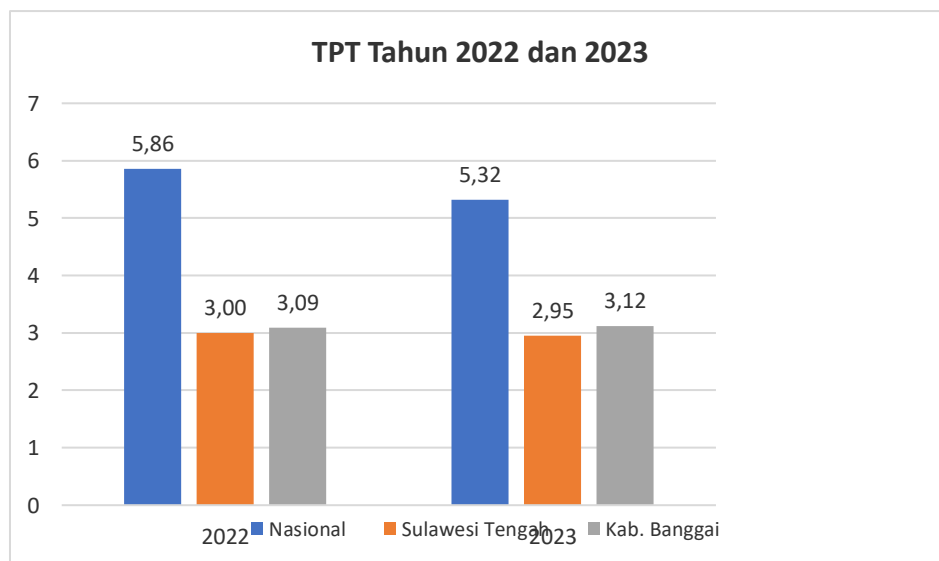
Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Usia Angkatan Kerja Tahun 2023
Kabupaten Banggai

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Tahun 2023
Penduduk Usia Kerja (PUK)	281.531
Angkatan Kerja	201.863
Bekerja	195.564
Pengangguran	6.299
Bukan Angkatan Kerja	79.668
	Persen
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,70
Laki-Laki	85,72
Perempuan	57,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Banggai Tahun 2023

Bila dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banggai dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional sesuai grafik 3.14, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banggai tahun 2023 sebesar 3,12 lebih tinggi 0,17 point dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,95 dan lebih rendah 2,2 point dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional sebesar 5,32.

Grafik 3.14
Perbandingan TPT Kabupaten Banggai dengan
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional, 2022-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, contohnya kriminalitas. Sebaliknya, semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia juga berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang terbuka di daerah. Oleh sebab itu pembangunan SDM di Kabupaten Banggai diarahkan agar benar-benar mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan Daerah. Selain itu, dalam menyongsong pembangunan digital, pemerintah Indonesia memperbaiki kurikulum pendidikan, memperkuat kompetensi

melalui pelatihan vokasi dan program magang, serta pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi di wilayah Indonesia.

Hambatan untuk mencapai indikator ini adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah angkatan kerja belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja.
2. Lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi pencari kerja, utamanya di industri gas dan ikutannya.
3. Tumbuhnya usaha rintisan (*Start up Company*) kurang di fasilitasi.
4. Kurangnya Diklat Vokasi untuk penyiapan tenaga kerja dan calon wirausaha baru.
5. Kurangnya Tenaga Kerja Lokal yang terlibat/terakomodir dalam industri pertambangan.

Solusi/strategi yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan kompetensi angkatan kerja sesuai dengan dunia kerja melalui proses pemagangan dalam negeri.
2. Melakukan pembinaan secara berkala kepada organisasi serikat pekerja/serikat buruh, pekerja dan pengusaha.
3. Memberikan pendidikan dan pelatihan-pelatihan peningkatan keterampilan bagi angkatan kerja.
4. Peningkatan kapasitas instruktur melalui sertifikasi/uji kompetensi instruktur.
5. Membuka akses kesempatan kerja ke luar negeri melalui program pemagangan kerja luar negeri sektor formal.
6. Pelaksanaan *Job Fair* bagi pencari kerja.

4. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin terhadap total seluruh penduduk di suatu wilayah tertentu. Penghitungan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah didapatkan dari penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pada tabel 3.4 terlihat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Banggai tahun 2023 sebesar 6,94%, dari target sebesar 6,28% dengan capaian kinerja sebesar 89,49%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diperoleh capaian sebesar 61,12%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2022 indikator angka kemiskinan terjadi penurunan sebesar 0,39 point pada tahun 2023 dimana capaian kinerja

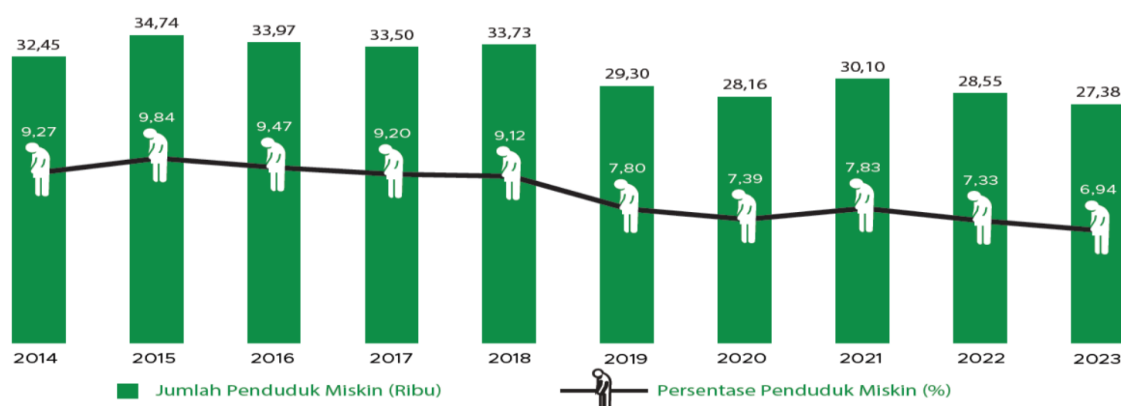
indikator angka kemiskinan tahun 2022 menunjukkan realisasi kinerja yaitu sebesar 7,33% dengan capaian kinerja sebesar 90,59% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD, yaitu sebesar 6,70%.

Tabel 3.8
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Banggai, 2014-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	Persentase Penduduk Miskin
2017	352.840	33.500	9,20
2018	373.695	33.730	9,12
2019	395.700	29.297	7,80
2020	417.863	28.160	7,39
2021	431.639	30.100	7,83
2022	457.335	28.550	7,33
2023	488.788	27.380	6.94

Sumber : BPS Kabupaten Banggai (2023)

Grafik 3.15
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Tahun 2014–Maret 2023



Sumber : BPS Kabupaten Banggai (2023)

Secara umum, pada periode Maret 2014 sampai dengan Maret 2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Banggai mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Akan tetapi, pada tahun 2015 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan. Tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2020. Pada Maret 2021, akibat adanya pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan kembali meningkat. Selanjutnya, pada tahun 2022 dan tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banggai kembali mengalami penurunan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banggai pada Maret 2023 mencapai 27,38 ribu orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 1,17 ribu orang dibandingkan Maret 2022, yang sebesar 28,55 ribu orang. Sementara itu, jika

dibandingkan keadaan Maret 2021 jumlah penduduk miskin tersebut menurun pula sebanyak 2,72 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 6,94 persen, menurun sebesar 0,39 persen poin terhadap Maret 2022, dan menurun sebesar 0,89 persen poin terhadap Maret 2021.

Tabel 3.9
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Banggai Kepulauan	15,50	12,90
Banggai	27,38	6,94
Morowali	15,57	12,31
Poso	41,48	15,16
Donggala	50,37	16,25
Toli-Toli	31,13	12,85
Buol	23,13	13,36
Parigi Moutong	77,18	14,91
Tojo Una-Una	26,15	16,74
Sigi	31,47	12,83
Banggai Laut	11,27	14,15
Morowali utara	17,66	12,85
Kota palu	26,83	6,56
Sulawesi Tengah	395,66	12,41

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banggai sebanyak 27,38 ribu orang. Angka ini merupakan yang tertinggi keenam di bawah Parigi Moutong, Donggala, Poso, Sigi, dan Toli-Toli. Pada Tabel 2, terlihat pula bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Banggai sebesar 6,94 persen. Dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Tengah, angka ini merupakan yang terendah kedua setelah Kota Palu. Hanya Kabupaten Banggai dan Kota Palu yang memiliki persentase penduduk miskin dibawah 10 persen.

Tabel 3.10
Tabel Estimasi Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023

No	Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan ekstrem (Ribu Jiwa)			Estimasi Tingkat kemiskinan Ekstrem (%)		
		2021*	2022*	2023*	2021	2022	2023
1	Provinsi Sulawesi Tengah	97,91	95,02	45,76	3,15	3,02	1,44
2	Banggai Kepulauan	1,79	1,60	2,25	1,50	1,34	1,87
3	Banggai	6,96	5,61	0,00	1,81	1,44	0,00
4	Morowali	3,55	4,08	0,93	2,86	3,24	0,73
5	Poso	11,01	9,03	4,93	4,17	3,36	1,80
6	Donggala	11,05	11,07	6,02	3,61	3,59	1,94

7	Toli-Toli	3,00	3,64	2,77	1,26	1,51	1,14
8	Buol	4,49	2,11	0,89	2,69	1,24	0,52
9	Parigi moutong	29,94	32,57	12,47	5,96	6,39	2,41
10	Tojo Una-Una	8,22	5,37	2,08	5,27	3,42	1,31
11	Sigi	4,40	6,19	5,08	1,82	2,54	2,07
12	Banggai Laut	4,16	3,08	1,33	5,40	3,93	1,67
13	Morowali Utara	5,74	4,10	4,64	4,34	3,04	3,38
14	Kota Palu	3,61	6,57	2,38	0,90	1,63	0,58

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Banggai berhasil turunkan Tingkat kemiskinan ekstrem nol persen sesuai dengan instruksi presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan mencapai 0,00% pada tahun 2023 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil perhitungan, Kabupaten Banggai sebagai satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai kemiskinan ekstrem yang telah mencapai nol pada tahun 2023. Berbagai program unggulan Pemerintah daerah Kabupaten Banggai yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan, salah satu program Pemerintah Kabupaten Banggai yang memberikan dampak positif dan signifikan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yaitu **"Satu Juta Satu Pekarangan"**, Begitu pula dengan bantuan bantuan sosial bagi rakyat miskin, yang selama ini telah dilaksanakan. Termasuk program kelurahan dana desa saat ini cukup besar.

Upaya/strategi penanggulangan kemiskinan di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai melalui program penanggulangan kemiskinan dengan inovasi **"Tuntaskan Kemiskinan Melalui Kegiatan Terintegrasi (Tumis Ikan Teri)"** meliputi :

1. Strategi pengurangan beban pengeluaran
 - Pengelolaan jaminan Kesehatan masyarakat
 - Bantuan beasiswa bagi siswa kurang mampu
 - Bantuan langsung tunai (BLT) dana desa
 - Bantuan cadangan pemerintah
2. Strategi peningkatan pendapatan
 - Bantuan pelatihan usaha mikro
 - BUMDES 500 jt/desa
 - Program Satu Juta Satu Pekarangan
 - Read-Si/IPDMIP

3. Strategi pengurangan kantong-kantong kemiskinan

- Pembangunan/rehabilitasi rumah layak huni
- Pembenahan infrastruktur
- Penyediaan air minum dan sanitasi
- Bantuan sosial

Karakteristik kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banggai adalah :

1. Pendidikan Rendah

- Pendidikan kepala rumah tangga umumnya hanya tidak tamat SD/ sederajat, tidak bersekolah maupun hanya tamatan SD/ sederajat.
- Terdapat kepala rumah tangga perempuan

2. Minim akses pekerjaan layak

- Bekerja sebagai petani, nelayan dan pekerja lepas

3. Kepemilikan rumah

- Terdapat rumah tangga yang masih menumpang
- Spesifikasi rumah (jenis atap, jenis dinding, dan jenis lantai) yang belum layak

4. Akses air minum/sanitasi

- Terdapat rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang tidak layak

5. Akses listrik

- Terdapat rumah tangga sumber penerangan umum tidak ada listrik atau listrik Bersama/cantolan

5. Gini Rasio

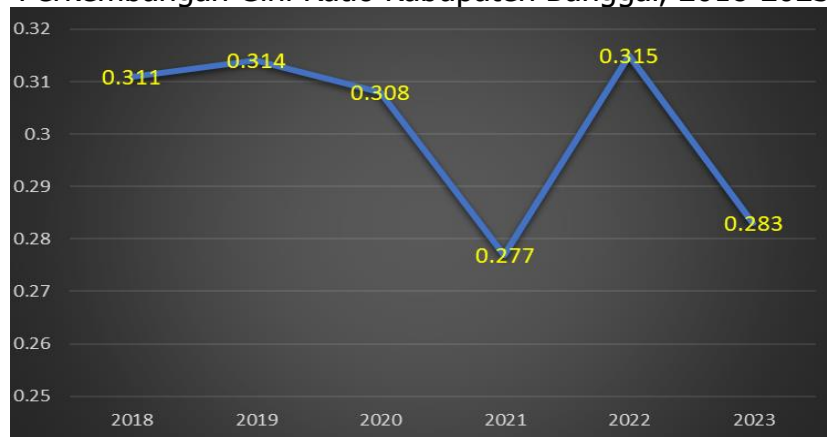
Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan tidak merata sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Berdasarkan Tabel 3.4 gini ratio Kabupaten Banggai tahun 2023 sebesar 0,283 dengan target sebesar 0,297, sehingga memperoleh capaian sebesar 103,08%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 gini ratio Kabupaten Banggai sebesar 0,297, terjadi penurunan angka gini ratio sebesar 0,032 point pada tahun 2023. Gini Ratio pada

tahun 2023 mengalami penurunan sehingga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten sudah mulai teratasi, hal tersebut seiring dengan angka penduduk miskin di Kabupaten Banggai yang mengalami penurunan pada tahun 2023.

Terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah akibat kecemburuan masyarakat terutama yang berasal dari daerah dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Kesenjangan pendapatan antar wilayah dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah perbedaan kandungan sumberdaya alam; perbedaan kondisi geografis; kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa; konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah; serta alokasi dana pembangunan antar wilayah.

Grafik 3.16
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Banggai, 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2023

Gini rasio Kabupaten Banggai jika dibandingkan dengan Gini rasio Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Banggai dengan Gini Rasio Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi Tengah, 2020-2023

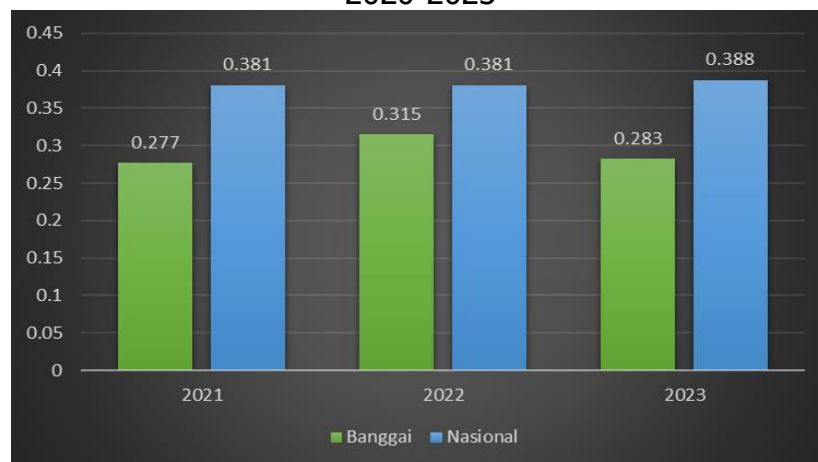
Kabupaten Kota	Gini Rasio menurut Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Sulawesi Tengah	0,316	0,308	0,304
Banggai Kepulauan	0,279	0,280	0,272
Banggai	0,277	0,315	0,283
Morowali	0,297	0,285	0,281
Poso	0,270	0,256	0,265
Donggala	0,261	0,280	0,237
Tolitoli	0,349	0,295	0,345

Buol	0,321	0,266	0,258
Parigi Moutong	0,287	0,279	0,298
Tojo Una-una	0,247	0,250	0,262
Sigi	0,291	0,265	0,281
Banggai laut	0,251	0,247	0,244
Morowali Utara	0,301	0,269	0,284
Kota Palu	0,308	0,355	0,324

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Gini rasio Kabupaten Banggai jika dibandingkan dengan Gini rasio Nasional sebagai berikut :

Grafik 3.17
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Banggai dengan Gini Rasio Nasional, 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2022, dan jika di Bandingkan dengan ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Banggai yang diukur menggunakan Gini Ratio, lebih rendah 0,105 di Bandingkan dengan gini ratio nasional.

Adapun langkah-langkah untuk pencapaian ditahun mendatang antara lain :

1. Memperbaiki layanan Kesehatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana Kesehatan
2. Menyediakan lapangan pekerjaan yang merata
3. Memperbaiki akses transportasi pada wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Banggai guna meningkatkan pendapatan perkapita penduduk secara merata.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera”, yaitu :

Tabel 3.12
Program, Anggaran dan Realisasi
Yang Mendukung Sasaran Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten
Banggai yang Produktif dan Sejahtera

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
Pengelolaan Pendidikan	192.751.836.198,00	126.138.600.394,00	65,44
Pengembangan Kurikulum	466.864.874,00	266.108.500,00	57,00
Pengendalian Perizinan Pendidikan	319.638.230,00	77.998.730,00	24,40
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	362.131.300,00	239.674.400,00	66,18
Pengembangan Bahasa Dan Sastra	240.833.250,00	33.685.250,00	13,99
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	154.420.153.362,00	148.147.600.097,00	93,94
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	301.711.000,00	252.467.000,00	83,68
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	391.961.000,00	225.933.000,00	57,64
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	639.027.000,00	607.634.048,00	95,09
Pemberdayaan Sosial	2.889.271.650,00	2.618.023.403,00	90,61
Rehabilitasi Sosial	1.532.756.200,00	1.520.353.200,00	99,19
Perlindungan Dan Jaminan Sosial	11.562.985.930,00	11.225.349.949,00	97,08
Penanganan Bencana	623.592.200,00	489.859.530,00	78,55
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	433.987.200,00	411.842.556,00	94,89
Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	144.172.400,00	100.202.400,00	69,50
Penempatan Tenaga Kerja	91.461.100,00	74.917.280,00	81,91
Hubungan Industrial	2.941.607.076,00	2.634.812.039,00	89,57
Pengarus utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	65.000.000,00	64.880.000,00	99,82
Pemenuhan Hak Anak (PHA)	24.000.000,00	21.054.000,00	87,73
Pengendalian Penduduk	454.600.000,00	433.973.500,00	95,46
Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.173.902.000,00	3.812.356.400,00	91,34
Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.591.297.700,00	2.548.272.700,00	98,34
Jumlah	358.242.290.635,00	283.575.575.129,00	79,16

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP2KBP3A, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pembangunan manusia kabupaten banggai yang produktif dan sejahtera diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 103,87% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 283.575.575.129,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 358.242.290.635,00 atau sebesar 79,16%. Dari kondisi ini tampak bahwa

tingkat efektifitas yang dicapai sebesar 131,22%, dan tingkat efisiensi sebesar 24,71%.

Tabel. 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM
serta Pertumbuhan Wirausaha Baru

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1 Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	%	3,7	4,37	118,11	4,2	5,20	123,81	5,7	91.21
Rata-rata capaian kinerja				118,11			123,81		91.21

Sumber : BPS Kabupaten Banggai

Dari tabel 3.13 target RPJMD dari Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB di Kabupaten Banggai pada tahun 2023 sebesar 4,2% dan terealisasi sebesar 5,20%, sehingga dapat dikatakan Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB melebihi target RPJMD tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 123,81%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diperoleh capaian sebesar 91,21%

Realisasi Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM tahun 2023 merupakan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai yang dihitung berdasarkan komponen Perdagangan Besar dan Eceran, dimana yang termasuk dalam perdagangan besar yaitu kegiatan ekspor dan yang termasuk dalam perdagangan eceran yaitu pada koperasi, UMKM dan IKM.

Perdagangan besar di Kabupaten Banggai dilakukan melalui transaksi ekspor dan impor, Komoditas andalan ekspor Kabupaten Banggai yang diperdagangkan terutama berasal dari sebagian besar potensi sumber daya alam dan hasil industri domestik, yang di dominasi oleh amonia dan natural gas. Adapun negara tujuan ekspor meliputi benua Asia, Amerika, dan Eropa. Kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya, diantaranya tepung dan minyak kelapa, serta gurita beku. Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (nonresiden).

Adapun Laporan Ekspor tahun 2023 berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Banggai, sebanyak US\$ 710.940.853,80 atau jika di rupiahkan sebesar Rp. 10.920.051.514.368,00. Yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Daftar Eksportir SKA
Kabupaten Banggai Tahun 2023

No	Nama Perusahaan	Alamat	Jenis Komoditi	Jumlah			SKA	Negara Tujuan
				(Berat)	(USD)	(RP)		
1	Pt. Panca Amara Utama	Desa Uso Kec. Batui	Amonia	479781,06 TNE	189.881.808, 64	Rp. 2.916.584.580.710,40	61	Korea, Jepang, China, Singapura, Philipina
2	Pt. Donggi Senoro Lng	Desa Uso Kec. Batui	Natural Gas	735412,1 TNE	515.190.646,70	Rp. 7.913.328.333.312,00	13	Korea
3	Pt. Sasland Sons Indonesia	Desa kayutanyo Kec. Luwuk Timur	Tepung dan Minyak Kelapa	1959415,3 KGM	3.451.338,43	Rp. 53.012.558.284,80	86	Amerika, Kanada, Turki, Belgia, Kenya, Rusia, Australias, Arab, Spanyol, Jerman, India
4	Pt. Banggai Indo Gemilang	Kel. Kilongan Kec. Luwuk Utara	Gurita Beku	21, 818.19 KGM	114.516,00	Rp. 1.758.965.760,00	1	Amerika
5	Cv. Indotrpic Fishery	Jl. Raya Biak Km. 8 Kec. Luwuk Utara	Gurita Beku	372203.02 KGM	2.302.544,03	Rp. 35.367.076.300,80	22	Amerika, Vietnam, Hongkong, Australia
Jumlah					Rp. 710.940.853,80	Rp. 10.920.051.514.368,00	183	

Sumber : Disdagrin Kab.Banggai, (data diolah)

Sedangkan untuk laporan Ekspor berdasarkan BPS Kabupaten Banggai selama tahun 2023 dapat dilihat pada link berikut :

https://drive.google.com/file/d/1KRS2ZJl_YqY_2Z3afiJEok6pYDQ0Oye5/view?usp=sharing

Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Berikut Jumlah Usaha Kecil menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai tahun 2023 sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai:

Tabel 3.15
Jumlah Usaha Kecil Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan Subdistrict	Industri Makanan/ Minuman	Industri Pengolahan	Industri Kayu	Industri Pakaian Jadi	Industri Furniture	Industri Jasa Reparasi
Toili		4				
Toili Barat						
Moilong		4				
Batui	1	1				1
Batui Selatan		6			1	1
Bunta						
Nuhon		1				
Simpang Raya		1				
Kintom		1				
Luwuk	1	7				
Luwuk Timur		3				
Luwuk Utara		1		1	2	
Luwuk Selatan		3			1	
Nambo		1			1	
Pagimana		3			1	
Bualemo						
Lobu	2	3			1	
Lamala						1
Masama					2	
Mantoh	1	1				
Balantak	2	2				
Balantak Selatan						
Balantak Utara		3			1	
Banggai	7	47	0	1	10	3

Sumber: BPS Kab. Banggai Tahun 2023

Tabel 3.16
Jumlah Usaha Kecil di Kabupaten Banggai Berdasarkan Jenis Industri
Tahun 2023

No	Jenis Industri	Jumlah Industri
1	Industri Jasa Reparasi	3
2	Industri Furniture	10
3	Industri Pakaian Jadi	1
4	Industri Kayu	0
5	Industri Pengolahan	47
6	Industri Makanan/Minuman	7

Sumber: BPS Kab. Banggai Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.15 dan 3.16 di atas, jumlah Usaha kecil di Kabupaten Banggai terbanyak di Kecamatan Batui dan Kecamatan Luwuk, dan masih ada beberapa kecamatan yang belum memiliki usaha kecil atau mungkin belum terdaftar, diantaranya kecamatan Toili barat, Bunta, Balemo dan Balantak Selatan. Sedangkan berdasarkan jenisnya, industry terbanyak di kabupaten Banggai di dominasi oleh industry pengolahan. Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*). Industri pengolahan tercatat mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Banggai.

Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Untuk data pelaku usaha mikro di Kabupaten Banggai sesuai dengan data dari Dinas koperasi dan UKM pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.17
Data Pelaku Usaha Mikro Kabupaten Banggai Tahun 2023

No	Kecamatan	Sektor Usaha			Jumlah
		Perdagangan	Home Industri	Jasa	
1.	Luwuk	978	98	194	1270
2.	Luwuk Selatan	658	39	86	783
3.	Luwuk Utara	503	86	66	655
4.	Luwuk Timur	176	63	20	259
5.	Nambo	138	97	33	268
6.	Kintom	289	86	46	421
7.	Batui	361	68	86	515
8.	Batui Selatan	319	113	53	485
9.	Moilong	478	161	107	746
10.	Toili	825	275	241	1341
11.	Toili Barat	534	79	111	724
12.	Pagimana	440	380	58	878
13.	Lobu	35	18	7	60
14.	Bunta	97	87	42	226
15.	Nuhon	56	43	27	126
16.	Simpang Raya	127	60	28	215

17.	Masama	103	26	23	152
18.	Lamala	142	71	36	249
19.	Mantoh	129	13	18	160
20.	Balantak Selatan	66	24	16	106
21.	Balantak	151	74	35	260
22.	Balantak Utara	66	14	18	98
23.	Bualemo	281	48	40	369
	Jumlah	6.952	2.023	1.391	10.366

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaku UKM terbanyak berada di Kecamatan Toili dengan jumlah 1.341 Usaha, selanjutnya Kecamatan Luwuk berjumlah 1.270 usaha, dan paling sedikit berada di Kecamatan Lobu dengan jumlah 60 Usaha. Usaha mikro di Kabupaten Banggai paling banyak dibidang perdagangan berjumlah 6.952 usaha, selanjutnya bidang industry berjumlah 2.023 usaha, dan terakhir bidang jasa berjumlah 1.391 usaha.

Adapun hambatan dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Banggai antara lain yaitu:

1. Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan. ketidaktahuan tentang cara-cara mengakses sumber-sumber keuangan terutama KUR yang di salurkan perbankan
2. Proses produksi yang sederhana, manual dan tidak memenuhi standar berdampak kepada mutu yang rendah.
3. Kurangnya perhatian kepada nilai yang mampu memberikan rasa puas bagi pelanggan. Misalnya cita rasa, ukuran yang tidak biasa, warna yang tidak menarik, tidak memiliki merek, dan sebagainya.
4. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha.

Solusi: Kemampuan manajerial para pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Begitu pula sistem kaderisasi perlu dibangun. Sering kali dijumpai UMKM hanya one man show, sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendirinya.

5. Kemampuan pelaku UMKM dalam pemasaran masih terbatas. Meskipun media online telah berkembang, namun media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM, sehingga produk tidak dikenal di pasar.
6. Akses informasi usaha rendah, dimana Belum terjalin kemitraan yang baik yang saling menguntungkan antarpelaku UMKM, usaha besar, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemitraan perlu dijalin agar mampu membuat sistem yang saling mendukung

Selain dari sektor UKM dan IKM, sektor koperasi juga memiliki kontribusi terhadap PDRB Kabupaten, Banggai. Koperasi merupakan suatu organisasi bisnis yang dioperasikan serta dimiliki oleh orang/seorang untuk kepentingan bersama. Koperasi berlandaskan sebuah kegiatan dengan berdasarkan prinsip gerak ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berikut jumlah koperasi aktif menurut kecamatan berdasarkan data dari BPS Kabupaten Banggai tahun 2023:

Tabel 3.18
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai,
Tahun 2020–2023

Kecamatan <i>District</i>	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Toili	13	15	19	19
Toili Barat	12	12	12	13
Moiling	2	2	2	2
Batui	5	5	6	7
Batui Selatan	7	7	7	9
Bunta	4	4	4	5
Nuhon	0	1	1	1
Simpang Raya	7	7	7	7
Kintom	3	3	3	3
Luwuk	30	30	30	30
Luwuk Timur	3	3	3	3
Luwuk Selatan	13	14	15	20
Luwuk Utara	3	4	5	5
Nambo	2	2	2	2
Pagimana	5	7	7	7
Bualemo	5	6	6	6
Lobu	0	0	0	0
Lamala	3	3	3	5
Masama	3	3	4	5
Mantoh	2	2	2	2
Balantak	1	1	1	1
Balantak Selatan	1	1	1	1
Balantak Utara	1	1	1	2
Banggai	125	133	141	155

Sumber : BPS Kabupaten Banggai (tahun 2023)

Jumlah Koperasi di Kabupaten Banggai dari tahun ketahun semakin naik. Dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 125 unit koperasi, tahun 2021 sebanyak 133 unit koperasi, dan tahun 2022 sebanyak 141 unit koperasi dan di tahun 2023 terus bertambah menjadi 155 unit koperasi. Namun demikian terdapat 1 kecamatan yang tidak terdapat koperasi yaitu kecamatan Lobu. Berikut data lengkap Koperasi yang ada di Kabupaten Banggai terkait Nama, Jenis, Alamat, Badan Hukum, Jumlah anggota, jumlah asset, dan sebagainya, yang dapat dilihat pada link berikut:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1epzZNli5DvC1vZ6mEOYFxl9IkJOy5MuG/edit?usp=sharing&ouid=112777434148559539476&rtpof=true&sd=true>

Adapun hambatan dalam pengembangan Koperasi di Kabupaten Banggai antara lain yaitu:

1. Kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi
2. Minimnya koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam pengembangan koperasi dan usaha mikro karena masih adanya ego sektoral.
3. Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
4. Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro masih belum efektif dan efisien.
5. Masih banyaknya manajemen Koperasi dan Usaha Mikro yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru”, yaitu:

Tabel. 3.19
Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2023
Yang Mendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Perdagangan, Industri Rumah
Tangga, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	86.305.000,00	83.996.000,00	97,32
2	Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	77.668.900,00	77.518.180,00	99,80
3	Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	54.176.500,00	53.851.800,00	99,40
4	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	266.087.100,00	260.291.320,00	97,82
5	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperas	191.960.600,00	181.537.420,00	94,57
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	427.487.343,00	412.621.998,00	96,52
7	Pengembangan UMKM	322.562.650,00	315.444.908,00	97,79
8	Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	132.129.355,00	107.599.330,00	81,43
9	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	83.039.580,00	74.073.060,00	89,20
10	Stabilisasi Harga Barang	2.404.169.645,00	1.628.617.745,00	67,74

	Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			
11	Pengembangan Ekspor	165.818.535,00	150.389.060,00	90,69
12	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	241.259.750,00	188.942.940,00	78,31
13	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	712.898.990,00	567.401.274,00	79,59
15	Pengendalian Izin Usaha Industri	8.622.050,00	8.622.050,00	100,00
16	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	41.285.500,00	36.310.480,00	87,95
	Jumlah	5.215.471.498,00	4,147.217.565,00	79,52

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab.Banggai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Banggai, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perdagangan, industri rumah tangga, koperasi dan UMKM serta pertumbuhan wirausaha baru diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 123,81% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 4,147.217.565,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 5.215.471.498,00 atau sebesar 79,52%. Dari kondisi ini tampak bahwa tingkat efektifitas yang dicapai sebesar 155,70 %, dan tingkat efisiensi sebesar 44,29 %.

Tabel. 3.20
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	%	37,80	40,54	107,25	46,39 %	54,98%	118,52 %	75,00	73,31%
	Rata-rata capaian kinerja				107,25			118,52		73,31

Sumber : Dinas PMD Kab.Banggai, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Berdasarkan tabel 3.20 terlihat bahwa realisasi terhadap indikator persentase desa maju berdasarkan IDM sebesar 54,98% melebihi target yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026, sebesar 46,39%, dengan capaian kinerja sebesar 118,52% (kategori sangat baik). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dimana realisasi terhadap indikator persentase desa maju berdasarkan IDM sebesar 40,54% dengan capaian kinerja sebesar 107,25 (kategori sangat baik), terjadi peningkatan sebesar 14,44 % dari tahun 2022 ke 2023. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar

75,00%, realisasi di tahun 2023 atau ditahun kedua RPJMD baru sebesar 54,98%, dengan capaian sebesar 73,31% belum mencapai target akhir yang sudah di tetapkan di tahun akhir RPJMD.

Indeks desa membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: Desa Sangat Tertinggal; Tertinggal; Desa Berkembang; Desa Maju; dan Desa Mandiri. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan.

Berdasarkan dari data hasil survey Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2023, Kabupaten Banggai memperoleh nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,7280 atau berada pada kategori desa maju, sedangkan tahun 2022, indeks desa membangun Kabupaten Banggai 0,7012 berada pada kategori desa berkembang, jika dibandingkan antara tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan status dari desa berkembang menjadi desa maju. Perubahan satus dari desa berkembang menjadi desa maju dikarenakan dari 23 kecamatan terdapat 1 kecamatan masuk dalam kategori desa mandiri, 14 kecamatan masuk dalam kategori desa maju dan 8 Kecamatan masuk dalam kategori desa berkembang yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.21
Nilai Rata-Rata dan Status IDM Kecamatan di Kabupaten Banggai
Tahun 2023

No	Kecamatan	Nilai Rata-Rata IDM 2023 Kecamatan	Status IDM Kecamatan 2023
1	Batui	0.83882	mandiri
2	Batui Selatan	0.80800	MAJU
3	Luwuk Selatan	0.80750	MAJU
4	Mantoh	0.80474	MAJU
5	Luwuk	0.79420	MAJU
6	Toili Barat	0.78432	MAJU
7	Nambo	0.77888	MAJU
8	Moilong	0.75891	MAJU
9	Masama	0.75604	MAJU
10	Toili	0.74740	MAJU
11	Balantak Utara	0.73300	MAJU
12	Balantak Selatan	0.72876	MAJU
13	Kintom	0.71778	MAJU
14	Pagimana	0.71588	MAJU
15	Luwuk Timur	0.70905	MAJU

16	Lobu	0.70242	Berkembang
17	Nuhon	0.69552	Berkembang
18	Bualemo	0.69414	Berkembang
19	Lamala	0.69316	Berkembang
20	Simpang Raya	0.69048	Berkembang
21	Luwuk Utara	0.68212	Berkembang
22	Bunta	0.68210	Berkembang
23	Balantak	0.66264	Berkembang

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2023

Tabel. 3.22
Status Perkembangan Desa di Kabupaten Banggai, 2023

Status Desa / Village Status	Jumlah Kelurahan / Desa / Number of Village					
	2021	%	2022	%	2023	%
Desa Mandiri	5	1,71%	7	2,40%	9	3,09%
Desa Maju	89	30,58%	118	40,54%	160	54,98%
Desa Berkembang	191	65,63%	163	56,01%	121	41,58%
Desa Tertinggal	6	2,06%	3	1,03%	1	0,34%
Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0
Jumlah Desa	291					

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Tahun 2023

Dari tabel 3.22 status desa di Kabupaten Banggai dari tahun 2021 hingga tahun 2023 terjadi perkembangan yang signifikan dimana terjadi peningkatan status desa mandiri, dimana dari 7 desa mandiri bertambah menjadi 9 desa mandiri dan 118 desa maju bertambah menjadi 160 desa maju serta untuk status desa berkembang dan desa tertinggal yang mengalami penurunan. Status Desa tertinggal di Kabupaten Banggai berkurang dari 3 desa menjadi 1 desa. Dimana satu desa yang masih berstatus desa tertinggal tersebut adalah desa Baloa Doda yang ada di kecamatan Pagimana, dengan jarak sekitar 64 KM dari ibu kota Kecamatan Pagimana, perkampungan Baloa Doda hanya dapat di capai dengan berjalan kaki dengan jarak tempuh 3-4 hari lama perjalanan dan tidak ada akses untuk kendaraan. Meskipun masih berstatus desa tertinggal Dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2023 beberapa infrastruktur dan fasilitas publik telah dibangun Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Seperti jaringan air bersih, penerangan melalui tenaga surya dan pembagian lampu rumah, jamban keluarga, dan program perbaikan bagi rumah tidak layak huni (RLTH), serta Balai Kemasyarakatan.

Bila dibandingkan IDM Kabupaten Banggai dengan IDM Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sulawesi Tengah, Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Banggai berada pada ranking kedua setelah Kabupaten Donggala dengan nilai IDM sebesar 0,7280, seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Perbandingan IDM Banggai dengan Kabupaten/Kota,
Provinsi di Sulawesi Tengah dan IDM Nasional tahun 2023

Rank	Prov/Kab/Kota	Nilai Rata-rata IDM	Status IDM
	IDM Nasional	0,6935	BERKEMBANG
	Sulawesi Tengah	0,6978	BERKEMBANG
1	Donggala	0.7301	Maju
2	Banggai	0.7280	Maju
3	Parigi Moutong	0.7154	Maju
4	Poso	0.7113	Maju
5	Buol	0.7092	Maju
6	Morowali Utara	0.6958	BERKEMBANG
7	Morowali	0.6871	BERKEMBANG
8	Sigi	0.6848	BERKEMBANG
9	Toili-Toli	0.6845	BERKEMBANG
10	Tojo Una-Una	0.6489	BERKEMBANG
11	Banggai Kepulauan	0.6484	BERKEMBANG
12	Banggai Laut	0.6481	BERKEMBANG

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Bila dibandingkan IDM Kabupaten Banggai dengan IDM Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Banggai sebesar 0,7280 dengan status maju, masih lebih tinggi 0,0302 point dari nilai IDM Sulawesi Tengah yaitu 0,6978 dengan status berkembang dan juga lebih tinggi 0,0345 point dari nilai IDM Nasional sebesar 0,6935, sebagai berikut :

Grafik 3.18
Perbandingan IDM Banggai dengan Provinsi dan Nasional, 2023



Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2023 (data diolah)

Kemajuan dan kemandirian desa sangat ditentukan oleh sejauh mana kemampuan antara pemerintah desa dengan kewenangan desa dan keuangan desanya mampu berkolaborasi atau kerja sama dengan kelembagaan desa serta dukungan partisipasi masyarakat untuk dapat mengelola potensi desanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya.

Kendala atau permasalahan yang terjadi dalam perkembangan dan kemajuan status desa di Kabupaten Banggai antara lain :

1. Jumlah BUMDes yang terbentuk 265 Dari 291 Desa. BUMDes sehat/aktif 137 atau 47,7%.
2. Pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi desa belum optimal
3. Delegasi kewenangan ke pemerintah desa belum optimal
4. Kemampuan aparat desa dan anggota BPD terbatas.
5. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD masih rendah.
6. Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa belum optimal.
7. Angka kemiskinan yang masih didominasi oleh masyarakat miskin perdesaan.
8. Masih kurangnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat perdesaan.
9. Masih banyak lahan produktif yang terlantar/pekarangan yang tidak di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan ekonomi rumah tangga perdesaan.

Penting untuk melibatkan masyarakat setempat dalam mengidentifikasi kendala-kendala ini dan merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi unik desa tersebut. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat lokal juga penting untuk mencapai kemajuan status desa yang berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan dalam perkembangan dan kemajuan status desa di Kabupaten Banggai antara lain :

- Memperbaiki dan membangun infrastruktur baik melalui dana pemerintah, swasta, atau program kemitraan publik-swasta.
- Membangun pusat kesehatan, meningkatkan akses terhadap tenaga medis, dan memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat.
- Memaksimalkan Peran Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan

- Peningkatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam meningkatkan usaha produktif Masyarakat perdesaan
- Pemanfaatan pekarangan melalui system pertanian terintegrasi di perdesaan (program satu juta satu pekarangan)
- Revitalisasi BUMDes / BUMDes Bersama melalui kebijakan satu BUMDes 500 juta
- Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan/kawasan perdesaan melalui BUMDes
- Peningkatan pembangunan perdesaan berbasis kawasan dan potensi lokal Desa melalui kerjasama antar Desa
- Mendorong dan Memfasilitasi Upaya Peningkatan SDM
- Mendorong Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Perencanaan
- Memaksimalkan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran "Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM", yaitu:

Tabel. 3.24
Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2023
Yang Mendukung sasaran Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1	Penataan Desa	65.832.800,00	63.073.080,00	95,81
2	Peningkatan Kerjasama Desa	87.082.090,00	84.787.080,00	97,36
3	Administrasi Pemerintahan Desa	10.511.465.555,00	6.662.442.344,00	63,38
4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1.300.000.360,00	1.223.702.159,00	94.13
Jumlah		11.364.380.805,00	8.034.004.663,00	67,15

Sumber : DPMD Kab.Banggai, 2023

Beradsarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pembangunan manusia kabupaten banggai yang produktif dan sejahtera diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 118,52% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 8.034.004.663,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 11.364.380.805,00 atau sebesar 67,15%. Dari kondisi ini tampak bahwa tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 176,50%, dan tingkat efisiensi sebesar 51,37%.

Tabel. 3.25
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1	Persentase Infrastruktur dasar dan Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	70,00	71,91	102,73	72,50 Baik	60,20	83,03	80,00	75,25
Rata-rata capaian kinerja				102,73			83,03		75,25

Sumber : Dinas PUPR Kab.Banggai, Tahun 2023 (data diolah)

Pencapaian atas sasaran tersedianya infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah yang berkualitas, layak dan merata untuk penanggulangan kemiskinan dan konektivitas dengan indikator persentase infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik diperoleh capaian kinerja sebesar 83,03% dengan kategori baik, jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan capaian sebesar 102,73 terjadi penurunan ditahun 2023 sebesar 19,7 point, dan dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 tercapai sebesar 75,25% dengan kategori baik. Adanya penurunan capaian indikator persentase infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik disebabkan oleh tidak terealisasinya Pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi, hal tersebut memepengaruhi nilai atau persentase infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik. pembangunan infrastruktur yang berkualitas dapat diwujudkan jika didukung dengan Pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian Daerah Kabupaten Banggai. Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Ketersediaan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya yang

diperlukan untuk kegiatan-kegiatan produktif, sehingga meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada tabel dibawah ini menunjukkan pencapaian infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik di Kabupaten Banggai tahun 2023, yaitu :

Tabel 3.26
Capaian Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah dalam kondisi baik
Tahun 2023

No	Infrastruktur Dasar dan wilayah	Realisasi
1	Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	63, 68 %
2	Rumah Tangga dengan akses air minum layak	78, 11 %
3	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman	82,74 %
4	Bangunan Negara berfungsi baik	47 %
5	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	69,90 %
6	Pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	0%
7	Kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	80,00%
	Rata-rata capaian	60,20%

Sumber : Dinas PUPR Tahun 2023

Tabel 3.27
Infrastruktur dasar dan wilayah di Kabupaten Banggai, 2023

No	Infrastruktur Dasar dan wilayah	Jumlah Total	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1	Prasarana Jalan	1.178,46	443,10	307,15	426,099
2	Drainase Kabupaten	17,010960	20,500	16,990.46	0
3	Irigasi Kabupaten	143.670	81,758	14,092	47,820
4	Jumlah Bangunan Pemerintah Kabupaten	241	165	38	10
5	Jumlah Jembatan di Kabupaten	3.169,84	2805,14	240,90	123,8

Sumber : Dinas PUPR (2023)

- Persentase panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi mantap

Pengertian jalan dalam kondisi mantap didefinisikan sebagai kondisi jalan dalam keadaan baik, sedang, dan rusak dimana setiap tahun mengalami perkembangan, Sampai dengan tahun 2023 kondisi jalan di Kabupaten Banggai dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.28
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan

Uraian	Kondisi			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
	Panjang jalan (km)	Panjang jalan (km)	Panjang jalan (km)	Panjang jalan (km)
Jalan Kabupaten	459,20	301,95	211,39	205,91

Dari tabel diatas dijelaskan total Jalan Kabupaten Banggai sampai tahun 2023 dimana kondisi jalan tersebut terdapat **459,20** km berkondisi baik, **459,20** km berkondisi sedang dan **301,95** km berkondisi rusak ringan dan **211,39** km berkondisi rusak berat 205,90.

- Persentase Pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi

Tenaga kerja merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas dapat diperoleh jika para pelaku bidang jasa konstruksi memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi sesuai bidang pekerjaannya. Dalam pembangunan infrastruktur, peran tenaga kerja konstruksi menjadi sangat penting. Setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana diamanatkan Dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Sertifikat kompetensi kerja dibagi berdasarkan kualifikasi tenaga kerja. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan penggolongan profesi dan keahlian atau keterampilan kerja orang perseorangan di bidang konstruksi menurut tingkat kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi terbagi menjadi 2 yaitu tenaga ahli dan tenaga terampil, Dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memberi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota pada sub- urusan jasa konstruksi diantaranya meliputi Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga mengatur bahwa setiap pengguna jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Peran tenaga kerja konstruksi sangat penting dalam mendukung program prioritas nasional untuk membangun infrastruktur yang tepat waktu dan berkualitas guna

mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan infrastruktur dan Penyiapan SDM Konstruksi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baik lokal, regional maupun nasional Sektor konstruksi di Indonesia sendiri diperkirakan bernilai Rp 446 triliun atau menyumbang sekitar 14,3% dari PDB Indonesia. Setidaknya dari setiap Rp 1 Triliun pembangunan infrastruktur dibutuhkan $\pm$ 14.000 tenaga kerja.

- **Persentase Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik**

Dibidang Pengairan (irigasi), pemeliharaan saluran irigasi telah dilakukan secara sistematis sejak dulu oleh pemerintah bekerjasama dengan masyarakat. Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Banggai memiliki saluran irigasi dengan total panjang 139,483 Kilometer. Yang terbagi berupa Saluran Primer sepanjang 44,454 Kilometer, Saluran Sekunder sepanjang 95,025 Kilometer, Saluran Pembuang Sepanjang 2,148 Kilometer.

- **Persentase Ketersediaan Air Bersih Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-hari**

Air merupakan sumber daya alam yang sangat vital dan diperlukan untuk menentukan keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Dalam segala macam kegiatan manusia, air merupakan kebutuhan pokok untuk melangsungkan berbagai kegiatan, seperti keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, mencuci, keperluan industri, keperluan perdagangan, keperluan pertanian dan peternakan, keperluan pelayaran dan lain sebagainya. Oleh karena itulah air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai yaitu pelayanan dasar air bersih dengan indikator presentase ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok. Rumus cara pengukuran indikator ini adalah jumlah air bersih yang tersedia dibagi dengan kebutuhan air bersih minimal. Jumlah air bersih yang tersedia adalah jumlah jiwa dikalikan dengan kebutuhan pokok minimal air bersih sehari-hari liter/orang/hari. Kebutuhan air bersih minimal adalah Jumlah total proyeksi kebutuhan pokok minimal air bersih di Kabupaten Banggai.

- **Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang**

Perencanaan penataan ruang merupakan salah satu unsur dalam pembangunan suatu daerah yang masih harus mendapatkan penanganan serius. Berbagai masalah perkotaan yang timbul seperti kemacetan, polusi udara, Pedagang kaki lima dan permasalahan kota lainnya merupakan dampak dari perbuatan manusia itu sendiri yang bertindak tanpa atau tidak sesuai dengan perencanaan.

Dalam Undang-undang No.26 tahun 2007 mengamanatkan perlunya suatu perencanaan yang berbasis penatagunaan ruang yang mengharuskan setiap daerah menyusun konsep ketataruangan agar pembangunan yang direncanakan memiliki pondasi yang kuat dan terarah sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Kabupaten Banggai dengan posisinya yang strategis, serta kondisi alamnya yang relatif nyaman tak luput dari permasalahan pembangunan perkotaan. Salah satu penyebabnya adalah rencana pembangunan yang dibuat, tidak jarang mengalami ketidaksesuaian dengan pemanfaatan ruangnya. Oleh karena itu pembangunan suatu daerah perlu adanya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, dalam tercapainya sasaran tersedianya infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah yang berkualitas, layak dan merata untuk penanggulangan kemiskinan dan konektivitas yaitu :

1. Tidak teralisasinya Pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi
2. Kurangnya tenaga kerja jasa konstruksi yang berkualitas dan profesional. Tenaga teknis lapangan (pengawas, perencana, Quality control) kompetensi dibidang teknik dan pemahaman terhadap regulasi dibidang jasa konstruksi masih perlu ditingkatkan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memperhatikan sarana dan prasarana yang telah di bangun oleh Pemerintah.
4. Adanya oknum-oknum tertentu yang masih menyalah gunakan anggaran Pembangunan, sehingga kualitas bangunan dan konstruksi tidak memenuhi standar.
5. Kejadian tidak terduga seperti bencana alam yang dapat merusak infrastruktur bangunan, jalan dan jembatan bahkan irigasi.

- Adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang disebabkan oleh kurangnya alat berat yang digunakan, dikarenakan pekerjaan dilaksanakan dalam waktu bersamaan sehingga jumlah kegiatan tidak sebanding dengan jumlah alat yang ada. Dimana sebagian besar penyedia belum memiliki alat berat sendiri, sementara alat berat yang disewakan terbatas jumlahnya. Untuk meminimalisir keadaan ini diperlukan pengaturan jadwal dalam hal pelaksanaan pekerjaan.

Alternative solusi yang telah dilakukan diantaranya:

- Memelihara serta meningkatkan prasarana kePU-an yang ada khususnya pada bidang Bina Marga, Pengairan Dan Cipta Karya.
- Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan sumber daya pengelola kegiatan berupa kursus-kursus, pelatihan-pelatihan maupun seminar-seminar dibidang keteknikan.
- Mengusulkan Penambahan Tenaga Teknis Pengawas lapangan, Perencana, dan Quality control Bidang Bina Marga, Pengairan dan Cipta Karya.
- Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam kantor untuk mendukung produktivitas personil dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi.
- Memelihara dan merehabilitasi serta pengadaan peralatan berat untuk mendukung upaya pemeliharaan infrastruktur bidang ke PU-an.
- Mengadakan sarana mobilitas dan beberapa jenis peralatan untuk mendukung pencapaian kinerja.
- Pembinaan tentang Jasa Konstruksi.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas”, yaitu:

Tabel. 3.29
Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2023
Yang Mendukung sasaran Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.402.73.903,00	10.873.068.434,00	87,66
2	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	13.554.497.671,00	11.417.881.021,00	84,23
3	Pengembangan Sistem	2.388.082.905,00	2.267.139.274,00	94,93

	Dan Pengelolaan Persampahan Regional			
4	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.477.541.710,00	2.084.166.170,00	84,12
5	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	18.547.610.438,00	17.579.778.638,00	84,12
6	Pengembangan Permukiman	4.838.478.382,00	4.774.545.494,00	98,67
7	Penataan Bangunan Gedung	77.869.960.285,00	66.519.644.910,00	85,42
8	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	18.006.637.720,00	15.861.910.408,00	88,00
9	Penyelenggaraan Jalan	90.036.877.905,00	86.845.235.016,00	96,45
10	Pengembangan Jasa Konstruksi	621.488,465,00	355.708.977,00	57,24
11	Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.123.853.600,00	2.635.346.927,00	78,84
12	Pengembangan Perumahan	2.279.999.700,00	2.198.964.300,00	96,45
13	Kawasan Permukiman	889.344.829,00	877.695.900,00	98,69
14	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	6.470.985.950,00	6.434.334.919,00	99,43
15	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.472.716.060,00	10.743.688.849,00	86,13
16	Pengelolaan Pelayaran	64.655.000,00	58.178.500,00	89,98
17	Informasi dan Komunikasi Publik	760.708.500,00	726.235.380,00	95,47
18	Aplikasi Informatika	4.651.483.870,00	4.571.206.567,00	98,27
Jumlah		258.433.434.525,00	246.824.729.684,00	95,51

Sumber : Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Perhubungan, DKISP Kab.Banggai, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pembangunan manusia kabupaten banggai yang produktif dan sejahtera diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 83,03% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 246.824.729.684,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 258.433.434.525,00 atau sebesar 95,51%.

Tabel. 3.30
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Kategori	Rendah	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	100,00	Sedang	50,00
	Rata-rata capaian kinerja				Tinggi			100,00		50,00

Sumber : BPBD Kab.Banggai

Berdasarkan tabel 3.30 indeks ketahanan daerah untuk tahun 2023 memperoleh skor Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebesar 0,33 dengan kelas kategori Rendah, dengan capaian kinerja 100,00%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diperoleh capaian 50,00%.

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah yaitu dengan mengisi kuisioner 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah. Dalam 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah sendiri, terdapat 7 prioritas dan 71 indikator. Setiap indikator, diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci. 7 prioritas tersebut terdiri dari :

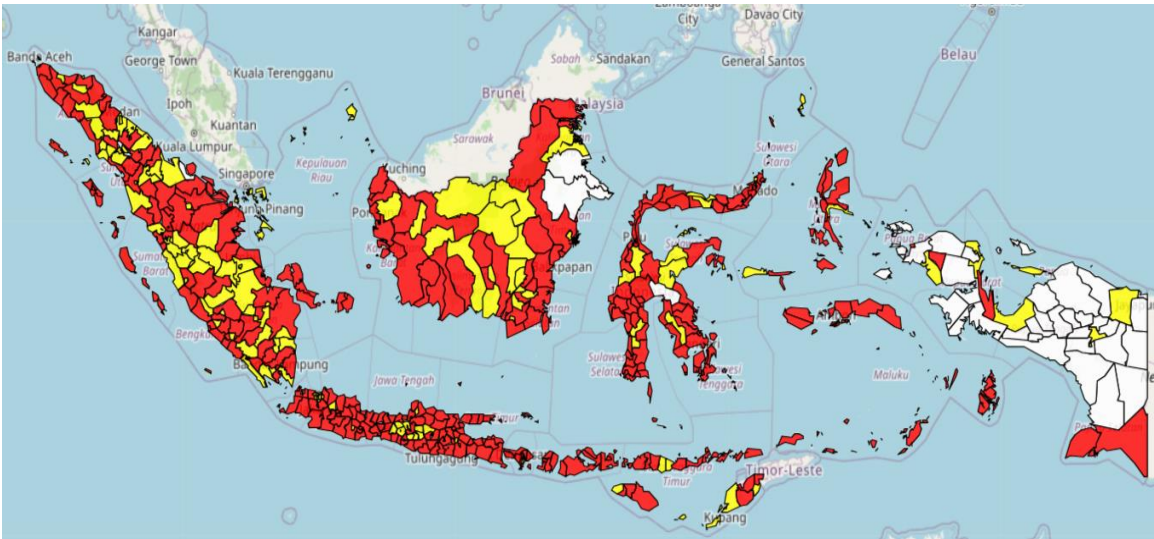
- Prioritas Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
- Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
- Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik
- Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- Prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan

terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit PD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

Pada gambar di bawah ini menunjukkan indeks resiko bencana seluruh wilayah indonesia dan juga termasuk kabupaten Banggai di dalamnya. Bahwa indeks resiko bencana Kabupaten Banggai berada di zona merah atau tinggi dengan nilai 163,20.

Gambar 3.1
Gambar Indeks Risiko Bencana Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2023



Sumber : <https://inarisk.bnpp.go.id/irbi>

Adapun Klasifikasi nilai indeks resiko bencana, sesuai dilihat dari indeks risiko bencana, sebagai berikut :

	= < 13 (Rendah)
	= 13 – 144 (Sedang)
	= > 144 (Tinggi)

Program yang mendukung sasaran “Meningkatnya ketahanan bencana daerah melalui peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat dalam penanggulangan bencana”, sebagai berikut :

Tabel 3.31

Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah Melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.213.069.000,00	1.048.712.540,00	86,45

2	Penanggulangan Bencana	2.112.738.450,00	2.045.821.080	96,83
3	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	475.125.800,00	392.021.800,00	82,51
	Jumlah	3.800.933.250,00	3.486.555.420,00	91,73

Sumber : SatPolPP Kab.Banggai, BPBD Kab. Banggai, 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pembangunan manusia kabupaten banggai yang produktif dan sejahtera diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 3.486.555.420,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.800.933.250,00 atau sebesar 91,73%. Dari kondisi ini tampak bahwa tingkat efektivitas yang dicapai sebesar 109,02%, dan tingkat efisiensi sebesar 8,27%.

Tabel. 3.32

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1	Kontribusi Sektor Pertanian, perikanan dan pertambangan terhadap PDRB	33,23	40,13	120,76	33,92%	40,6	119,69	35,99	112,81
2	Indeks Ketahanan Pangan	86,64	85,73	98,95	87,17%	85,72	98,34	90,00	95,24
Rata-rata capaian kinerja				109,85			109,02		104,03

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, (data diolah)
BKP Kementan

Pencapaian atas sasaran meningkatnya investasi dan pengelolaan potensi pertanian, perikanan dan kelautan serta pertambangan untuk mendukung perekonomian daerah terhadap kedua indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 109,02% dengan kategori "baik sekali". Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diperoleh rata-rata capaian sebesar 104,03% dg kategori "baik sekali".

1. Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan Terhadap PDRB

Dari tabel 3.32 Target RPJMD dari Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan Terhadap PDRB di Kabupaten Banggai pada tahun 2023 sebesar

33,92% dan terealisasi sebesar 40,6%, dengan capaian kinerja sebesar 119,69%. Dapat dikatakan Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pertambangan terhadap PDRB melebihi target RPJMD tahun 2023. Kontribusi tersebut melebihi target dikarenakan ketiga sektor ini mengalami pertumbuhan positif di Kabupaten Banggai selama tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 35,99 diperoleh capaian sebesar 112,81%. Kontribusi sektor pertanian, perikanan dan pertambangan terhadap PDRB diperoleh dari kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 21,59% dan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 19,01%. Dimana data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.33
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banggai, 2019–2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	22,02	23,38	22,53	18,52	21,59
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	22,73	22,92	22,12	21,61	19,01

Sumber : BPS Kabupaten Banggai, 2023

Sektor Pertanian masih merupakan sektor yang sangat menentukan perekonomian Kabupaten Banggai, karena sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian dengan bercocok tanam, hal ini sesuai dengan data bahwa dari keseluruhan desa/kelurahan di Kabupaten Banggai sekitar 93,98% merupakan daerah dengan potensi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan. Pada sektor pertanian ini dibagi menjadi lima bagian sebagai berikut :

Tabel 3.34
Potensi Sektor Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Banggai

Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Perikanan
Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah	Bawang Merah Cabai Besar Kentang Bawang Putih Petsai	Kelapa Sawit Kelapa Cengkeh Kopi Kakao	a. Ternak Besar meliputi : - Sapi - Kerbau - Kuda	a. Perikanan Tangkap meliputi : - Ikan Cakalang - Tongkol

Kacang Hijau	Tomat	Jambu Mente Kapuk Tembakau Kemiri Sagu Pala Lada	b. Ternak Kecil meliputi : - Kambing - Domba - Babi	- Tuna - Udang b. Perikanan Budidaya meliputi : - Jaring apung laut - Jaring apung tawar - Jarring tangkap tawar - Keramba - Kolam air deras - Kolam air tenang - Minapadi sawah - Rumpuk Laut - Tambak intensif - Tambak sederhana - Tambak semi intensi
--------------	-------	--	--	--

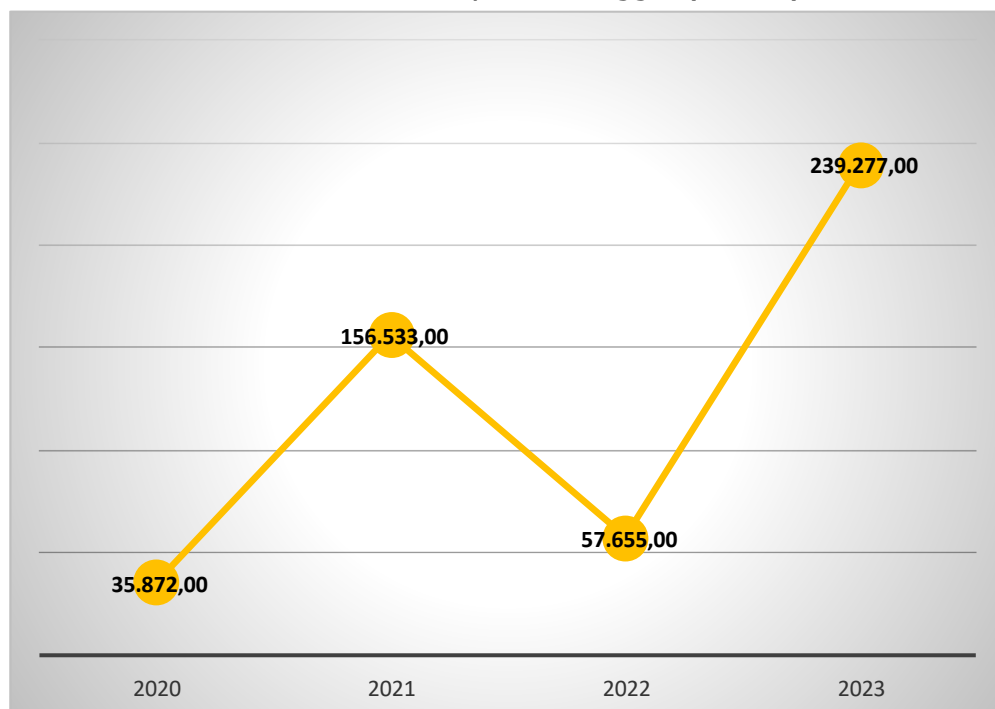
Tabel 3.35
Jumlah Produksi sektor pertanian Kabupaten Banggai tahun 2023

No	Jenis Tanaman	Jumlah Produksi (Ton)
1	Jagung	58.976,48
2	Kedelai	6.076,58
3	Kacang Tanah	315,8
4	Kacang Hijau	203,9
5	Ubi Kayu	1.382, 50
6	Ubi Jalar	1.270

Dari tabel 3.35 di atas terlihat bahwa jumlah produksi jagung memiliki jumlah produksi terbesar pada tahun 2023 yaitu sebesar 58.976,48 Ton, dan paling sedikit yaitu produksi kacang hijau yaitu sebesar 203,9 ton. Berikut data terkait produksi Pertanian di Kabupaten Banggai berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai tahun 2023, yang dapat terlihat pada link berikut:

<https://drive.google.com/file/d/1R7LhMZbuVcXKzjlywhdW1r1WMQ2k3KGn/view?usp=sharing>

Grafik 3.19
Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Banggai (kuintal), 2020–2023



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Tahun 2023

Dari grafik di atas terlihat Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Banggai (kuintal), pada tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan dan penurunan produksi, dimana tahun 2021 jumlah produksi sebanyak 35.872 kuintal naik menjadi 156.533 kuintal, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 57.655 kuintal, dan terjadi kenaikan pada tahun 2023 sebesar 239,277 kuintal.

Tabel. 36
Produktivitas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan

Produktivitas Tanaman	TARGET	REALISASI
Produktivitas Tanaman Pangan per hektar per tahun	4.18 ton/ha	4.43 ton/ha
Produktivitas Tanaman Hortikultura per hektar per tahun	7.43 ton/ha	4.04 ton/ha
Produktivitas Tanaman Perkebunan per hektar per tahun	0.98 ton/ha	0.98 ton/ha

Pada Tahun 2023 Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pekebunan Menuju Banggai Swasembada Pangan berkelanjutan, dengan indikator kinerja utama Produktivitas Tanaman Pangan per hektar per tahun yang ditarget 4.18

ton/ha pada Tahun 2023 realisasinya 4.43 ton/ha. Pencapaian tersebut disebabkan oleh dukungan yang intens oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha disektor pertanian, Produktivitas Tanaman Hortikultura per hektar per tahun yang ditarget 7.43 ton/ha pada Tahun 2023 realisasinya 4.04 ton/ha jumlah produksi 666.08 ton, produksi hortikultura tidak mencapai target disebabkan kondisi cuaca tidak menentu, potensi tanaman rentan terhadap penyakit serta terkena serangan OPT disebabkan dampak perubahan iklim. Dari perubahan iklim tersebut mempengaruhi proses pembungaan terganggu menyebabkan bunga yang menjadi cikal buah berguguran, Produktivitas Perkebunan per hektar per tahun Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan yang ditarget 0.98 % pada Tahun 2023 realisasinya 0.98 ton/ha jumlah produksi 70,925.14 ton dengan capaian 100 % dimana indikator ini mencapai target yang ditetapkan.

Sarana dan prasarana serta infrastruktur di sektor pertanian yang mendukung peningkatan produksi pertanian, antar lain :

1. Pengembangan Prasarana Pertanian untuk Terwujudnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
2. Pembangunan 43 unit jaringan tersier
3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang dilaksanakan Dinas TPHP Kabupaten Banggai
4. Pembangunan 1 unit DAM Parit, serta Pemeliharaan dan rehabilitasi Parit.
5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage
6. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
7. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
8. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Tanaman Pangan) yang dilaksanakan Dinas TPHP Kabupaten Banggai

Selain sarana dan prasarana serta infrastruktur yang mendukung peningkatan sektor pertanian yaitu dengan :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi Pemenuhan Penyuluh Pertanian sesuai jumlah desa dan kelompok binaan.
2. Pembinaan bagi penyuluh pertanian serta Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator Persentase serangan OPT dan DPI.

Untuk mendukung peningkatan sektor pertanian Pemerintah Kabupaten Banggai juga memberikan Bantuan berupa :

- Bantuan alsintan pengolahan dan pasca panen 28 unit, benih jagung 9.721 kg, benih padi sawah 17.325 kg, benih persediaan jagung buffer stock 9.545 kg.
- Bantuan alsintan pra panen 966 Unit, kontainer plastik/keranjang buah cabe 1.806 unit, alat pasca panen 1 unit, benih cabe 2.590 sachet, pupuk hayati majemuk 966 liter, bahan pengendali OPT/Insektisida nabati cabe 1.610 sachet, fungisida nabati cabe 1.633 sachet, bibit durian 15.760 pohon, bibit alpokat 2.500 pohon, bawang merah 3.650 kg, bibit jeruk siam madu 600 pohon.
- Bantuan alsintan pra panen 20 unit, alsintan pasca panen 17 unit, alat pengolahan 2 unit, bantuan bibit kelapa dalam 68.300 pohon, bibit cengkeh 12.000 pohon, bibit pala 12.000 pohon, bibit kakao sambung pucuk 22.600 pohon.
- Bantuan pupuk NPK 76.930 kg, pupuk eco farming 800 tube, pupuk hayati majemuk 2.500 kg, pupuk kompos buffer stock 33.333 kg, pupuk NPK buffer stock 15.625 kg, bantuan alsintan pra panen dan pasca panen 909 unit.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam mendukung sektor pertanian, yaitu :

1. Penyediaan Bibit Ternak yang Bermutu dan Pakan yang Berkualitas ditempuh dengan cara sebagai berikut:
 - Pengadaan Bibit Sapi Unggul dan Penerapan Prosista (Program Satu induk– Satu anak–Satu tahun). Tujuan kebijakan ini untuk mengoptimalkan produktivitas induk sapi, sehingga meningkatkan jumlah kelahiran pedet melalui IB, INKA dan TE;
 - Pengendalian dan pengawasan pengeluaran sapi bibit betina; Pengendalian dan pengawasan pemotongan sapi betina produktif. Kebijakan ini berupa upaya pencegahan pemotongan betina produktif dari jumlah pemotongan tercatat. Kebijakan ini merupakan bagian dari cara meningkatkan jumlah induk produktif;
 - Pengendalian penyakit pedet. Kebijakan ini berupa upaya pengurangan jumlah kematian pedet yang diakibatkan parasit dengan memberikan obat cacing gratis untuk pedet umur 1 sampai 6 bulan. Kebijakan ini penting karena hampir 70 persen kematian pedet diakibatkan parasit. Pengadaan Bibit ternak unggul yang unggul dalam rangka peningkatan populasi dan produksi daging dan telur unggas;

- Optimalisasi Program 1 Juta 1 Pekarangan melalui bantuan bibit ternak ayam petelur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat; Pengendalian dan pengawasan pemotongan unggas di RPU (Rumah Potong Unggas) dalam upaya penyediaan daging unggas yang ASUH;
 - Pengendalian penyakit unggas secara terencana dalam upaya peningkatan produksi daging dan telur;
 - Fasilitasi pengembangan dan ketersediaan usaha pakan ternak;
 - Pemanfaatan Teknologi Pakan dan Limbah Pertanian, Perikanan atau Industri.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peternakan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaannya, ditempuh dengan cara:
- Peningkatan kompetensi dalam upaya peningkatan profesionalisme ASN peternakan dan kesehatan hewan.
 - Optimalisasi peran penyuluh peternakan melalui sekolah lapang bagi kelompok tani-ternak.
 - Pengembangan dan fasilitasi kelompok tani-ternak dengan maksud agar kelompok tani-ternak menjadi lembaga pemberdayaan dengan manajemen modern.
 - Fasilitasi kerjasama dengan institusi pendukung, seperti lembaga perkreditan, lembaga penelitian dan pengembangan dan investor.
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ditempuh dengan cara:
- Peningkatan jumlah petugas keswan yang kompeten dan berdaya saing.
 - Menyediakan sarana pendukung kesehatan hewan.
 - Penyediaan obat-obatan dan vaksin hewan.
 - Sosialisasi tentang kesehatan hewan terhadap masyarakat.
 - Pelayanan pengobatan kesehatan hewan.
 - Pengawasan lalu lintas hewan dan perdagangan ternak/hasil sampingan peternakan.
 - Pengawasan dan pelayanan pemeriksaan kesehatan ditempat-tempat pemotongan, baik di RPH, RPU, Pos Lalulintas Hewan, Pasar Hewan, dll.
 - Pelayanan pengawasan kesehatan hewan terkait daging beku di unit-unit usaha peternakan.

- Tindakan pengebalan hewan dari penyakit melalui vaksinasi dan vitamisasi ternak.
 - Tindakan pengkarantinaan hewan, sanitasi dan desinfeksi/penyuci hamaan penyakit.
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan keswan dan Pengolahan Hasil Peternakan ditempuh dengan cara :
- Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan ternak seperti: Poskeswan, RPH (Rumah Potong Hewan), Rumah Potong Unggas (RPU), Pasar Hewan dan Lab. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 - Meningkatkan sarana dan prasarana IB (Inseminasi Buatan) dan TE (Transfer Embrio);
 - Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan hasil peternakan.
5. Peningkatan kualitas produk hasil olahan ternak dan akses pemasaran ditempuh dengan cara :
- Penerapan standar mutu olahan hasil ternak;
 - Membuka akses informasi harga dan kebutuhan pasar;
 - Meningkatkan Pengetahuan Pelaku Usaha terhadap kualitas olahan hasil ternak.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam peningkatan produksi pertanian, adalah :

1. Faktor iklim (curah hujan, suhu udara, kelembaban udara, angin, cahaya dan Panjang hari)
2. Faktor gangguan serangan hama, penyakit dan gulma.

Sampai saat ini, perkembangan Kabupaten Banggai sangat bertumpu pada kemampuan mengelola dan mengembangkan sumber daya alam yang dimilikinya, dilihat dari aspek pemanfaatannya bagi pembangunan daerah/wilayah maupun dilihat dari aspek pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya yaitu pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di daratan maupun sepanjang pesisir pantai dan di lautan. Jenis-jenis ikan yang sebagian besar diusahakan perikanan tangkap di Kabupaten Banggai adalah ikan cakalang, tongkol, tuna dan udang. Untuk perikanan budidaya dibagi menjadi jaringan apung laut, jaring apung tawar, jaring tangkap tawar, keramba, kolam air deras, kolam air tenang, mina padi sawah, rumput laut, tambak intensif, tambak sederhana dan tambak semi intensi.

Sektor perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya yang memberikan dampak signifikan pada perekonomian Kabupaten Banggai. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sehingga kontribusi sektor perikanan mengalami peningkatan, dengan senantiasa memberikan dukungan dalam mengoptimalkan potensi sektor perikanan melalui berbagai program dan inovasi dengan tetap mengindahkan aspek berkelanjutan bagi generasi mendatang. Selain itu Wilayah kabupaten Banggai memiliki perairan yang sangat luas, serta memiliki jumlah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan yang cukup besar, sehingga Kabupaten Banggai bisa menghasilkan produk perikanan yang melimpah serta memiliki nilai jual di pasar internasional.

Kontribusi sektor perikanan dapat diperoleh dari kontribusi jumlah rumah tangga perikanan tangkap, jumlah rumah tangga perikanan budidaya, budidaya perikanan tambak, pembenihan perikanan.

Tabel. 3.37
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap, 2021-2023

Jenis Perikanan Tangkap	Jumlah RT		
	2021	2022	2023
Perikanan Laut	6254	6572	6.096
Perairan Umum	-	-	-
Jumlah	6254	6572	6.096

Sumber : BPS Kab.Banggai

Tabel. 3.38
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya dan Jenis Budidaya, 2023

Jenis Perikanan Budidaya	Jumlah RT (2023)
Budidaya Laut lainnya	8
Budidaya Tambak	348
Budidaya JA. Laut	196
Budidaya RL. Cottoni	380
Budidaya Karamba	-
Budidaya Mina Padi	21
Lainnya	46

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2023

Tabel 3.39
Budidaya Perikanan Tambak di Kabupaten Banggai, 2023

Jenis Budidaya	Luas Area (Ha)	Pola Budidaya		
		Tradisional	Semi	Intensif
Bandeng	859	848	6	5
Udang	620	600	12	8
Jumlah	1.479	1.448	18	13

Sumber : Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2023

Tabel 3.40
Pembenihan Perikanan Dikabupaten Banggai, 2023

Jenis Pembenihan	Luas/Area (m ²)	Produksi/Siklus (ekor)
Nila, Mas, Koi, Udang, Lele	27.221	77.689.332
Lele Dumbo	30	24.000
Jumlah	27.251	77.713.332

Sumber : Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2023

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam meningkatkan sumber daya perikanan di Kabupaten Banggai.

Beberapa faktor penghambat internal antara lain:

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana penangkapan ikan khususnya pada sektor penangkapan ikan perairan umum saratan sesuai kewenangan Dinas Perikanan tentang pengelolaan perikanan umum daratan.
2. Belum optimalnya penerapan CBIB serta penggunaan benih ikan unggul (bebas penyakit, ukuran seragam) di kalangan pembudidaya ikan.
3. Belum optimalnya frekuensi pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan, baik pembudidaya ikan maupun nelayan masih rendah.
4. Perlu adanya peningkatan standar pada prosuk olahan hasil perikanan khususnya pada penanganan pasca panen dengan penerapan sistem rantai dingin pada saat penanganan maupun distribusi hasil produk perikanan.
5. Fluktuasi harga jual komoditas perikanan dalam hal ini ketidakstabilan harga khususnya pada ikan ekonomis tinggi produksi pada sektor perikanan budidaya maupun tangkap.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa Solusi yang dilakukan antara lain :

1. Pendataan, perencanaan, serta pengadaan bantuan prasarana dan sarana pengembangan sektor perikanan umum daratan.
2. Optimalisasi perairan tangkap umum daratan melalui kegiatan rehabilitasi serta restocking potensi perikanan sektor perairan umum daratan.
3. Pendataan kelembagaan dan pendataan potensi perikanan di wilayah perairan umum daratan.

4. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis manfaat penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dalam proses pembudidayaan ikan.

Untuk mencapai peningkatan produksi perikanan telah dilakukan pemberian bantuan diserahkan kepada masyarakat, yaitu :

1. Pemberiaan bantuan alat penangkapan ikan oleh dinas perikanan.
2. Peningkatan Kapasitas Nelayan dengan diadakannya Pelatihan kecakapan nelayan yang pelaksanaannya di laksanakan dengan Kementrian KKP serta di adakanya Pertemuan Teknis Perikanan Tangkap.
3. Pemberian bantuan Armada Penangkapan Ikan oleh Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Banggai.
4. Pemberian Mesin Penangkapan Ikan bagi nelayan
5. Pemberian sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan melalui Program satu juta satu pekarangan
6. Penerapan cara Budidaya Ikan baik dan Benar (CBIB) dikalangan Pembudidaya ikan
7. Penggunaan benih ikan unggul yang berkualitas, dimana benih ikan unggul sangat berpengaruh pada proses Produksi Perikanan
8. Pemberian sarana dan prasarana serta pendampingan bagi pembudidaya ikan mengenai metode budidaya ikan yang efektif dan efisien seperti metode budidaya ikan kolam terpal sistem bioflok.

Sektor peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian, juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Kabupaten Banggai baik dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, bagian dari sistem ketahanan pangan maupun penyediaan bahan baku industri.

Jenis-jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Banggai diklasifikasikan ke dalam tiga bagian yaitu :

1. Ternak besar meliputi : sapi, kerbau dan kuda
2. Ternak kecil meliputi : kambing, domba dan babi
3. Ternak unggas meliputi : ayam kampung, ayam ras, dan itik

Tabel 3.41
Persentase Populasi ternak tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan menuju Banggai Swasembada Pangan Ternak	Persentase Peningkatan Populasi ternak	%	1,06	1,83	172
	Persentase Pemenuhan Pangan Asal ternak	%	3	5,50	183

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja utama pada tahun 2023 Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Populasi Ternak mencapai target yang ditetapkan yaitu 172%. Sedangkan untuk indikator Persentase pemenuhan pangan asal ternak di tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan di tahun 2023 mencapai 183%.

Dalam upaya mencapai peningkatan produksi peternakan, dihadapi berbagai hambatan antara lain :

1. Keberadaan usaha atau unit pembibitan ternak di kabupaten banggai perlu ditingkatkan perannya.
2. Sarana dan Prasarana rumah potong hewan (RPH) dan poskeswan yang belum memadai
3. Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak (sapi, dan kambing) serta penyakit African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak babi.

Adapun Langkah-langkah untuk mencapai peningkatan produksi peternakan sebagai berikut :

1. Penyediaan Bibit Ternak yang Bermutu dan Pakan yang Berkualitas ditempuh dengan cara sebagai berikut:
 - Pengadaan Bibit Sapi Unggul dan Penerapan Prosista (Program Satu induk– Satu anak–Satu tahun). Tujuan kebijakan ini untuk mengoptimalkan produktivitas induk sapi, sehingga meningkatkan jumlah kelahiran pedet melalui IB, INKA dan TE;
 - Pengendalian dan pengawasan pengeluaran sapi bibit betina; Pengendalian dan pengawasan pemotongan sapi betina produktif. Kebijakan ini berupa

upaya pencegahan pemotongan betina produktif dari jumlah pemotongan tercatat. Kebijakan ini merupakan bagian dari cara meningkatkan jumlah induk produktif;

- Pengendalian penyakit pedet. Kebijakan ini berupa upaya pengurangan jumlah kematian pedet yang diakibatkan parasit dengan memberikan obat cacing gratis untuk pedet umur 1 sampai 6 bulan. Kebijakan ini penting karena hampir 70 persen kematian pedet diakibatkan parasit. Pengadaan Bibit ternak unggas yang unggul dalam rangka peningkatan populasi dan produksi daging dan telur unggas;
- Optimalisasi Program 1 Juta 1 Pekarangan melalui bantuan bibit ternak ayam petelur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat; Pengendalian dan pengawasan pemotongan unggas di RPU (Rumah Potong Unggas) dalam upaya penyediaan daging unggas yang ASUH;
- Pengendalian penyakit unggas secara terencana dalam upaya peningkatan produksi daging dan telur;
- Fasilitasi pengembangan dan ketersediaan usaha pakan ternak;
- Pemanfaatan Teknologi Pakan dan Limbah Pertanian, Perikanan atau Industri.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peternakan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaannya, ditempuh dengan cara:

- Peningkatan kompetensi dalam upaya peningkatan profesionalisme ASN peternakan dan kesehatan hewan.
- Optimalisasi peran penyuluh peternakan melalui sekolah lapang bagi kelompok tani-ternak.
- Pengembangan dan fasilitasi kelompok tani-ternak dengan maksud agar kelompok tani-ternak menjadi lembaga pemberdayaan dengan manajemen modern.
- Fasilitasi kerjasama dengan institusi pendukung, seperti lembaga perkreditan, lembaga penelitian dan pengembangan dan investor.

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ditempuh dengan cara:

- Peningkatan jumlah petugas keswan yang kompeten dan berdaya saing.
- Menyediakan sarana pendukung kesehatan hewan.
- Penyediaan obat-obatan dan vaksin hewan.

- Sosialisasi tentang kesehatan hewan terhadap masyarakat.
 - Pelayanan pengobatan kesehatan hewan.
 - Pengawasan lalu lintas hewan dan perdagangan ternak/hasil sampingan peternakan.
 - Pengawasan dan pelayanan pemeriksaan kesehatan ditempat-tempat pemotongan, baik di RPH, RPU, Pos Lalulintas Hewan, Pasar Hewan, dll.
 - Pelayanan pengawasan kesehatan hewan terkait daging beku di unit-unit usaha peternakan.
 - Tindakan pengebalan hewan dari penyakit melalui vaksinasi dan vitamisasi ternak.
 - Tindakan pengkarantinaan hewan, sanitasi dan desinfeksi/penyuci hamaan penyakit.
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan keswan dan Pengolahan Hasil Peternakan ditempuh dengan cara :
- Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan ternak seperti: Poskeswan, RPH (Rumah Potong Hewan), Rumah Potong Unggas (RPU), Pasar Hewan dan Lab. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 - Meningkatkan sarana dan prasarana IB (Inseminasi Buatan) dan TE (Transfer Embrio);
 - Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan hasil peternakan.
4. Peningkatan kualitas produk hasil olahan ternak dan akses pemasaran ditempuh dengan cara :
- Penerapan standar mutu olahan hasil ternak;
 - Membuka akses informasi harga dan kebutuhan pasar;
 - Meningkatkan Pengetahuan Pelaku Usaha terhadap kualitas olahan hasil ternak.

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Potensi pertambangan kabupaten banggai cukup luas dimana berdasarkan data dari cabang Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai terdapat 17 izin usaha pertambangan nikel dengan status IUP operasi produksi, namun dari jumlah tersebut baru 4 IUP yang sudah melakukan produksi yaitu PT. Penta Dharma Karsa dan PT. Prima Dharma Karsa disiuna

kemudian PT. Aneka Nusantara Nasional dan PT. Koninis Fajar Mineral di kecamatan Bunta. Potensi pertambangan lainnya adalah bahan tambang batuan yang lokasinya tersebar di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Balantak Utara, Kecamatan Pagimana, Masama, Kecamatan Nuhon, dll. Berikut data pertambangan dan pertanian Kabupaten Banggai:

Tabel 3.42
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Banggai
(miliar rupiah), 2019–2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	6.501,01	6.395,95	6.945,61	7.550,42	8.213,52
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	6.710,69	6.270,76	6.818,54	8.810,67	7.233,93

Sumber: BPS Kabupaten Banggai Tahun 2023

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Dari tabel diatas PDRB atas dasar harga berlaku untuk sektor Pertambangan di Kabupaten Banggai untuk tahun 2023 yaitu sebesar 7.233,93 (miliar Rupiah), angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan tahun 2022.

Tabel 3.43
Jenis Komoditi Unggulan Dan Sektor Andalan Kabupaten Banggai

No	Jenis TambangJenis Komoditi Unggulan	Potensi/Cadangan	Lokasi Penyebaran
1	NIKEL	14.048 Juta Ton Nico 3,6 juta Ton Belum Terukur Belum Terukur Belum Terukur	Desa Siuna Kec. Pagimana kec. bunta - kec. Nuhon kec. toili barat kec. Masama kec. Bualemo
2	PASIR BATU (SIRTU), QUARRY	Miliyaran kubik	kab. banggai
3	LEMPUNG	belum terukur	kec. bualemo, kec. masama, kec. toili, kec. bunta, kec. pagimana kec. balantak utara dan kec. bualemo

4	GAMPING	belum terukur	kec. balantak dan kec. Mantoh tersebar di kabupaten banggai
5	MARMER	belum terukur	desa saladik kec. luwuk utara, kec. luwuk timur, kec. masama, kec. toili, kec. bunta
6	GRANIT	belum terukur	desa saladik kec. luwuk utara
7	BIJI BESI	3,6 juta ton	blok siuna kec. pagimana - kec. bunta
8	LATERIT	belum terukur	kec. nuhon
9	DOLOMIT	belum terukur	kec. luwuk timur kec. pagimana

Sumber: <https://sda.aistech.id>

B. SEKTOR ANDALAN

1	NIKEL	14.048 juta ton nico	45.000 ha	2.158 ha	desa siuna kec. pagimana	1,23 - 2,93%
		3.6 juta ton	50.000 ha	8.870 ha	kec. bunta - kec. nuhon	1,45%
		belum terukur	belum terukur	12.449 ha	kec. toili barat	
		belum terukur	belum terukur	602 ha	kec. masama	
		belum terukur	belum terukur	4.534 ha	kec. bualemo	1,23 - 2,93%
2	PASIR BATU (SIRTU), QUARRY	Milyaran kubik	belum terukur	574,88 ha	kab. banggai	diameter 2 mm - 200 cm

Kabupaten Banggai mempunyai potensi sumber daya alam unggulan yaitu minyak dan gas bumi. Pengelolaan minyak dan gas Kabupaten Banggai dibagi dalam 3 (tiga) blok yaitu Blok Senoro yang dikelola oleh JOB Pertamina Medco EP Tomori Sulawesi dan Blok Matindok dan donggi dikelola oleh PT. Pertamina EP, dari blok inilah nantinya gas dihasilkan akan dikeluarkan ke LNG Plant maupun Power Plant. Blok LNG yang ada di Kabupaten Banggai adalah Blok LNG yang ke empat di Indonesia dan urutan ke enam di Asia Tenggara. Sebelumnya telah beroperasi Blok Arun LNG di Aceh, Blok Badak LNG di Kalimantan Timur dan Blok Tangguh LNG di Papua. Produksi gas dari ketiga blok tersebut dimanfaatkan oleh PT. Donggi Senoro LNG dan PT. Panca Amara Utama yang mengolah Ammonia. Selain itu gas juga akan di rencanakan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga gas oleh PLN yang akan menghasilkan listrik sebesar 40 MW

* BLOK SENORO

Potensi : - Cadangan Terbukti = 1.532 TCF (triliun kaki kubik)

- Cadangan Kemungkinan = 1.051 TCF

- Cadangan Harapan = 1.083 TCF

Lokasi : Kecamatan Batui dan Batui Selatan

Luas : Kurang lebih 6.100 Ha

Pengelola : JOB Pertamina - Medco EP Tomori Sulawesi, dengan skema hilir

* BLOK MATINDOK

Potensi : - Cadangan Terbukti = 1.532 TCF (triliun kaki kubik)

- Cadangan Kemungkinan = 1.051 TCF
- Cadangan Harapan = 1.083 TCF

Lokasi : Kecamatan Batui dan Batui Selatan

Luas : Kurang lebih 6.100 Ha

Pengelola : PT. Pertamina – MGD

Adapun faktor keberhasilan atau peningkatan pencapaian kinerja indikator kontribusi sektor pertanian, perikanan dan pertambangan terhadap PDRB antara lain adanya program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik itu program Kabupaten, Provinsi maupun Pusat/Kementerian, yang mana Pemerintah Kabupaten Banggai melaksanakan suatu program yaitu "***Satu Juta Satu Pekarangan***" yang di kelola oleh beberapa dinas terkait antara lain : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, dll.

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang sangat menentukan perekonomian kabupaten banggai, karena sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian dengan bercocok tanam, hal ini sesuai dengan data bahwa dari keseluruhan desa/kelurahan di kabupaten banggai sekitar 93,98% merupakan potensi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan.

2. Indeks Ketahanan Pangan

Dari tabel 3.32 Target RPJMD dari Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Banggai pada tahun 2023 sebesar 87,17 dan terealisasi sebesar 85,72 dengan capaian kinerja sebesar 98,34%. Dari realisasi tersebut, indikator Indeks Ketahanan Pangan belum mencapai target RPJMD di tahun 2023. Berdasarkan hasil IKP yang dirilis oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian bahwa peringkat IKP Kabupaten Banggai berada pada urutan skor terbaik ke-41 dari 416 Kabupaten Se-Indonesia.

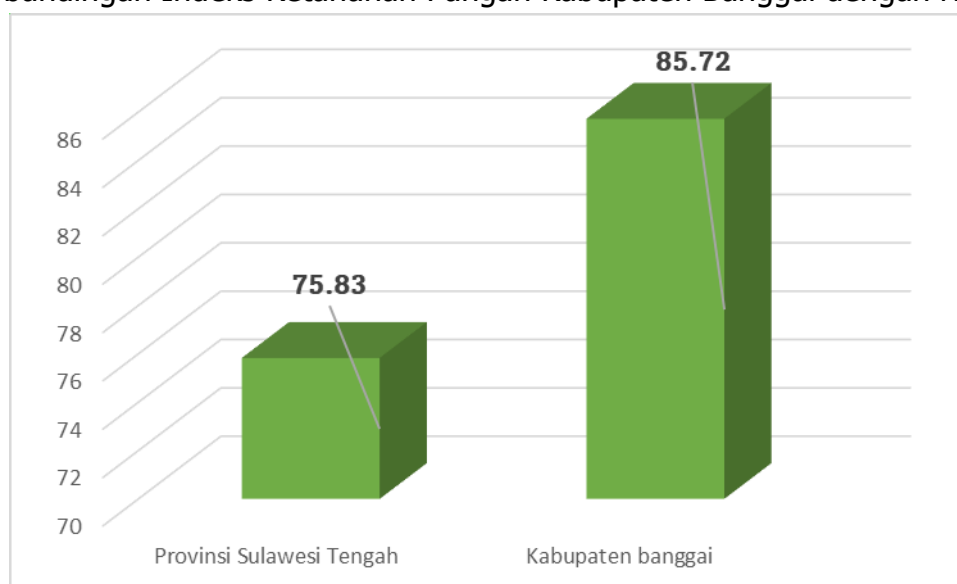
Tabel. 3.44
Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Sulawesi Tengah Tahun 2023

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN	2022				2023			
		KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- SEDIAAN	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
SULAWESI TENGAH									
301	Banggai Kepulauan	28,00	78,58	72,25	60,87	5,41	76,14	72,85	53,61
302	Banggai	95,02	89,54	75,89	85,73	93,92	90,69	75,83	85,72
303	Morowali	89,63	82,34	74,79	81,51	85,73	83,94	78,65	82,36
304	Poso	94,92	79,64	76,07	82,80	92,82	79,87	79,40	83,57
305	Donggala	85,95	75,98	66,80	75,30	84,30	73,83	62,07	72,27
306	Toli-Toli	89,98	81,52	67,96	78,64	88,20	82,93	69,59	79,18
307	Buol	92,07	81,65	76,67	82,79	91,27	80,69	78,81	83,11
308	Parigi Moutong	96,66	77,62	61,37	76,83	95,71	77,86	63,80	77,59
309	Tojo Una-Una	79,22	73,90	72,15	74,80	83,26	75,41	73,32	76,93
310	Sigi	93,46	81,86	63,36	77,94	92,45	81,75	64,77	78,17
311	Banggai Laut	0,00	76,10	68,81	50,35	0,00	75,04	70,66	50,77
312	Morowali Utara	90,80	79,44	71,08	79,50	89,19	83,11	77,07	82,52

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai

Dari Tabel 3.44, Jika di bandingkan dengan Kabupaten Lainnya, Kabupaten Banggai berada pada peringkat pertama dengan nilai indeks ketahanan Pangan sebesar 85,72. Dan jika di bandingkan dengan Indeks ketahanan pangan provinsi Sulawesi Tengah, nilai IKP Kabupaten Banggai masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKP provinsi Sulawesi Tengah.

Grafik 3.20
Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai dengan Nasional



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional ahun 2023

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP disusun oleh BKP, Dimana nilai IKP merupakan bagian dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (***Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA***). Perhitungan IKP berdasarkan 9 indikator untuk wilayah kabupaten dan 8 indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan) dan memberikan gambaran peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah. Indeks ketahanan pangan berdasarkan atas tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan.

a. Aspek Ketersediaan Pangan

Aspek ketersediaan pangan didasarkan indikator Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu, serta stok beras pemerintah daerah. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki cadangan pangan di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras sedangkan Kabupaten Banggai target cadangan pangan sebanyak 20 ton, yang berarti cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Banggai masih jauh dari target nasional yaitu 100 ton. Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Dengan demikian penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang melalui :

1. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) melalui komunikasi, informasi, edukasi (penyuluhan di tingkat lapangan, lomba cipta menu B2SA, dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik)
2. Upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumber daya lokal
3. Peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga.

Tabel 3.45
Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Banggai, 2023

No	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH Kab. Banggai	Skor PPH Maksimal
1	Padi-Padian	25,0	25,0
2	Umbi-Umbian	1,8	2,5
3	Pangan Hewani	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	0,1	5,0
5	Buah/Biji berminya	1,0	1,0
6	Kacang-Kacangan	8,4	10,0
7	Gula	0,3	2,5
8	Sayuran dan Buah	3,3	30,0
Jumlah		63,33	100,0

Sumber : Neraca Bahan Makanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Tahun 2023

Tabel 3.46
Angka Kecukupan Energi dan Protein Kabupaten Banggai, 2023

No	Ketersediaan	Tahun 2023	Nasional
1	Energi (kkal/kapita/hari)	7.400	2.400
2	Protein (gram/kapita/hari)	217,22	63

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai, 2023

Tabel 3.47
Cadangan Pangan Kabupaten Banggai, 2023

No	Uraian	Kabupaten Banggai tahun 2023	Permentan No. 11 tahun 2018
1	Cadangan Pangan Kabupaten	0 ton	110.04 ton

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Banggai, 2023

Tabel 3.48
Perbandingan Skor PPH Konsumsi Kabupaten Banggai dengan
Target Nasional, 2023

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Skor PPH Konsumsi Kabupaten Banggai	82,8	77,9	83,8
2.	Skor PPH Konsumsi Target Nasional	90,8	92,9	

Berdasarkan tabel 3.48 Skor PPH Konsumsi Kabupaten Banggai selama periode RENSTRA tahun 202-2023 masih berada di bawah target nasional. Kondisi ini dikarenakan konsumsi masyarakat masih kurang beragam, yang ditujukan dengan masih tingginya konsumsi padi-padian, dan rendahnya konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, serta umbi-umbian. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

- 1) Perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi.
- 2) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).
- 3) Kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu.
- 4) Berbagai produk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior.
- 5) Belum maksimalnya kerjasama lintas sektor serta lemahnya partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang melalui :

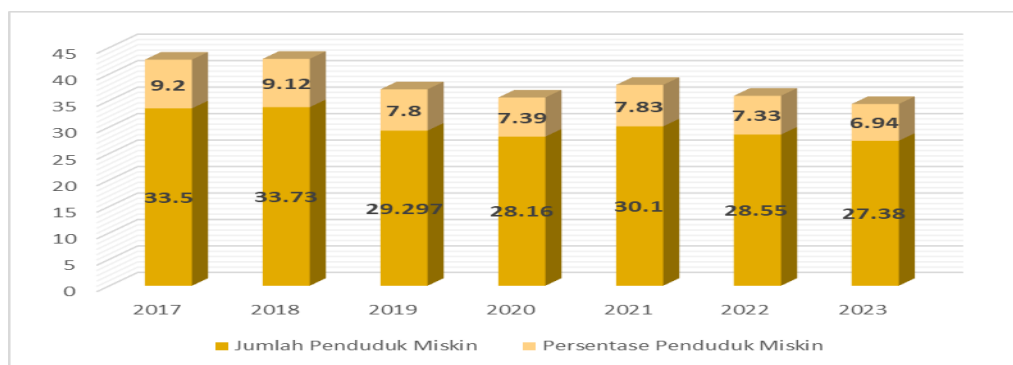
- 1) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) melalui komunikasi, informasi, edukasi (penyuluhan di tingkat lapangan, lomba cipta menu B2SA, dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik).
- 2) Upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumber daya lokal.
- 3) Peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga.

Upaya diatas merupakan daya ungkit yang cukup besar dalam meningkatkan skor PPH Konsumsi

b. Aspek Keterjangkauan Pangan

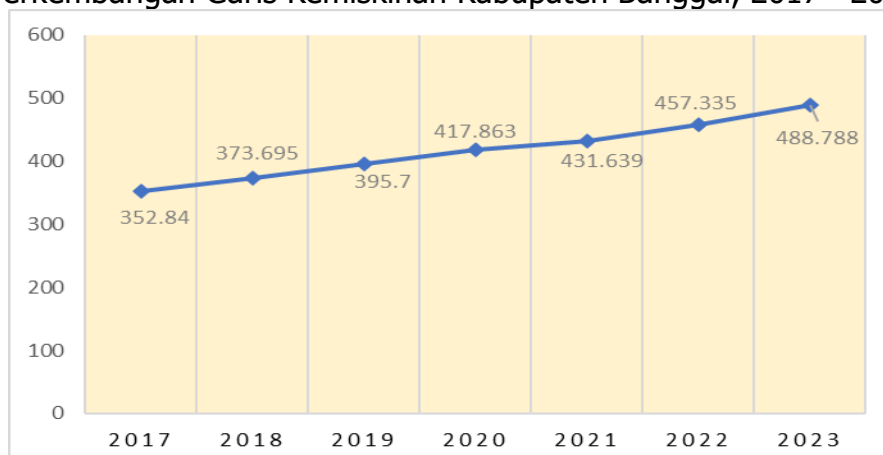
Aspek keterjangkauan/akses pangan didasarkan indikator persentase penduduk dibawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, dan persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Indikator ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan.

Grafik 3.21
Jumlah & Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banggai, 2014-2023



Sumber : BPS Kabupaten Banggai Tahun 2023

Grafik 3.22
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Banggai, 2017—2023

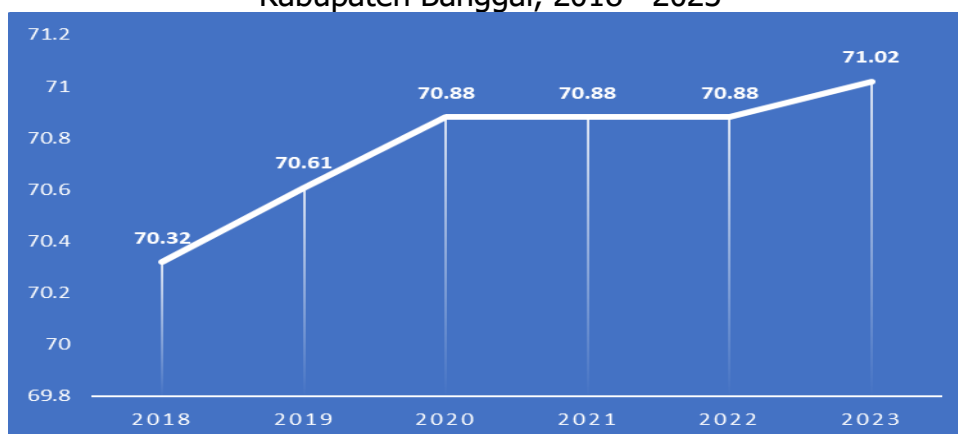


Sumber : BPS Kabupaten Banggai Tahun 2023

c. Aspek Pemanfaatan Pangan

Aspek pemanfaatan pangan didasarkan indikator rata-rata lama sekolah perempuan berusia diatas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita stunting, dan angka harapan hidup pada saat lahir. Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Angka harapan hidup merupakan salah satu dampak dari status kesehatan di suatu wilayah. Meningkatnya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan kualitas konsumsi dan kesehatan ibu hamil, status kesehatan secara fisik dan psikis masyarakat pada umumnya, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Grafik 3.23
Perkembangan Angka Harapan Hidup
Kabupaten Banggai, 2018—2023



Sumber : BPS Kabupaten Banggai (2023)

Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Banggai pada tahun 2023 antara lain:

1. Terjadinya fluktuasi harga pangan yang mengakibatkan inflasi beberapa komoditi pangan strategis;
2. Budaya masyarakat yang menganggap "belum makan bila belum makan nasi";
3. Masih rendahnya tingkat keberagaman (diversifikasi) konsumsi pangan Masyarakat;
4. Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian (perumahan, industri, dll);
5. Belum teridentifikasinya Penduduk Rawan Pangan;
6. Degradasi sumber daya lahan dan air;

7. Bencana alam badai El Nino di sepanjang tahun 2023 mengakibatkan kemarau Panjang.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut melalui:

1. Gelar Pangan murah/Pasar Murah
2. Meningkatkan peran BUMD/ Koperasi atau badan lainnya untuk menyerap hasil produksi petani pada saat panen;
3. Meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur pangan di daerah;
4. Meningkatkan promosi dan sosialisasi pola konsumsi dan beragam, bergizi, sehat dan aman (B2SA) ke semua lapisan Masyarakat;
5. Penguatan kelembagaan dan SDM pengawas mutu pangan; (8) Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya local;

Penajamaan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Lokasi) sebagai bahan pengambil kebijakan dalam pengentasan daerah rawan pangan

Adapun program yang mendukung sasaran "Meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat" adalah :

Tabel 3.49

Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah

No	Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	46.049116.840,00	43.944.119.813,00	95,43
2	Penyediaan Dan Pengembangan prasarana Pertanian	24.126.911.601,00	23.343.061.185,00	94,75
3	Perizinan Usaha Pertanian	76.862.700,00	46.809.200,00	60,90
4	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	387.852.550,00	369.773.430,00	95,34
5	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	804.042.930,00	530.038.863,00	65,92
6	Pengelolaan perikanan tangkap	4.695.914.744,00	4.615.128.876,00	98,28
7	Pengelolaan perikanan budidaya	4.651.321.152,00	4.383.511.566,00	94,24

8	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	779.393.000,00	722.490.592,00	92,70
9	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	1.279.999.080,00	1,270,334,506,00	99,24
10	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	377.303.152,00	367.442.842,00	97,38
11	Penanganan kerawanan pangan	884.207.290,00	778.287.715,00	92,19
12	Pengawasan keamanan pangan	300.552.282,00	276.786.230,00	83,73
13	Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan	39.000.000,00	34.471.500,00	88,39
14	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	119.99.882,00	118.945.72,00	99,12
15	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	101.799.410,00	99.628.900,00	97,87
16	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	115.503.860,00	148.868.200,00	97,73
17	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.279.999.080,00	1.270.334.506,00	99,24
18	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	7.148.990,00	6.503.990,00	90,97
	Jumlah	85.956.928.661,00	80.937.257.408,00	94,16

Sumber : Dinas TPHP, Dinas Peternakan dan Kewan, Dinas Perikanan, Dinas Ketapang, Kab.Banggai 2022, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2023

Tingkat efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah dengan 2 (dua) indikator, yaitu : indikator Kontribusi Sektor Pertanian, perikanan dan pertambangan terhadap PDRB memperoleh capaian sebesar 119,69%, dan indikator Indeks ketahanan pangan memperoleh capaian sebesar 98,34%, sehingga rata-rata capaian dari kedua indikator sasaran tersebut adalah sebesar 109,02% kategori “baik sekali”. Adapun pagu anggaran untuk sasaran Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian,

Perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah sebesar Rp. 85.956.928.661,00 dengan realisasi Rp. 80.937.257.408,00 diperoleh serapan sebesar 94,16%, sehingga dapat terlihat bahwa perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran terdapat efisiensi sebesar 14,86% dan efektivitas sebesar 115,78%.

Tabel. 3.50
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim Untuk Kesejahteraan Rakyat

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,418	79,20	98,48	81,218	77,75	95,73	83,618	92,98
Rata-rata capaian kinerja				98,48			95,73		92,98

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Banggai (data diolah)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banggai. IKLH difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. IKLH menggambarkan kondisi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan pada Kabupaten Banggai yang pengukurannya dilakukan pada setiap tahunnya. Kualitas air diukur pada sungai, kualitas udara diukur pada kawasan perumahan, transportasi, industri, dan perkantoran, sedangkan kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan indeks tutupan lahan.

Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Dari tabel 3.50 di atas terlihat bahwa realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 yaitu sebesar 77,75 dengan target RPJMD pada tahun 2023 yaitu sebesar 81,218, sehingga diketahui bahwa realisasi indeks kualitas lingkungan hidup belum mencapai target RPJMD pada tahun 2023. Nilai IKLH Kabupaten Banggai

tahun 2023 masuk dalam kategori “**Baik**”, dengan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Indikator Kinerja indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2023 yaitu sebesar 95,73%. Realisasi IKLH Kabupaten Banggai tahun 2023 sebesar 77,75 mengalami penurunan sebesar 1,45 point jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 79,20 dan jika dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 77,75 dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 83,618 diperoleh capaian sebesar 92,98.

Pada tabel dibawah ini menunjukkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Vegetasi Hutan/Lahan Serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai :

Tabel 3.51
Indeks Kualitas Air

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Titik				Nilai Indeks Per Mutu				IKA
		Meme nuhi	Ring an	Seda ng	Berat	Meme nuhi	Ring an	Seda ng	Berat	
1	Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah	29	6	0	0	58,00	8,57	0,00	0,00	66,57

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Tabel 3.52
Indeks Kualitas Udara

No	Kabupate/ Kota	Perhitungan Indeks					IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rataan	
		NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	INDEKS	
1	Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah	9,83	9,06	0,25	0,45	0,35	86,14

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Tabel 3.53
Indeks Kualitas Lahan/Vegetasi Hutan

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah	0,64	81,42	0,00	0,64121260944869	81,42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Tabel 3.54
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banggai, 2023

No	Kabupaten/ Kota	Provinsi	IKA	IKU	IKL	IKLH	Rating
1	Kabupaten Banggai	Sulawesi Tengah	66,57	86,14	81,42	77,75	BAIK

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Kabupaten Banggai mendapatkan nilai IKLH sebesar 77,75 pada kategori (BAIK) dengan rincian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 66,57, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 86,14, dan Indeks Kualitas Vegetasi Hutan/Lahan (IKL) sebesar 81,42.

Formulasi perhitungan IKLH adalah sebagai berikut :

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219\% \times \text{IKTL}) \\
 &= (0,376 \times 66,57) + (0,405 \times 86,14) + (0,219 \times 81,42) \\
 &= 77,75
 \end{aligned}$$

Keterangan :

IKA = Indeks Kualitas Air

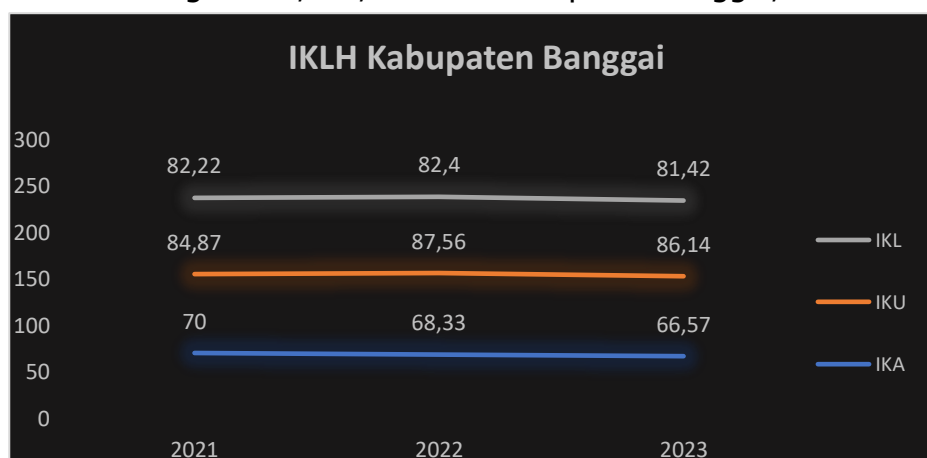
IKU = Indeks Kualitas Udara

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Untuk IKA memiliki 8 (Delapan) parameter yaitu pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total Phospat dan Fecal Coliform. IKU memiliki 2 (dua) parameter yaitu NO₂ dan SO₂, serta IKL memiliki 2 (dua) parameter yaitu parameter pertama adalah Tutupan Vegetasi Hutan yang terdiri dari Hutan Lahan Kering Primer (HLKP), Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS), Hutan Mangrove Primer (HMP), Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS), Hutan Rawa Primer (HRP), Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS) dan Hutan Tanaman, kemudian yang parameter kedua adalah Tutupan Vegetasi Non Hutan yang terdiri dari Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung Lahan dengan kemiringan >25%, sempa dan sungai, pantai dan danau, RTH yang terdiri

dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL).

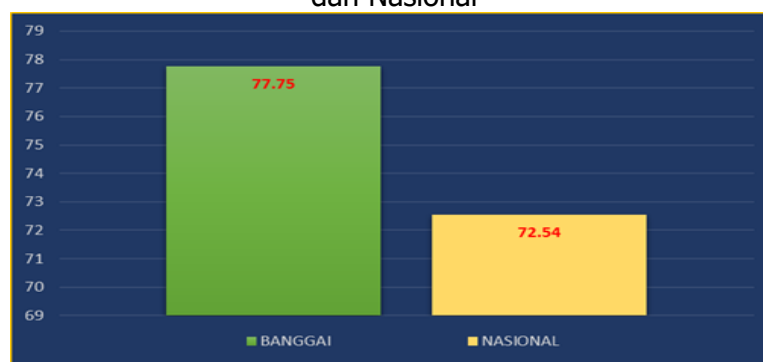
Grafik 3.24
Perbandingan IKA,IKU, dan IKL Kabupaten Banggai, 2021-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Dari grafik 3.24 terlihat bahwa penurunan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Banggai tahun 2023 di bandingkan tahun 2022 di picu oleh penurunan nilai IKA, IKU dan IKL. Penurunan tersebut disebabkan karena dinamika lingkungan dengan meningkatnya jumlah penduduk, perilaku penduduk. Untuk menghindari menurunnya angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai dibutuhkan peran serta semua pihak baik pemerintah daerah dan masyarakat dalam melindungi dan mengelola lingkungan.

Grafik 3.25
Perbandingan IKLH Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

IKLH kabupaten Banggai tahun 2023 sebesar 77,75 lebih tinggi sebesar 5,1 point dibandingkan realisasi IKLH Indonesia tahun 2023.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup antara lain :

1. Bertambahnya aktivitas usaha Pertambangan di Kabupaten Banggai, seperti pencemaran limbah nikel di air laut; aktivitas pertambangan juga membuat alih fungsi hutan dimana area resapan air pun ikut berkurang, karena itu air hujan meluncur bebas dari tempat tinggi ke rendah (sungai) yang menyebabkan pencemaran air dan banjir
2. Meningkatnya ancaman kerusakan lingkungan hidup oleh berbagai aktivitas
3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
4. Kelembagaan dan penegakan hukum di bidang SDA dan Lingkungan Hidup masih belum konsisten.
5. Peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah.
6. Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca tidak di implementasikan dengan optimal.
7. Pengelolaan sampah perkotaan belum berbasis masyarakat dengan pendekatan Reduce, Reuse dan Recycle.

Upaya untuk meningkatkan tercapainya IKLH, maka perlu langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengurangi emisi gas buang pengguna kendaraan bermotor
- b. Pemantauan dan pengawasan terhadap industry dan usaha/kegiatan yang menghasilkan emisi udara
- c. Penanaman pohon secara berkelanjutan sehingga dapat mengurangi dampak polusi.
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bank sampah dan pelanggannya.
- e. Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan IPAL di perusahaan-perusahaan maupun fasilitas pelayanan kesehatan.
- f. Melakukan pemantauan kualitas air secara rutin dan berkala
- g. Penetapan wilayah hutan kota agar tidak mudah dialihfungsikan untuk penggunaan yang lain.
- h. Menambah luasan Ruang Terbuka Hijau.
- i. Peningkatan edukasi ke berbagai pihak akan pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan.

Adapun solusi pemecahan masalah, adalah sebagai berikut :

- a. Perlu ditingkatkan pengawasan, pembinaan/sosialisasi bagi kegiatan/usaha dalam

hal melaksanakan dan melaporkan dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air dan udara serta pengelolaan limbah B3 sebagai upaya pengendalian pencemaran dan perlindungan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Banggai.

- b. Perlu segera penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah.
- c. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat pengelolaan sampah melalui Diklat, Bimtek, Workshop dan Sosialisasi.
- d. Diperlukan pembinaan/sosialisasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- e. Pembinaan teknis bagi penyusunan laporan RKL-RPL secara kontinyu dan berkelanjutan.
- f. Pemberian penghargaan bagi industri dengan laporan RKL-RPL terbaik.
- g. Melaksanakan inventarisasi data dan pembinaan secara kontinyu bagi industri penghasil limbah B3 di Kabupaten Banggai.

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang telah dicapai, diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai.

Adapun program yang mendukung sasaran "Meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat" adalah :

Tabel 3.55

Program yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat

No	Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	875.813.000,00	859.655.610,00	98,16
2	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.322.105.711,00	1.385.871.749,00	41,72
3	Pengembangan sistem informasi/data	3.089.913.622,00	2.839.631.694,00	91,90
4	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	60.004.165,00	51.276.165,00	85,45
5	pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang	88.824.100,00	72.295.455,00	81,39

	terkait dengan PPLH			
6	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	17.999.800,00	14.858.800,00	82,55
7	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	49.997.350,00	31.199.850,00	62,40
8	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	9.999.900,00	7.935.900,00	79,36
9	pengelolaan persampahan	10.325.837.650,00	9.786.261.717,00	94,77
10	Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	339.064.900,00	158.883.351,00	46,86
	Jumlah	18.179.560.198,00	15.207.870.291,00	83,65

Sumber : DLH Kab.Banggai, 2023

Dari program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas tata ruang, lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan rakyat, dengan capaian kinerja sasaran tersebut mencapai 95,73% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 15.207.870.291,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 18.179.560.198,00 atau sebesar 83,65%, sehingga dapat terlihat bahwa perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran terdapat efisiensi sebesar 12,08% dan efektivitas sebesar 114,44%.

Tabel. 3.56
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	2,37	0,30	12,66	2,56	0,33	12,89	3,10	10,65
Rata-rata capaian kinerja				12,66			12,89		10,65

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai

Dari tabel 3.56 Target RPJMD dari Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB di Kabupaten Banggai pada tahun 2023 sebesar 2,56% dan terealisasi sebesar 0,33%, dengan capaian kinerja sebesar 12,89% sehingga dapat dikatakan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB mengalami kenaikan sebesar 0,23 point dan tidak

mencapai target RPJMD tahun 2023 sebesar 2,56. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diperoleh capaian sebesar 10,65%

Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pariwisata juga salah satu sektor yang paling pesat pertumbuhannya. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kabupaten Banggai memiliki destinasi wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan, dengan mulai memprioritaskan upaya pengembangan pariwisata menjadi salah satu prioritas daerah. Upaya ini dilakukan secara terpadu dan terintegrasi lintas perangkat daerah, yang di fokuskan pada upaya 1) pengembangan destinasi wisata, 2) pengembangan industri pariwisata, 3) pengembangan pemasaran pariwisata, dan 4) pengembangan kelembagaan pariwisata.

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB dapat dilihat dari sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yang didukung dengan adanya kunjungan wisatawan, jumlah restoran. Penyediaan Akomodasi merupakan Penyediaan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha Penyediaan Akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya. Hotel terdiri dari Hotel Berbintang dan Non Bintang.

Tabel. 3.57

Daftar dan Jumlah Akomodasi di Kabupaten Banggai Per Kecamatan, 2022-2023

Kecamatan <i>District</i>	2022			2023		
	Akomodasi Accommodations	Kamar Rooms	Tempat Tidur Beds	Akomodasi Accommodations	Kamar Rooms	Tempat Tidur Beds
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Toili	23	325	440	23	325	440
Toili Barat	6	39	49	6	39	49
Moilong	2	18	25	2	18	25
Batui	-	-	-	-	-	-
Batui Selatan	-	-	-	-	-	-
Bunta	10	95	180	10	95	180
Nuhon	-	-	-	-	-	-
Simpang Raya	-	-	-	-	-	-
Kintom	-	-	-	-	-	-
Luwuk	33	619	815	33	619	815
Luwuk Timur	-	-	-	-	-	-
Luwuk Utara	-	-	-	-	-	-
Luwuk Selatan	11	179	206	11	179	206
Nambo	-	-	-	-	-	-
Pagimana	7	45	66	7	45	66
Bualemo	1	8	13	1	8	13
Lobu	-	-	-	-	-	-
Lamala	1	3	3	1	3	3
Masama	5	16	18	5	16	18
Mantoh	-	-	-	-	-	-
Balantak	1	5	5	1	5	5
Balantak Selatan	1	17	27	1	17	27
Balantak Utara	1	5	5	1	5	5
Banggai	102	1374	1852	102	1374	1852

Sumber: BPS Kabupaten Banggai Tahun 2023

Tabel 3.58

Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang tersedia pada Hotel Berbintang dan Non Bintang, Penginapan, Home Stay, Losmen, Cottage, Guest House, Wisma di Kabupaten Banggai Tahun 2023

No	Akomodasi	Kamar
1	Hotel Santika	77
2	Hotel Aston/Estrella	92
3	Hotel Swiss Bel In	102
4	Hotel Dinasty	35
5	Hotel Imperial	22
6	Hotel Rosalina	24
7	Hotel Grand Soho	39
8	Green Hotel	29
9	Hotel Karathon	32
10	Hotel Ramayana	35
11	Hotel Igora	27
12	Hotel Permai	33

13	Hotel Melati	9
14	Hotel Citra	36
15	Hotel Gemilang	22
16	Hotel Kota	26
17	Hotel Erni	5
18	Hotel Sadar Stay	24
19	Hotel Ananda	8
20	Hotel Ebony	10
21	Wisma Selebes	18
22	Hotel Boulevard	24
23	Penginapan Orchid	19
24	Penginapan Taiyo	19
25	Losmen Ashari	12
26	Penginapan Senang Hati	13
27	Penginapan Baru	10
28	Wisma Azhari	20
29	Hotel Ceria	15
30	Penginapan Garuda	19
31	Losmen Pulau Bokan	12
32	Losmen Cahaya Wulan	5
33	Penginapan Srikandi	3
34	Penginapan Sabar	3
35	Penginapan Waraswati	6
36	Penginapan Ester	9
37	Cakrawala Hotel	21
38	Losmen Duta	5
39	Penginapan Pelangi	18
40	Grand City	9
41	Hotel Udhi Arta	14
42	Penginapan Andika Wahyu	15
43	Hotel Estrella	19
44	Penginapan Valentine	5
45	Penginapan D'Vila	10
46	Hotel King Amir	34
47	Resort Tompotika	5
48	Penginapan Moro Seneng	9
49	Penginapan Baruga	23
50	Penginapan B & B	9
51	Penginapan Salota	10
52	Penginapan D'Cost	8
53	Amy Home Stay	10
54	Dx Home Stay	10
55	Penginapan Aladin	10
56	Penginapan Anggrek	5

Sumber : Dinas Pariwisata Kab.Banggai (2023)

Pada tabel dibawah ini menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kabupaten Banggai pada tahun 2023, yaitu :

Tabel 3.59
Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Dan Mancanegara, 2023

BULAN	WISNUS	WISMAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Januari	10,801	8	10,809
Pebruari	1,983	9	1,992
Maret	2,145	6	2,151
April	265	18	283
Mei	253	7	260
Juni	222	2	224
Juli	1,852	2	1,854
Agustus	100,742	82	100,824
September	3,014	6	3,020
Oktober	2,225	14	2,239
November	3,150	6	3,156
Desember	1,583	6	1,589
Jumlah	128,235	166	128,401

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai tahun 2023

Wisatawan mancanegara (wisman) ialah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun (12 bulan). Sedangkan wisatawan Nusantara ialah setiap pengunjung yang datang dari seluruh penjuru Nusantara, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi.

Kabupaten Banggai terkenal dengan berbagai keindahan alamnya. Keindahan alam ini dijadikan Pemerintah Kabupaten Banggai menjadi potensi penarik wisatawan untuk berkunjung. Destinasi wisata yang ada di Kabupaten Banggai merupakan kekayaan alam yang patut dibanggakan, dan setiap lokasi kunjungan wisata diharapkan mempunyai keunikan dan berdaya saing terhadap daerah lain yang memiliki kesamaan nilai kualitas objek wisata sehingga menarik minat wisatawan untuk

mengunjunginya. Kabupaten Banggai memiliki beberapa objek wisata yang potensial dan tidak kalah indahnya dengan daerah lain, namun masih banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang belum mengetahuinya karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara mengembangkan objek wisata.

Salah satu yang dicari wisatawan adalah kuliner daerah wisata. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Banggai untuk membuka peluang usaha rumah makan atau restoran. Pada tabel dibawah ini menunjukkan Jumlah rumah makan/restoran menurut kecamatan di Kabupaten Banggai pada tahun 2019-2023, yaitu :

Tabel 3.60
Jumlah Rumah Makan/Restoran menurut Kecamatan
di Kabupaten Banggai Tahun 2019-2023

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
Toili	1	2	3	22	22
Toili Barat	9	11	9	9	9
Moilong	1	0	0	24	24
Batui	3	3	4	9	9
Batui Selatan	-	0	2	11	11
Bunta	2	9	7	7	7
Nuhon	-	0	10	10	10
Simpang Raya	-	0	0	-	-
Kintom	-	0	0	-	-
Luwuk	56	119	90	126	127
Luwuk Timur	-	4	5	7	8
Luwuk Utara	-	16	10	26	26
Luwuk Selatan	10	64	75	165	171
Nambo	-	1	4	4	4
Pagimana	7	27	10	10	11
Bualemo	-	4	0	4	4
Lobu	-	0	2	2	2
Lamala	2	0	0	-	-
Masama	2	12	12	12	12
Mantoh	-	0	0	-	-
Balantak	2	0	3	-	-
Balantak Selatan	-	0	0	-	-
Balantak Utara	-	0	2	-	-
Jumlah	95	272	248	446	457

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Dalam Angka 2023 (Data Diolah)

Jumlah keseluruhan rumah makan/restoran di Kabupaten Banggai adalah 457 unit. Lokasi terbanyak rumah makan/restoran berada di Kecamatan Luwuk Selatan yaitu

171 unit, disusul Kecamatan Luwuk Selatan sebanyak 127 unit, Luwuk Utara 26 unit, serta Kecamatan Moilong Barat sebanyak 24 unit.

Tabel 3.61
Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur yang Tersedia Pada Hotel Nonbintang Menurut Kecamatan, 2022-2023

Kecamatan <i>District</i>	2022			2023		
	Akomodasi Accommodations	Kamar Rooms	Tempat Tidur Beds	Akomodasi Accommodations	Kamar Rooms	Tempat Tidur Beds
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Toili	23	325	440	23	325	440
Toili Barat	6	39	49	6	39	49
Moilong	2	18	25	2	18	25
Batui	-	-	-	-	-	-
Batui Selatan	-	-	-	-	-	-
Bunta	10	95	180	10	95	180
Nuhon	-	-	-	-	-	-
Simpang Raya	-	-	-	-	-	-
Kintom	-	-	-	-	-	-
Luwuk	33	619	815	33	619	815
Luwuk Timur	-	-	-	-	-	-
Luwuk Utara	-	-	-	-	-	-
Luwuk Selatan	11	179	206	11	179	206
Nambo	-	-	-	-	-	-
Pagimana	7	45	66	7	45	66
Bualemo	1	8	13	1	8	13
Lobu	-	-	-	-	-	-
Lamala	1	3	3	1	3	3
Masama	5	16	18	5	16	18
Mantoh	-	-	-	-	-	-
Balantak	1	5	5	1	5	5
Balantak Selatan	1	17	27	1	17	27
Balantak Utara	1	5	5	1	5	5
Banggai	102	1374	1852	102	1374	1852

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Dalam Angka 2023

Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi yang ada di Kabupaten Banggai dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata seluruhnya berjumlah 102 unit. Jumlah

akomodasi terbanyak berada di Kecamatan Luwuk yaitu sebanyak 33 unit dan kecamatan Toili sebanyak 23 Unit.

Selain wisata kuliner salah satu yang dicari wisatawan berkunjung ke Kabupaten Banggai adalah wisata alam serta budayanya yang beragam dan mempesona. Berikut daftar tempat wisata yang ada di Kabupaten Banggai:

Tabel 3.62
Wisata Alam, Budaya Dan Buatan, Bahari/Tirta yang ada di Kabupaten Banggai

No	Wisata Alam, Budaya Dan Buatan, Bahari/Tirta	Alamat
1	Pilawean (Wisata Alam)	Desa Salodik Kec. Luwuk Utara
2	Upacara Adat Tumpe (Wisata Budaya)	Kecamatan Batui
3	RTH Teluk Lalong (Wisata Buatan)	Kecamatan Luwuk
4	Permandian Sandakan (Wisata Alam)	Desa Biak Kec. Luwuk Utara
5	Air terjun Dendengan	Desa Koyoan Kec. Nambo
6	Bukit Teletabis	Desa Lumpoknyo Dusun 3 Keles
7	Air Terjun Piala	Kelurahan Hanga-hanga Kec. Luwuk Selatan
8	Danau Makapa	Desa Mekar sari Kec. Toili Barat
9	Padang Savana Lenyek	Desa Lenyek Kec. Luwuk Utara
10	Permandian Dondo	Desa Donda Kec. Balantak Selatan
11	Keles Hills	Desa Lumpoknyo Dusun 3 Keles
12	Pantai Kilo 5	Jl. Moh. Hatta Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan
13	DTW Pulo Dua	Desa Kampangar Kec. Balantak Utara
14	Pantai Bajo Sinorang	Desa Sinorang Kec. Batui Selatan
15	1000 Pinus Minahaki	Desa Minahaki Kec. Moilong
16	Pulau Tinalapu	Desa Jaya Bakti Kec. Pagimana
17	Pulau Dondolang	Desa Balai Gondi Kec. Pagimana
18	Pulau Balean	Kec. Luwuk Timur
19	Pantai Makatata	Desa Sisipan Kec. Batui
20	Pantai Pandan Wangi	Desa Pandan Wangi Kec. Toili Barat
21	Pulo Dalaga	Desa Dalagan Kec. Nuhon
22	Pulo Basumpelan	Desa Kota Baru Kec. Lamala
23	Pulo Ampat	Desa Taima Kec. Bualemo
24	Air Toiba	Desa Toiba Kec Bualemo
25	Pulau Poola	Desa Tikupon Kec. Bualemo
26	Bukit Inspirasi (Wisata Tirta)	Kelurahan Kaleke Kec. Luwuk
27	Teluk Ondoliang	Desa Ondoliang Kec. Balantak Utara

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun 2023

Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, yaitu :

1. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan yang aman dan nyaman bagi wisatawan serta sumber daya manusia pengelola pariwisata.
2. Mengoptimalkan media sosial sebagai sarana promosi, informasi dan pemasaran pariwisata
3. Mengotimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata.
4. Peningkatan kreativitas, kras, atraksi dan inovasi destinasi pariwisata serta fasilitas pendukung destinasi pariwisata.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah”, yaitu:

Tabel 3.63

Program yang mendukung sasaran Meningkatkan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah

No	Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.536.284.941,00	1.309.499.845,00	85,24
2	Pemasaran Pariwisata	1.281.624.400,00	1.090.886.717,00	85,12
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	304.827.500,00	288.823.302,00	94,75
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	753.253.535,00	651.184.475,00	86,45
	Jumlah	3.875.990.376,00	3.385.013.339,00	87,33

Sumber : Dinas Pariwisata Kab.Banggai, 2023

Dari program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran Meningkatkan Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah, dengan capaian kinerja sasaran tersebut mencapai 12,89% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 3.385.013.339,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.875.990.376,00 atau sebesar 87,33%.

Tabel. 3.64
 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9
 Meningkatkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui
 Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	48,11	23,04	47,89	50,16	28,28	56,38	56,31	50,22
	Rata-rata capaian kinerja				47,89			56,38		50,22

Sumber : Disdikbud, Dispar, DP2KBP3A

Dari tabel 3.64 Target RPJMD dari indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada tahun 2022 sebesar 48,11 dan terealisasi sebesar 23,04, dengan capaian kinerja sebesar 47,89% sehingga dapat dikatakan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tidak mencapai target RPJMD tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD diperoleh capaian sebesar 40,92%.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) diukur pada 7 (tujuh) dimensi yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender.

Proses penghitungan IPK ini didukung oleh data-data dari Lembaga terkait lainnya, sehingga memenuhi 7 dimensi IPK. Akan tetapi indikator penyusunan IPK di batasi pada dimensi yang menjadi wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dikarenakan ketersediaan data penyusunan IPK Kabupaten Banggai tahun 2022 memerlukan data terbaru, yaitu data 2022 yang bersumber dari BPS atau Lembaga lain. Namun ketersediaan data tersebut belum memadai, sehingga akan sulit untuk melakukan penghitungan.

Saat ini capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Banggai dihitung berdasar representasi dari prosentase capaian dari indikator yaitu : indikator ekonomi budaya, indikator pendidikan, indikator warisan budaya, indikator gender, dan budaya literasi.

Dimensi pertama, ekonomi budaya menunjukkan penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan, dapat direpresentasikan dari jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pertunjukan seni berjumlah 1.343 orang dari jumlah penduduk Kabupaten Banggai 372.002 jiwa atau 0,36%.

Tabel 3.65
Komunitas Seni Pertunjukan
Kabupaten Banggai Tahun 2023

NO.	Nama Sanggar Seni	Pimpinan Sanggar	Alamat	Jumlah Anggota	Tahun Berdiri	No. SK Bupati/ Gubernur/ Pusat
1	2		3	4	5	6
1	Sanggar Seni Maleo	Olden Liong None A.Mpd	Kec. Luwuk	30 orang	4 Oktober 2000	
2	Komunitas Seni Rompong	Subrata Kalape, S.Sn	Jl. Pulau Sumatera Kel. Simpong Kec. Luwuk	120 orang	1 April 2005	Akte Notaris No. 31 Tgl 30 Desember 2013
3	Bengkel Teater Cahaya	Maryati YS. Tapo	Jl. Yos Sudarso No.55 Kel. Karathon Kec. Luwuk	60 orang	19 Januari 2006	556/08/DISBUD PAR/2009
4	Lab. Art Polabotan	Lilia Djano	Jl. Dewi Sartika Kel. Karathon Kec. Luwuk	98 orang	2006	
5	Animo Tampurung	Pandi	Kec. Luwuk	15 orang		
6	Okulele	Santi, MA	Kec. Luwuk	10 orang		
7	Sanggar Seni Lintang	Amalia Laise	Jl. S. Sadang No. 03 Kel. Soho Kec. Luwuk	50 orang	2007	Akte Notaris No. 32 Tgl 30 Desember 2013
8	Sanggar Perina	Hj. Ulfa Kasim	Jl. Sultan Hasanuddin No. 53 Kec. Luwuk		1987	
9	Studio Seni Budaya Banggai	Suparman Tampuyak	Jln. Datu Adam No.23 Kel. Luwuk, Kec. Luwuk	10 orang	5 Mei 2006	Akte Notaris No. 30 Tgl 30 Desember 2013
10	Babasal Mombasa	Sitti Qomar	Jl. Tj. Jepara No. 39A Kel. Karathon Kec. Luwuk	25 orang	2016	
11	Sanggar Teater Athena	Ikbil Maulana Aziz	Jl. Pulau Seram Kel. Kompo, Kec. Luwuk Selatan	10 Orang	4 Agustus 2020	
12	Seni Babasal	Siti M. Maulana, S.Pd	Kel. Kilongan Permai Kec. Luwuk Utara	60 orang	10 Januari 2006	
13	Komunitas Karambangan	Hanis Sidalis	Desa Biak Kec. Luwuk Utara	6 orang		
14	Komunitas Silat	Lauba	Desa Lauwon Kec. Luwuk Timur	15 orang	1998	
15	Tea' Eku	Bpk Beni Diktus Bapa	Desa Melino Kec. Luwuk Timur	20 orang	1998	

16	Zombie (Zona Orientasi Muda Berinspirasi Inovatif & Edukatif)	Jerry Arianto Mahmud	Nambo Lempek Kec. Nambo	50 orang	13 Maret 2016	
17	Karambangan Konambota	Uspan Habsyi	Nambo Lempek Kec. Nambo	7 orang		
18	Sanseikano (Sanggar Seni Mapakat Nambo)	Jusri Mansoba	Nambo Lempek Baru Kec. Nambo	48 orang	17 November 2017	
19	Gelora Nambo Padang	Yarman Patahe	Nambo Padang Kec. Nambo	10 orang		
20	Jalin Nambo Masaangu (JNM)	Arpin Djibo	Kec. Nambo	10 orang		
21	Turonggo Lestari Budoyo	Rebo	Desa Ombolu Kec. Batui Selatan	50 orang		
22	Kudo Budi Budaya Padepoan Terata I	Zaenuri	Desa Sukamaju Kec. Batui Selatan	40 orang		
23	Gong Bleganjur	I Kadek Bagiasa	Desa Maleo Jaya Kec. Batui Selatan	30 orang		
24	Rumah Pemberdayaan ibu dan anak	Alwia Datu Paon	Desa Paisu Buloli Kec. Batui Selatan	30 orang		
25	Wahyu Raya Saputra	Wagito	Desa Tirta Kencana Kec. Toili	25 orang	28 Agustus 2014	
26	Seni Budaya Tradisional	Satromo	Desa Sentral Sari Kec. Toili	30 orang	1978	
27	Turonggo Sari Budaya	Sajid	Desa Tirta Sari Kec. Toili	40 orang	2000	
28	Tronggo Joyo	Budiono	Desa Purwo Agung Kec. Masama	40 orang	1970	
29	Sanggar Seni Lainsama	Gafar Tokalang	Kec. Masama	20 Orang	2021	
30	Palealu	Waret Kalapot	Desa Tinonda Kec. Lamala	27 orang	2012	
31	Komunitas Kulintang	Pian Bundu	Desa Sulubombong Kec. Mantoh	8 orang	2006	
32	Komunitas Umosulen	Taren Nonasi	Desa Tintigon Kec. Balantak Selatan	25 orang	2010	
33	Komunitas Samrah	Wardah Abugar	Kel. Dale-Dale Kec. Balantak	8 orang	2017	
34	Sanggar Kobelesanta	Drs. Risno Lamonjong	Kel. Balantak Kec. Balantak	32 orang	2010	
35	Mojinta	Laela Gusriny, S.Pd	Kec. Bualemo	15 orang	2006	
36	Kreatif Karya Seni	Tati Suli Lestari	Desa Demangan Jaya Kec. Bunta	20 orang	2019	
37	Kreatif Karya Seni	Wahyudi	Desa Demangan Jaya Kec. Bunta	15 orang	2014	
38	Trisno Budoyo	Rodikin	Desa Demangan Jaya Kec. Bunta	20 orang	2013	
39	Sanggar Posingkabotan	Zulfianto Bunai	Jl. Trans Sulawesi Kel. Bunta 1, Kec. Bunta	26 orang	2020	
40	Sanggar Seni Tirta Kencana		Kec. Simpang Raya	15 orang		
41	Turonggo Makmur Budoyo	Kanidjo	Desa Jaya Makmur Kec. Nuhon	50 orang	1998	

42	Kalibosi	Djubair Sambudu	Desa Pakowa Kec. Nuhon	25 orang	2000	
43	Konau	Rahman Sangkota	Jl. Trans Sulawesi Desa Tomeang Kec. Nuhon	10 orang	2017	SK CAMAT No. 141/258/SK CMT - NHN/2019 Tgl. 21 Februari 2019
44	Posingkabotan	Zulfianto Bunai	Bunta Kecamatan Bunta	38 Orang	2018	
45	Athena	Iqbal				
46	Paguyuban Jathilan Tresno Budoyo	Boinem	Desa Purwo Agung Kec. Masama	40 Orang	2005	
47	Pura Manik Geni	Ni Ketut Susilawati	Desa Purwo Agung Kec. Masama	10 Orang	2016	
Jumlah keseluruhan Pelaku seni				1.343		

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Dimensi kedua, pendidikan dapat terepresentasi dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,63, Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,34 dan diperoleh nilai dimensi pendidikan 10,98%. Dimensi ketiga, warisan budaya terepresentase dari persentase warisan budaya baik benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya maupun warisan tak benda yang telah ditetapkan yaitu 26 warisan budaya benda cagar budaya benda dan tak benda terhadap 37 warisan budaya yang ada yaitu sebesar 70,27%. Untuk warisan budaya tak benda Kabupaten Banggai memiliki 1 (satu) warisan budaya tak benda, yaitu Mombowa Tumpe berupa ritual adat istiadat yang berasal dari suku saluan di Kecamatan batui.

Tabel 3.66
Aset Cagar Budaya Kabupaten Banggai

No.	Nama Cagar Budaya	Lokasi	Keterangan
1	Masjid Nurul Huda Desa Lambangan	Kecamatan Pagimana	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018
2	Jembatan Lobu	Kecamatan Lobu	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018
3	Rumah Adat Desa Lambangan	Kecamatan Pagimana	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018
4	Kantor Dprgr	Kecamatan Luwuk Kel.Karaton	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018
5	Rumah Bapak Zuhri Noho	Kecamatan Kintom	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018
6	Makam Abdullah Bin Abd. Kadir Djaelani Alkusaini / Pekuburan Je're	Kecamatan Kintom	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018

7	Rumah Sakit Umum Luwuk /Akper	Kecamatan Luwuk	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018
8	Rumah Kapitan (Museum Daerah)	Kecamatan Luwuk	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018
9	Gereja Tua Simpangan	Kecamatan Masama	SK BUPATI BANGGAI NO.420/817/DISDIK. TGL. 7 JUNI 2018
10	Kuburan Perahu (Kubuangan Duangan)	Kecamatan Lobu Desa : Bolobungkang	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
11	Sumur Tua	Kecamatan Lobu	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
12	Masjid Tua Annur Lobu	Kecamatan Lobu	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
13	Benteng Konambota	Kecamatan Nambo	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
14	Makam Ambaral	Kecamatan Masama (Desa Taugi)	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
15	Makam Rajawali	Kecamatan Masama (Desa Taugi)	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
16	Dapur Umum Dan Bunker Jepang	Kecamatan Balantak Utara (Ds.Kampangar)	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
17	Benteng Raja Mbulang	KECAMATAN BALANTAK (Desa Dale-Dale)	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
18	Komplek Kodim Luwuk	Kecamatan Luwuk	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
19	Rumah Tinggal Bapak Husen Almahdali	Kecamatan Bunta	SK BUPATI BANGGAI NO.421/486/DISDIK TGL. 13 JANUARI 2020
20	Kantor Sangaji Bunta/ Kantor Kelurahan Salabenda	Kecamatan Bunta	SK BUPATI BANGGAI NO. 743/1406/DIKBUD TGL. 29 SEPTEMBER 2023
21	Rumah Tinggal Keluarga Bukalang	Kecamatan Bunta	SK BUPATI BANGGAI NO. 743/1406/DIKBUD TGL. 29 SEPTEMBER 2023
22	Benteng Kintom	Kecamatan Kintom	SK BUPATI BANGGAI NO. 743/1406/DIKBUD TGL. 29 SEPTEMBER 2023
23	Rumah Raja Banggai S.A.Amir Kel.Bungin	Kecamatan Luwuk	SK BUPATI BANGGAI NO. 743/1406/DIKBUD TGL. 29 SEPTEMBER 2023
24	Kuburan Bosano Tangan Besi Tangkian	Kecamatan Kintom	SK BUPATI BANGGAI NO. 743/1406/DIKBUD TGL. 29 SEPTEMBER 2023
25	Bekas Rumah Tinggal Dan Sumur Van Der Berk	Kecamatan Masama	SK BUPATI BANGGAI NO. 743/1406/DIKBUD TGL. 29 SEPTEMBER 2023
26	Rumah Raja Banggai S.A.Amir Kel.Soho	Kecamatan Luwuk	SK BUPATI BANGGAI NO. 743/1406/DIKBUD TGL. 29 SEPTEMBER 2023

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Dimensi keempat, Gender dapat terepresentasi dari rasio anggota parlemen perempuan 10 orang terhadap anggota parlemen laki-laki 25 orang, sehingga diperoleh nilai dimensi Gender sebesar 40%.

Dimensi Kelima yaitu Budaya Literasi, Budaya literasi adalah suatu budaya di dalam masyarakat yang meliputi segala usaha manusia yang berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis. budaya literasi terepresentase dari persentase penduduk yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik yang berjumlah 115 orang terhadap 319.141 jiwa penduduk usia 10 tahun keatas yaitu sebesar 0,04%, dan budaya literasi juga terepresentase dari persentase jumlah pengunjung perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat yaitu 619 orang terhadap 319.141 jiwa penduduk usia 10 tahun keatas yaitu sebesar 0,19%. Sehingga diperoleh nilai dimensi budaya literatur 0,115%

Tabel 3.67
Jumlah Penduduk/Pengunjung perpustakaan tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1.	Penduduk/Pengunjung yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik	115 Orang
3.	Penduduk yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat	619 Orang

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Tahun 2023

Tabel 3.68
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2023

No	Nama Dimensi	Nilai
1	Ekonomi Budaya	0,36 %
2	Pendidikan	30,67 %
3	Warisan Budaya	70,27 %
4	Gender	40%
5	Budaya literasi	0,115%
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		28,28%

Adapun faktor pendukung untuk mencapai sasaran meningkatnya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan daerah melalui pemajuan dan pelestarian kebudayaan babasalan serta moderasi beragama dengan indikator indeks pembangunan kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan cagar budaya di seluruh Kabupaten Banggai
2. Keberadaan gedung budaya dimaksimalkan pemanfaatannya dengan menyelenggarakan berbagai even budaya, terutama untuk meningkatkan daya Tarik wisata di Kabupaten Banggai
3. Melakukan pembinaan pada kelompok-kelompok kesenian secara kontinyu dan mendorong untuk menyelenggarakan event secara mandiri.
4. Keterlibatan masyarakat untuk melestarikan budaya yang tinggi
5. Adanya pertunjukan seni sebagai ajang untuk menunjukkan potensi objek kebudayaan sekaligus menampung bakat seni tradisi masyarakat.

Dalam proses upaya pencapaian pembangunan kebudayaan, terdapat hambatan/kendala yang dihadapi diantaranya :

1. Minat generasi muda terhadap budaya lokal sangat terbatas.
2. Pemanfaatan objek-objek budaya masih minim.
3. Kurangnya fasilitasi atau pembinaan bagi kelompok seni guna menguatkan pengetahuan mereka terkait seni dan tradisi.

Terkait permasalahan tersebut maka solusi yang dilakukan yaitu :

1. Melibatkan generasi muda dalam berbagai kegiatan budaya. Kolaborasi seni tradisi dengan seni modern untuk menarik minat generasi muda.
2. Melakukan pemetaan dan pendataan potensi objek budaya dengan menjalin komunikasi dengan pihak kecamatan dan desa guna membantu inventarisasi warisan baik benda ataupun takbenda.
3. Melakukan pembinaan bagi kelompok-kelompok seni budaya.
4. Perlunya upaya peningkatan sektor ekonomi kreatif bidang kebudayaan, dengan menjalin Kerjasama sektor pariwisata dalam hal promosi dan penataan wilayah.
5. Perlunya dukungan infrastruktur digital, berupa sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi guna mempromosikan budaya yang ada.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama”, yaitu:

Tabel 3.69

Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama

No	Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	Pengembangan Kebudayaan	1.447.676.691,00	1.367.722.160,00	94,48
3	Pembinaan Sejarah	119.549.000,00	56.520.080,00	47,28
4	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	830.074.785,00	722.517.065,00	87,04
5	Pengelolaan Permuseuman	1.139.350.437,00	1.018.339.275,00	89,38
	Jumlah	3.536.650.913,00	1.018.339.275,00	89,49

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai

Dari program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran meningkatnya revolusi mental dan pembangunan kebudayaan daerah melalui pemajuan dan pelestarian kebudayaan babasalan serta moderasi beragama, dengan capaian kinerja sasaran tersebut mencapai 56,38% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.1.018.339.275,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.3.536.650.913,00 atau sebesar 89,49%.

Tabel. 3.70

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	RPJMD	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target Akhir 2026	Capaian Akhir 2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B*	100	BB	B*	75	A	50
	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif**	50	Sangat Inovatif	Inovatif**	75	Sangat Inovatif/ Terinovatif	50
	Nilai SAKIP	Predikat	A	A***	100	A	B***	75	AA	50
	Rata-rata capaian kinerja				83,33			75,00		50,00

Sumber : * dan *** Hasil Evaluasi KemenPANRB 2023

** Hasil Penilaian Kemendagri 2023

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Banggai. pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi reformasi Birokrasi tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, Terciptanya tata Kelola Pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

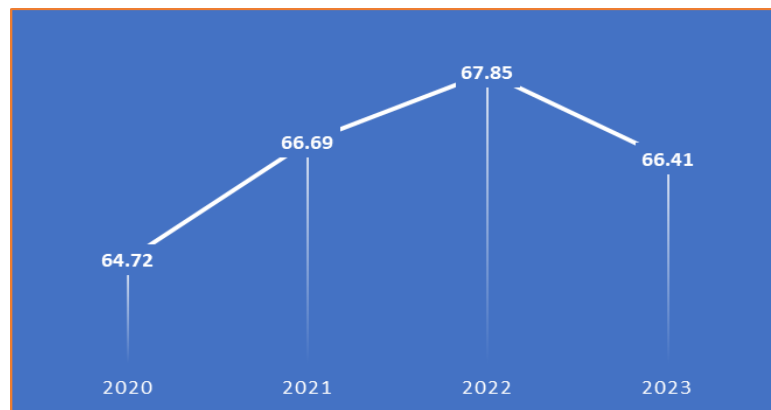
Tabel. 3.71
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai
Tahun 2023

No	Penilaian	Bobot	Nilai
1	RB General	100	59,44
2	RB Tematik	20	6,97
3	Indeks RB	120	66,41
			B

Sumber: LHE Kementerian PANRB

Berdasarkan Tabel hasil evaluasi menpan Capaian realisasi untuk tahun 2023 belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan predikat "BB" Dimana nilai Indeks RB tahun 2023 terealisasi sebesar 66,41 dengan predikat "**B**". Hasil evaluasi tahun 2023 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indicator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Namun untuk melihat perkembangan nilai reformasi birokrasi Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 3.26
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banggai, 2020-2023



Berdasarkan grafik 3.26 Terlihat bahwa adanya kenaikan nilai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2020-2022, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,44 point dari tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan kerangka logis, komponen, indicator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan, Dimana Pemerintah Daerah kabupaten Banggai harus menyesuaikan Kembali kebijakan terkait RB Tematik dan RB General.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi. Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional.

Sedangkan RB General memiliki 21 indikator atau kegiatan utama yang terdiri dari dua sasaran yakni digitalisasi administrasi pemerintahan serta budaya birokrasi berakhlak dan ASN profesional. RB General mempunyai sasaran jangka Panjang untuk

mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien dan lincah dan berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah serta tercapainya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN professional.

RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi RB tahun 2023, baik skor, skor indeks, catatan, dan rekomendasi pada setiap indikator, dapat dilihat pada Link berikut :

https://drive.google.com/file/d/1_Stgwlb_HTppefRSbvD-iN5K9hSbnUtB/view?usp=sharing

2. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran indeks inovasi daerah yang telah dilaksanakan validasi dan dilakukan quality control oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM), *Scientific Modeling Application, Research, and Training For City Centered Innovation and Technology* (SMART CITY) Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik universitas Gadja Mada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dimana pada Pasal 388 ayat 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ditegaskan kepala Daerah Melaporkan Inovasi Daerah Kepada Menteri Dalam negeri dan Menteri Dalam negeri melakukan penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan Kepala Daerah.

Target Indeks Inovasi Daerah yang telah ditetapkan pada RPJMD untuk Tahun 2023, yaitu predikat "Sangat Inovatif", sedangkan realisasi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai pada tahun 2023 mendapatkan nilai 50,65 dengan predikat "Inovatif" predikat tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023. Sehingga realisasi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten

Banggai pada Tahun 2023 belum mencapai target sesuai dengan RPJMD Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD tahun 2026 yaitu sangat inovatif.

Perangkat Daerah dan Kecamatan harus terus bergerak dengan melakukan inovasi sehingga tercipta pelayanan prima dengan menggagas terobosan baru untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai pada tahun 2023, berada dalam posisi 116. Terjadi peningkatan di tahun 2023, dimana Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai naik ke posisi 116 dari posisi 148 pada tahun 2022. Kabupaten Banggai menempati urutan pertama indeks inovasi daerah tingkat kabupaten di wilayah Sulawesi Tengah. sementara Poso dan Morowali berada di urutan kedua dan ketiga.

Adapun inovasi Kabupaten Banggai pada tahun 2023 terdapat 97 inovasi yang tersebar pada masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Nomor 050/1492/Bappelitbangda tentang Penetapan Nama Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022. Dari 97 inovasi tersebut terdapat 21 inovasi yang mendukung dan berkontribusi pada ajang penilaian Indeks inovasi daerah provinsi, kabupaten dan kota tahun 2023, Dimana kabupaten Banggai berada pada peringkat 116 dengan nilai/skor indeks 50,65 atau predikat inovatif.



<https://drive.google.com/drive/folders/13gyoHxS1VsouwkbTdefK9UOZO26iC?usp=sharing>

Penilaian Inovasi Oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu *Innovative Government Award* (IGA), ditentukan oleh kuantitas dengan indikator penilaian yang telah bertambah menjadi 38 indikator.

Pemerintah Kabupaten terus mendorong Perangkat daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat, dengan terus berinovasi dan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi Masyarakat, salah satu bentuk apresiasi dan dorongan dari Pemerintah Kabupaten Banggai bagi perangkat daerah yang telah

berkontribusi dan berpartisipasi dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2023. Adapun daftar inovasi yang berpartisipasi dalam penilaian indeks inovasi Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.72
Daftar Inovasi yang berpartisipasi dalam penilaian indeks inovasi daerah
Tahun 2023

No	Nama Inovator	Nama Inovasi	Jenis Inovasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai	Rumah Data Laporan (Rudal)	Digital
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai	Sistem penyelenggaraan Perumahan Pemukiman (SIPERMAN)	Digital
3	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Banggai	E-Absensi	Digital
4	Dinas Perikanan Kab. Banggai	Satu juta satu pekarangan (SJSP) Sektor perikanan	Non Digital
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Banggai	Satu juta satu pekarangan (SJSP) Sektor Peternakan	Non Digital
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Banggai	Mantri Hewan Keliling (Mantri Healing)	Non Digital
7	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banggai	Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) Sektor ketahanan pangan	Non Digital
8	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Banggai	Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) Sektor Tanaman Pangan	Non Digital
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai	Satu lahir lima terbit (Sabit)	Digital
10	Dinas Pariwisata Kab. Banggai	Festival Banggai	Non Digital
11	Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai	BA Pantau ASN 9Pembayaran PBB P2 tepat waktu ASN)	Non Digital
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Banggai	Ayah Ibu Asuh Stunting	Non Digital
13	Uptd Rumah Sakit Umum Kab. Banggai	Mama Kinclong	Non Digital
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai	Sistem Informasi Pelatihan Bagi Para Pencari Kerja (Silat Pencak)	Digital
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banggai	Job Fair	Non Digital
16	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Banggai	Sistem Evaluasi Kinerja Kecamatan Terpadu (sekmantu)	Non Digital
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Banggai	Gallery online	Digital
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Banggai	Tera Jaman Now	Digital
19	Kecamatan Moilong	Si Penabuh Hati	Non Digital
20	Kecamatan nuhon	Nu-Data (Nuhon Dalam Data)	Digital

21	Puskesmas Hunduhon	Temukan Penderita Gangguan Jiwa (Teman sejiwa)	Non Digital
----	--------------------	--	-------------

Sumber : Badan riset dan inovasi Daerah Kabupaten Banggai (2023)

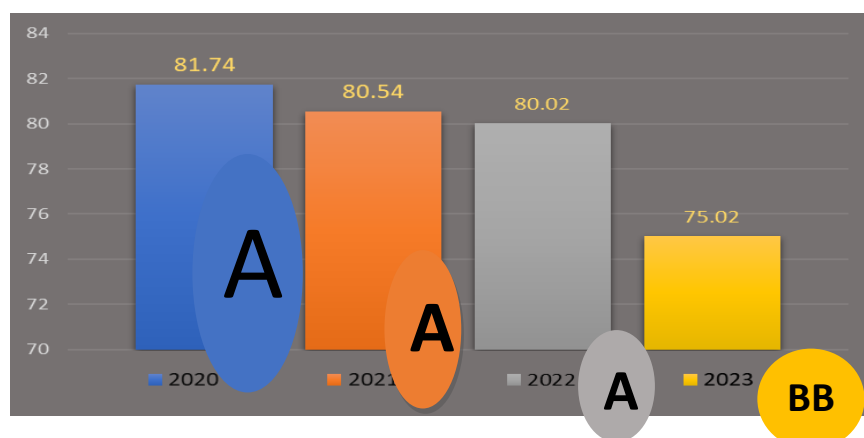
3. Nilai SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga harus dilaksanakannya evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan evaluasi pada tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- Memperoleh informasi mengenai implementasi AKIP;
- Menilai tingkat implementasi AKIP;
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Grafik 3.27
Nilai dan Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Banggai, 2019-2023



Sumber: Kemenpan RB Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan AKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor: B/532/AA.05/2023, Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai menunjukkan bahwa nilai sebesar 75,02 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Namun capaian realisasi untuk tahun 2023 dengan nilai sebesar 75,2 atau predikat “BB”, tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu predikat “A” dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 hasil evaluasi AKIP memperoleh nilai 80,02 dengan predikat “A” masih lebih tinggi 5,0 point dibandingkan tahun 2023. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.73
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kabupaten Banggai Tahun 2022 dan 2023

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	24,03	23,09
b. Pengukuran Kinerja	30	24,28	22,61
c. Pelaporan Kinerja	15	12,64	11,97
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,07	17,35
Nilai Hasil Evaluasi	100	80,02	75,02
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	BB

a. Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Meskipun secara umum pohon kinerja pada level Pemda dan PD telah diperbaiki, namun masih diperlukan penyempurnaan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan pada pohon kinerja yang telah disusun belum Sepenuhnya mengidentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) atau faktor kunci keberhasilan yang secara tepat menggambarkan permasalahan faktual yang terjadi. Pohon kinerja masih sebatas menerjemahkan kondisi eksisting dan belum mengeksplorasi alternatif solusi atas pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan kinerja. Akibatnya, hubungan kinerja, strategi,

kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) belum terbangun secara cukup;

- Penetapan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) PD belum sepenuhnya didasari pada data yang andal sehingga terdapat target yang tidak sinkron dan tidak relevan dengan target kinerja di tingkat Pemda. Lainnya, target juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya, sehingga masih ditemukan penetapan target yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

b. Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi mulai dari level Pemda sampai ke PD dan individu pegawai. Pengukuran kinerja juga belum didukung dengan suatu sistem terintegrasi yang dapat mengelola data kinerja sehingga mempermudah proses pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja;
- Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat PD belum dilengkapi dengan definisi operasional melainkan hanya formulasi perhitungan saja, sehingga penjelasan indikator kinerja nya masih belum cukup jelas dan mendetail untuk menggambarkan capaian kinerja;
- Masih ditemukan formulasi indikator kinerja di tingkat PD yang belum memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound*). Sebagai contoh pada salah satu indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu “persentase transmigran yang mandiri”. Formulasi perhitungan serta definisi operasional atas indikator tersebut ialah transmigran yang dibina dibagi transmigran yang ditempatkan;
- Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja (berdasarkan capaian perjanjian kinerja) sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja, pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemkab. Banggai belum sepenuhnya dilakukan.

c. Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Reviu Inspektorat terhadap laporan kinerja PD masih belum optimal terutama dalam hal melihat kedalaman analisis informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja. Hal ini terlihat dari adanya informasi dalam laporan kinerja PD

tahun 2022 yang sama persis dengan laporan kinerja PD tahun 2021 meskipun dengan kondisi kinerja yang berbeda;

- Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam laporan kinerja Tingkat Pemda maupun PD belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan.

d. Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi);
- Belum tersampainya informasi terkait evaluasi kinerja baik pada tahun 2022 maupun tahun 2023 pada *website* <http://esakip.banqqaikab.go.id/>;
- Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) belum memberikan rekomendasi yang cukup dan menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP.

Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyempurnakan pohon kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan cara memastikan pohon kinerja telah mempertimbangkan CSF yang menjadi area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) dapat terbangun secara cukup;
2. Memperbaiki penetapan target kinerja pada dokumen perencanaan PD agar sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan di tingkat Pemda. Dan dalam penetapannya agar disertai dengan data dan bukti dukung yang andal serta relevan agar target kinerja akurat. Selain itu, penetapan target kinerja juga dapat disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya agar penetapan target di tahun selanjutnya tidak lebih rendah;
3. Membangun dan memanfaatkan sistem untuk mengawal pengukuran kinerja yang berjenjang dan terintegrasi mulai dari Pemda, PD, sampai ke individu pegawai;

4. Melengkapi dokumen IKU seluruh PD dengan menambah definisi operasional dan memberikan penjelasan detail setiap formulasi perhitungan dengan acuan kebijakan maupun data dukung lainnya. Selanjutnya, memastikan bahwa definisi operasional dan formulasi perhitungan relevan dengan indikator kinerja yang ditetapkan, serta sesuai dengan pada level kinerja nya;
5. Memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pemberian TPP, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN di Pemkab. Banggai;
6. Memperkuat dan memperdalam reviu Inspektorat terhadap laporan kinerja seluruh PD untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah akuntabel dan analisis informasi yang disampaikan relevan dengan kondisi kerjanya;
7. Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam laporan kinerja Pemda maupun PD sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan kedepan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya;
8. Membangun dan memanfaatkan sistem untuk melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal internal kepada seluruh PD serta mengintegrasikannya dengan sistem dalam komponen SAKIP lainnya yaitu perencanaan, pengukuran, dan pelaporan agar temuan dalam evaluasiakuntabilitas kinerja internal lebih detail dan akurat menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
9. Melengkapi informasi kinerja pada *website* E-SAKIP Kab. Banggai agar transparan dan terlihat oleh publik;
10. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat lebih menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran “Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama”, yaitu:

Tabel.3.74

Program yang mendukung sasaran Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai

Program	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	963.840.182.933,00	858.801.850.369,00	90,90
Pendaftaran Penduduk	1.037.800.830,00	833.245.020,00	80,29
Pencatatan Sipil	257.999.926,00	191.957.326,00	88,95
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	426.279.992,00	379.740.540,00	90,15
Pengelolaan Profil Kependudukan	104.163.013,00	95.161.562,00	91,31
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	253.309.050,00	125.704.950,00	49,63
Promosi Penanaman Modal	449.552.000,00	328.937.332,00	73,17
Pelayanan Penanaman Modal	270.753.250,00	137.492.360,00	50,78
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	591.466.000,00	439.376.295,00	74,29
Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	299.536.450,00	41.685.100,00	13,92
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	236.189.500,00	202.352.560,00	85,67
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	162.782.800,00	156.291.899,00	95,01
Pengelolaan Arsip	132.480.420,00	132.480.420,00	100,00
Pembinaan Perpustakaan	7129.544.670,00	644.091.330,00	89,51
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	9.173.750,00	9.173.750,00	100,00
Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	115.006.840,00	110.210.751,00	95,83
Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	23.274.082.455,00	22.354.164.169,00	96,05
Perekonomian Dan Pembangunan	5.093.200.935,00	4.640.208.496,00	91,11
Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	15.532.544.930,00	15.307.164.784,00	98,55
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.226.794.749,00	3.338.971.794,00	78,99
Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.352.512.000,00	3.204.800.964,00	95,59
Pengelolaan Keuangan Daerah	2.421.602.960.624,00	2.402.326.853.352,00	99,20
Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.566.058.634,00	1.939.372.160,00	75,58
Pengelolaan Pendapatan Daerah	239.361.148.568,00	216.317.216.371,46	90,37%
Kepegawaian Daerah	7.781.635.693,00	4.103.549.702,00	52,73
Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.420.089.960,00	1.364.318.340,00	96,07
Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.200.000.000,00	1.963.111.606,00	89,23

Penyelenggaraan Pengawasan	2.693.798.500,00	2.107.883.703,00	78,25
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	254.167.785,00	232.842.135,00	91,61
Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9.061.863.105,00	8.870.037.107,00	97,88
Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	319.392.300,00	319.105.300,00	99,91
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.747.820.360,00	1.724.401.360,00	98,66
Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.237.000,00	27.457.000,00	97,24
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	651.177.400,00	609.714.200,00	93,63
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.977.132.300,00	7.931.552.393,00	99,43
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	504.539.000,00	504.539.000,00	100,00
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.611.159.750,00	1.417.619.450,00	87,98
Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	35.059.585.490,00	34.574.952.566,00	98,61
Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	364.397.737,00	287.639.700,00	78,93
Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	342.485.950,00	233.150.100,00	68,07
Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	. 653.396.450,00	590.925.300,00	90,43
Jumlah	3.762.343.006.649,00	3.598.921.302.616,46	95,66

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemuda dan Olahraga, BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPMPTSP, BPKAD, Bappeda, Dispersipan, DKISP, Setda Badan Kesbangpol, Kecamatan, Kab.Banggai, 2023

Dari program-program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dengan capaian kinerja sasaran tersebut mencapai 75,00% dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 3.598.921.302.616,46 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.762.343.006.649,00 atau sebesar 95,66%.

Tabel 3.75
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Kabupaten Banggai Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator	% Rata-Rata Capaian Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai yang Produktif dan Sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	103,87	358.242.290.635,00	283.575.575.129,00	79,16
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
	Angka Kemiskinan				
	Gini Rasio				
Tingkat Efisiensi : 24,71%					
Tingkat Efektifitas : 131,22%					
Meningkatnya Kualitas Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Pertumbuhan Wirausaha Baru	Kontribusi Usaha Perdagangan, Koperasi, UMKM dan IKM terhadap PDRB	123,81	5.215.471.498,00	4,147.217.565,00	79,52
Tingkat Efisiensi : 44,29%					
Tingkat Efektifitas : 155,70%					
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Perdesaan	Persentase Desa Maju Berdasarkan IDM	118,52	11.364.380.805,00	8.034.004.663,00	67,15
Tingkat Efisiensi : 51,37%					
Tingkat Efektifitas : 176,50%					
Tersedianya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas, Layak dan Merata Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Konektivitas	Persentase Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Dalam Kondisi Baik	83,03	258.433.434.525,00	246.824.729.684,00	95,51
Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kapasitas Pemda dan Masyarakat dalam Penanggulan	Indeks Ketahanan Daerah	100,00	3.800.933.250,00	3.486.555.420,00	91,73

Bencana					
Tingkat Efisiensi : 8,27%					
Tingkat Efektifitas : 109,02%					
Meningkatnya Investasi dan Pengelolaan Potensi Pertanian, perikanan dan Kelautan serta Pertambangan untuk Mendukung Perekonomian Daerah	Kontribusi Sektor Pertanian, Perikanan dan pertambangan Terhadap PDRB	109,02	85.956.928.661,00	80.937.257.408,00	94,16
	Indeks Ketahanan Pangan				
Tingkat Efisiensi : 14,86%					
Tingkat Efektifitas : 115,78%					
Meningkatnya Kualitas Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan pengendalian Dampak Perubahan Iklim untuk Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	95,73	18.179.560.198,00	15.207.870.291,00	83,65
Meningkatnya Pariwisata untuk Mendukung Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berbasis Budaya dan Sejarah	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	12,89	3.875.990.376,00	3.340.394.339,00	86,18
Meningkatnya Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Daerah Melalui Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Babasalan serta Moderasi Beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan	56,38	3.536.650.913,00	1.018.339.275,00	89,49
Meningkatnya Indrks Reformasi Birokrasi, Indeks Inovasi Daerah dan Nilai SAKIP Kabupaten Banggai	Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	3.762.343.006.649,00	3.598.921.302.616,46	95,66
	Indeks Inovasi Daerah				
	Nilai SAKIP				

3.4. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan untuk mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp 2.486.434.212.791,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.292.960.546.966,50 atau mencapai 92,22%. Rincian pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1.4.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Adapun komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai adalah meliputi:

Tabel 3.76
Realisasi Pendapatan Daerah
Per 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
PENDAPATAN	2.256.838.717.233	2.252.672.427.445,45	99,82
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	239.361.148.568	216.322.096.372,45	90,37
Pajak Daerah	103.360.422.000	68.015.589.943,15	65,80
Retribusi Daerah	26.137.960.486	20.593.633.673,00	78,79
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000	5.714.244.284,00	219,78
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	107.262.766.082	121.998.628.472,30	113,74
Pendapatan Transfer	1.992.856.036.129	2.010.328.512.833,00	100,88
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.932.465.625.858	1.939.698.790.271,00	100,37
Dana Perimbangan	1.685.154.203.858	1.692.387.368.271,00	100,43
Dana Insentif Daerah (DID)	20.281.195.000	20.281.195.000,00	100,00
Dana Desa	227.030.227.000	227.030.227.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.390.410.271	70.629.722.562,00	166,00
Pendapatan Bagi Hasil	57.970.410.271	68.209.722.562,00	117,66
Bantuan Keuangan	2.420.000.000	2.420.000.000,00	100,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24.621.532.536	26.021.818.240,00	105,69
Pendapatan Hibah	3.397.311.790	5.641.246.503,00	166,05
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21.224.220.746	20.380.571.737,00	96,03

Sumber : BPKAD Kab. Banggai, 2023

Berdasarkan rincian pendapatan daerah pada tabel 3.76 terlihat bahwa keseluruhan realisasi pendapatan diperoleh sebesar 99,82%, dan realisasi terbesar masih berada pada pendapatan transfer sebesar Rp. 2.010.328.512.833,00 atau 100,88% dari total pendapatan transfer Rp. 1.992.856.036.129,00 Kabupaten Banggai.

Berdasarkan rincian tersebut diatas dapat diuraikan menurut sumber pendapatan dengan penjabaran bahwa :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan RKUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode TA 2023 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Banggai berdasarkan kewenangannya berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi PAD TA 2023 sebesar Rp. 216.322.096.372,45 atau 90,37%, lebih kecil Rp.23.039.052.195,55 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 239.361.148.568 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banggai dianggarkan sebesar Rp 103.360.422.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 68.015.589.943,15 atau sebesar 65,80% dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 3.77
Pendapatan Pajak Daerah

No	Jenis Pajak	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Pajak Hotel	3.415.500.000,00	2.683.946.600,00	78,58
2	Pajak Restoran	18.950.500.000,00	11.190.111.526,00	59,05
3	Pajak Hiburan	600.534.000,00	262.041.135,00	43,63
4	Pajak Reklame	2.251.770.000	978.188.643,00	43,44
5	Pajak Penerangan Jalan	30.000.000.000	22.832.622.068,00	76,11
6	Pajak Parkir	500.735.000	357.692.450,00	71,43
7	Pajak Air Tanah	10.814.500.000	1.642.806.504,00	15,19
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.206.964.000	10.637.152.871,62	69,95
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13.800.279.000	9.779.206.843,78	70,86
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.819.640.000	7.651.821.301,75	97,85
Jumlah		103.360.422.000	68.015.589.943,15	65,80

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2023

Berdasarkan tabel 3.77 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di atas, dapat diketahui bahwa masing – masing jenis Pajak Daerah mencapai angka realisasi kurang dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 secara umum mencapai 65,80%. Sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi Pajak Daerah mencapai angka Rp. 68.015.589.943,15. Masalah/kendala dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal

- Kurangnya kemampuan petugas pajak dalam menggali potensi pendapatan Pajak Daerah;
- Kurangnya jumlah personil pengelola Pajak Daerah;
- Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan oleh petugas untuk menyadarkan Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan;
- Lemahnya pengoperasian dan pengawasan teknologi informasi yang tersedia;

b. Faktor Eksternal

- Kurangnya tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap aturan perpajakan yang berlaku;
- Kurangnya tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap manfaat pajak untuk pembangunan daerah;
- Kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya sehingga banyak Wajib Pajak yang bersikap abai terhadap kewajiban perpajakan dan cenderung menghindarinya;

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Jasa Usaha, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Penerimaan Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2023 sebesar Rp. 20.613.323.673,00. atau 78,86% dari pagu perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 26.137.960.486,00. dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel. 3.78
Pendapatan Retribusi Daerah

No	Jenis Pajak	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1.	Retribusi Jasa Umum	11.385.987.486,00	13.137.035.208,00	115,38
2.	Retribusi Jasa Usaha	9.610.273.000,00	5.565.961.080,00	57,92
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	5.141.700.000	1.890.637.385,00	36,77
Jumlah		26.137.960.486	20.593.633.673,00	78,79

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2023

Berdasarkan tabel 3.78 di atas diketahui bahwa retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp. 26.137.960.486,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.593.633.673,00 atau 78,79% yang berarti kurang dari angka yang ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja. Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 mencapai angka persentase yang bervariasi, mulai dari persentase terendah 36,77% hingga mencapai 115,38% (kurang dari target).

Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi realisasi Retribusi Daerah tersebut, yaitu :

- a. Penggalian potensi Retribusi Daerah belum optimal;
- b. Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan retribusi daerah;
- c. Sistem pengelolaan Retribusi Daerah yang diterapkan oleh OPD terkait belum memadai sehingga masih banyak potensi yang tidak tertagih;
- d. Banyaknya wajib retribusi yang belum patuh terhadap kewajibannya;
- e. Belum optimalnya penerapan regulasi yang ada berkaitan dengan pemberian sanksi tegas terhadap Wajib Retribusi yang tidak patuh.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel 3.79
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2023

No.	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.600.000.000	5.714.244.284,00	219,78

Sumber : BPKAD Kab.Banggai

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 adalah Rp 5.714.244.284,00 atau 219,78% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.600.000.000,00. Realisasi tersebut telah mencapai target bahkan melampaui target yang ditetapkan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada TA 2023, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp 107.262.766.082,00 dengan realisasi sebesar Rp. 121.998.628.472,30 atau sebesar 113,74%.

Tabel. 3.80
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.100.000.000,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro	6.000.000.000,00	5.865.972.136,00	97,77
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00	68.353.933,00	13,67
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.500.000.000,00	8.567.134.173,05	342,69
5	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	106.060.408,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian	934.661.917,00	4.730.304.935,00	506,10
7	Pendapatan BLUD	96.228.104.165,00	102.523.578.648,19,00	106,54
8	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	137.224.239,07	0,00
Jumlah		107.262.766.082,00	121.998.628.472,31,00	113,74

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2023

b. Pendapatan Transfer

Dana Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya, transfer dari Pemerintah Provinsi, serta bantuan keuangan. Pada TA 2023 Dana Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Kas Daerah sebesar Rp. 2.010.328.512.833,00 atau 100,88% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.992.856.036.129 Berikut ini merupakan rincian dari pendapatan transfer.

Tabel. 3.81
Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.932.465.625.858,00	1.939.698.790.271,00	100,37
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.390.410.271,00	70.629.722.562,00	116,96
Jumlah		1.992.856.036.129,00	2.010.328.512.833,00	100,88

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2023

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan mencapai sebesar Rp. 2.010.328.512.833,00. atau 100,88% lebih dari anggaran setelah

perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.992.856.036.129,00. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel. 3.82
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Dana Perimbangan	1.685.154.203.858	1.692.387.368.271,00	100,43
2	Dana Insentif Daerah (DID)	20.281.195.000	20.281.195.000,00	100,00
3	Dana Desa	227.030.227.000	227.030.227.000	100,00
Jumlah		1.932.465.625.858	1.939.698.790.271,00	100,37

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2023

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari pendapatan hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat. Pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp. 24.621.532.536,00 terealisasi sebesar Rp. 26.021.818.240,00 atau 105,69%.

1.4.2. Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2023

Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Secara ideal Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun komponen Belanja Daerah meliputi:

Tabel 3.83
Realisasi Belanja Daerah
Per 31 Desember 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%
BELANJA	2.486.531.212.791,00	2.292.960.546.966,50	92,22
BELANJA OPERASI	1.698.459.372.614,00	1.551.231.143.798,50	91,34
Belanja Pegawai	880.781.424.103,00	792.226.768.174,50	89,96
Belanja Barang dan Jasa	728.579.562.644,00	683.859.226.468,00	93,86
Belanja Subsidi	404.000.000,00	403.713.720,00	99,93
Belanja Hibah	84.449.535.867,00	70.544.915.436,00	83,53
Belanja Bantuan Sosial	4.244.850.000,00	4.196.520.000,00	98,86

BELANJA MODAL	388.640.852.298,00	358.743.404.758,00	92,31
Belanja Modal Tanah	785.568.000,00	540.059.109,00	68,75
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.947.984.413,00	69.770.291.302,00	88,38
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	167.857.107.522,00	154.451.609.928,00	92,01
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	140.657.192.363,00	133.597.972.919,00	94,98
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	385.000.000,00	375.471.500,00	97,53
Belanja Modal Aset Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	17.665.698.330,00	1.228.330.539,00	6,95
Belanja Tidak Terduga	17.665.698.330,00	1.228.330.539,00	6,95
BELANJA TRANSFER	381.765.289.549,00	381.757.667.871,00	100,00
BELANJA BAGI HASIL	12.949.838.249,00	12.943.866.569,00	99,95
Belanja Bagi Hasil	12.949.838.249,00	12.943.866.569,00	99,95
BELANJA BANTUAN KEUANGAN	368.815.451.300,00	368.813.801.302,00	100,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(229.595.495.558,00)	(40.288.119.521,05)	17,55

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2023

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD Pemerintah Kabupaten Banggai yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode TA 2023 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Dari tabel 3.83 tersebut bahwa belanja kabupaten banggai dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial. Realisasi belanja operasi mencapai sebesar Rp. 1.551.231.143.798,50 atau efisiensi sebesar Rp 147.131.228.815,50 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.698.362.372.614,00.

Komponen belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp. 792.226.768.174,50 atau terjadi efisiensi sebesar

Rp. 88.457.655.928,50 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 880.684.424.103,00 atau 89,96%. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.84
Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	573.310.449.468,00	498.289.428.051,00	86,91
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	165.946.991.359,00	162.418.897.539,00	97,87
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	120.940.224.292,00	111.124.175.657,50	91,88
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.730.772.459,00	18.678.726.125,00	99,72
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	184.112.525,00	171.244.802,00	93,01
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.000.000,00	912.000.000,00	100,00
7	Belanja Pegawai BLUD	659.874.000,00	632.296.000,00	95,82
Jumlah		880.684.424.103,00	792.226.768.174,50	89,96

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2023

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp. 728.579.562.644,00 dan terealisasi sebesar Rp. 683.859.226.468,00 atau 93,86%. Berikut ini adalah rincian dari Belanja Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.85
Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Belanja Barang	171.687.429.713,00	158.013.584.489,00	92,04
2	Belanja Jasa	273.353.426.410,00	250.246.935.940,00	91,55

3	Belanja Pemeliharaan	19.971.114.627,00	18.029.548.996,00	90,28
4	Belanja Perjalanan Dinas	125.731.049.859,00	112.488.425.048,00	89,47
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.189.937.294,00	3.989.620.000,00	95,22
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	39.149.048.009,00	40.963.537.399,00	104,63
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	94.497.556.732,00	100.127.574.596,00	105,96
Jumlah		728.579.562.644,00	683.859.226.468,00	93,86

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2023

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Merupakan belanja yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum, Belanja Subsidi Terealisasi Sebesar Rp. 403.713.720,00 dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 404.000.000,00 atau 99,93%.

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, perusahaan daerah, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp. 70.544.915.436,00 atau 83,53% dari anggaran yang telah ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp. 84.449.535.867,00.

Berikut ini adalah rincian Belanja Hibah TA. 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.86
Belanja Hibah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	34.224.285.637,00	33.633.872.800,00	98,27
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	45.544.094.090,00	36.152.389.488,00	79,38
3	Belanja Hibah Dana BOS	3.920.500.000,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	758.656.140,00	758.653.148,00	100,00
Jumlah		84.447.535.867,00	70.544.915.436,00	83,54

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2023

5) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada Anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan social dilakukan setelah memprioritaskan penemuan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Bantuan sosial berupa uang kepada individu atau keluarga terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Banggai dianggarkan selama TA 2023 sebesar Rp. 4.244.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.196.520.000,00 atau 98,86%.

b) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 358.743.404.758,00 atau efisiensi sebesar Rp. 29.897.447.540,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 388.640.852.298,00 Belanja Modal menyerap dana sebesar 92,31 % dari anggaran Belanja Modal yang telah ditetapkan setelah perubahan.

c) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk keperluan penanganan bencana alam dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan penyelenggaraannya oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Belanja Tidak Terduga untuk tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 17.665.698.330,00 dan sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 1.228.330.539,00 atau 6,95%.

1.4.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang

akan diterima kembali dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai meliputi:

Tabel 3.87
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	238.318.603.778,00	256.489.465.160.67	107.62
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	237.318.603.778,00	256.489.465.160.67	108.07
Penghematan Belanja	237.318.603.778,00	256.489.465.160.67	108.07
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Pusat	1.000.000.000,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.626.108.220,00	7.626.108.220,00	88,41
Penyertaan Modal Daerah	7.626.108.220,00	7.626.108.220,00	100,00
Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	229.692.495.558,00	248.863.356.940,67	108,35
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	97.000.000,00	208.575.237.419.619,00	215,026

Sumber : BPKAD Kab. Banggai 2023

Berdasarkan tabel diatas pembiayaan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pembiayaan, penjualan obligasi pemerintah daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- b. Penerimaan pembiayaan Pemerintah Daerah selama ini baru terbatas pada penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Penganggaran tersebut didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran tahun berkenaan

yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan atau potensi pendapatan yang direncanakan sulit untuk dinaikan.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- a. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok-pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
- b. Selama tahun anggaran 2023 pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dan dibelanjakan setiap tahunnya, Alokasi anggaran Pengeluaran pembiayaan tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 8628.108.220,00. Hal tersebut disebabkan adanya penyertaan modal investasi daerah dan pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, serta Pemberian Pinjaman daerah kepada masyarakat.
- c. Realisasi Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 sebesar Rp. 7.626.108.220,00,00 atau 88,41% dari target anggaran sebesar Rp. 8.626.108.220,00.

3) Realisasi Pembiayaan Daerah

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai yang perlu dibayarkan kembali. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai sebesar Rp. 256.489.465.160,67 atau 107,62% dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 238.318.603.778,00.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp. 8.626.108.220,00 namun terealisasi sebesar Rp. 7.626.108.220,00 diperuntukkan sebagai 88,41%

BAB IV PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penerapan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Banggai, maka dalam pelaporan kinerja tahun 2023 merupakan masa pelaporan tahun kedua pada periode kepemimpinan Kepala Daerah periode 2021-2026. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap Misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai terhadap 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 6 indikator sasaran diperoleh capaian kinerja lebih dari 100% bermakna Sangat Baik, 8 indikator sasaran diperoleh capaian kinerja >75%-100% bermakna Baik, 2 indikator sasaran diperoleh capaian kinerja 55%-75% bermakna Cukup, dan 1 indikator sasaran diperoleh capaian kinerja <55% bermakna Kurang. Meskipun terdapat beberapa indikator masih belum berhasil, namun secara umum target indikator kinerja pada Tahun 2023 dikategorikan cukup berhasil dengan nilai capaian rata-ratanya yaitu sebesar 91,34% dari 15 indikator, 1 indikator dengan capaian rendah dan 1 indikator dengan capaian inovatif.

Sebagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian target sasaran kinerja di masa yang akan datang, maka dilakukan upaya-upaya antara lain :

1. Melakukan pengukuran secara periodik terhadap hasil capaian kinerja sebagai bahan pengendali pencapaian kinerja pada akhir tahun anggaran agar upaya pencapaian target kinerja dapat optimal.
2. Melaksanakan program dan kegiatan yang diprioritaskan pada capaian sasaran yang belum berhasil.
3. Membangun dan mengintegrasikan sistem pengelolaan dalam komponen SAKIP dengan sistem untuk melaksanakan evaluasi AKIP internal agar temuan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal lebih detail dan akurat.
4. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap indikator pada Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Banggai.

Luwuk, Maret 2024

BUPATI BANGGAI
IR. H. AMIRUDIN, MM

PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

1. Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 dari KemenPANRB
2. Penghargaan Opini WTP 11 kali berturut-turut untuk laporan keuangan pemerintah daerah
3. Penghargaan UHC Award 2023 dari Wakil Presiden Republik Indonesia
4. Penghargaan Pembangunan daerah (PPD) peringkat III Tingkat provinsi Sulawesi Tengah
5. Penghargaan dari Kementerian hukum dan ham (kemenkumham) RI sebagai kabupaten peduli ham tahun 2023



Inovasi Ambulance Dering Ibu Hamil oleh Pemerintah Kabupaten Banggai meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik yang terjaring di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023.



Pemerintah Kabupaten Banggai kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2022



Pemkab Banggai berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) karena mampu menjamin hampir 100 persen warganya mendapatkan layanan kesehatan gratis dalam program Jaminan Kesehatan Nasional



Pemerintah Kabupaten Banggai meraih peringkat ke-3 dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023.



Berdasarkan penilaian Menteri Hukum dan HAM, Kabupaten Banggai ditetapkan sebagai kabupaten peduli HAM di Provinsi Sulteng.

